

J S P M

Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Malikussaleh



Vol. 1 No. 1, Juni 2020

KARAKTER BANGSA DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

**Habitus Pembalak Liar pada Masyarakat Ketambe
Kabupaten Aceh Tenggara**
Muhammad Al Bahri & Nirzalin

**Penerapan Pendidikan Karakter dalam Mengurangi
Perilaku Menyimpang Siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe**
A Marliah, M Nazaruddin, & M Akmal

**Pola Parenting dan Pembentukan Karakter Siswa
Sekolah Dasar Negeri 6 Kabupaten Bireuen**
Zuraida Adam, Suadi, & Abidin Nurdin

**Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana
di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe**
Novika Rahnayanti, Muhammad Bin Abubakar, & M Akmal

**Perwujudan Industri Pariwisata 4.0
melalui Implementasi *Digital Tourism* di Kota Lhokseumawe**
Sufi & Julian Sabri

**Konsumerisme dan Gaya Hidup Perempuan di Ruang Sosial
Analisis Budaya Pembedaan Diri di Lingkungan FISIP Unimal**
Rahmi Rachel & Rakhmadsyah Putra Rangkyut

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Vol. 1, No. 1, Juni 2020

Editor in Chief

Dr. Nirzalin, M.Si

Managing Editor

Indra Setia Bakti, S.Kesos., M.Sos

Editorial Board

Prof. Dr. Irwan Abdullan (UGM), Prof. Dr. Suharyono, M.A (UNIBRAW), Dr. Muhammad Sulhan, M.Si (UGM), Dr. M. Akmal, S.Sos., M.A (UNIMAL), Dr. Warjio, M.A (USU), Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si (UNIBRAW)

Editorial Secretary

Anismar, S.Ag., M.Si (UNIMAL), Rizki Yunanda, S.Sosio., M.Sos (UNIMAL), Zakaria, S.E, Indra Milia Rahmi, S.T

Layouter

Khairul Amin

Alamat Redaksi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Malikussaleh

Kampus Bukit Indah Jl. Sumatera No.8 Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe

E-mail: jspm@unimal.ac.id

Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jspm>

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) memiliki tujuan utama menyebarkan artikel ilmiah dan original dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer, diantaranya: 1) pendidikan inklusif, 2) pembangunan berkelanjutan, 3) pembangunan konflik dan perdamaian, 4) gerakan elit dan sosial, 5) politik dan identitas gender, 6) masyarakat digital dan disrupsi, 7) masyarakat sipil, 8) e-commerce dan pasar baru, 9) pembangunan berkelanjutan, 10) politik, pemerintah & kebijakan publik, 11) media dan transformasi sosial, 12) demokrasi, globalisasi, radikalisme dan terorisme, 13) budaya lokal, 14) revolusi industri 4.0. Redaksi menerima tulisan seputar dinamika sosial masyarakat baik gagasan yang bersifat teoritis, empiris, kritis, maupun reflektif. Tulisan dikirim ke email: jspm@unimal.ac.id.

DAFTAR ISI

Editorial Board

Daftar Isi

Habitus Pembalok Liar pada Masyarakat Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Muhammad Al Bahri & Nirzalin..... 1-22

Penerapan Pendidikan Karakter dalam Mengurangi Perilaku Menyimpang Siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe

A Marliah, M Nazaruddin, & M Akmal 23-44

Pola Parenting dan Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar Negeri 6 Kabupaten Bireuen

Zuraida Adam, Suadi, & Abidin Nurdin 45-65

Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Novika Rahnayanti, Muhammad Bin Abubakar, & M Akmal 66-78

Perwujudan Industri Pariwisata 4.0 melalui Implementasi Digital Tourism di Kota Lhokseumawe

Sufi & Julian Sabri..... 79-96

Konsumerisme dan Gaya Hidup Perempuan di Ruang Sosial Analisis Budaya Pembedaan Diri di Lingkungan FISIP Unimal

Rahmi Rachel & Rakhmadsyah Putra Rangkuty 97-113

J S P M

Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Malikussaleh

HABITUS PEMBALAK LIAR PADA MASYARAKAT KETAMBE KABUPATEN ACEH TENGGARA

Muhammad Al Bahri, Nirzalin ¹⁾

¹ Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, nirzalin@unimal.ac.id

ABSTRACT

This research examines the “Illegal Logging Habitus in Ketambe Community, Aceh Tenggara District”. The purpose of this research is to know and understand how illegal logging practices, the process of socializing illegal logging habits and why illegal logging practices are still carried out even though the community already knows the risks will have implications for natural disasters. This research was conducted in Ketambe District, Aceh Tenggara District, Aceh Province. This study uses the Habitus theory developed by Pierre Bourdieu. This study used a qualitative descriptive approach, the data in this study were collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study explain that the practice of illegal logging in Ketambe Subdistrict, Aceh Tenggara District is carried out systematically by timber shopkeepers who have the capital and strategic positions as figures in society and their relationships with unscrupulous state apparatus and provide gratification to these State officials in order to maintain their business. in the logging sector. The socialization of habitus to illegal logging in the ketambe community through transformation results from empirical experiences by being heard, shown, and taught to act so that in order to survive, they are taught with explanations of how to act as loggers. As well as the motive that encourages people to continue to carry out illegal logging actions is a pragmatic perspective about obtaining economic benefits in a short time coupled with very limited decent work opportunities so that it encourages the action to continue continuously so that they can survive in the era of modernization and globalization which is all complex.

Keyword: *Illegal Logging, Socialization Practices, Habitus, Ketambe People*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang “Habitus Pembalakan Liar pada Masyarakat Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara”. Tujuan studi ini adalah mengetahui dan memahami praktik pembalakan liar, proses sosialisasi habitus pembalakan liar, dan alasan praktik ini tetap dilakukan meskipun diketahui risikonya akan berimplikasi pada bencana alam. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Studi ini menggunakan teori habitus yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik pembalakan liar di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara sistematis oleh para toke kayu yang memiliki modal. Mereka memiliki posisi sosial yang strategis sebagai tokoh masyarakat dan memiliki relasi dengan oknum aparaturnegara. Gratifikasi diberikan kepada oknum aparaturnegara agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sosialisasi habitus pembalakan liar pada masyarakat Ketambe melalui transformasi hasil dari pengalaman empiris dengan cara diperdengarkan, diperlihatkan, dan diajarkan untuk bertindak sehingga agar bisa bertahan hidup maka mereka diajarkan dengan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara untuk bertindak sebagai pembalakan. Motif yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan tindakan pembalakan liar bersifat pragmatis yaitu memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat ditambah dengan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga hal tersebut mendorong tindakan tersebut tetap berlangsung secara terus-menerus.

Kata Kunci: Pembalakan Liar, Praktik Sosialisasi, Habitus, Masyarakat Ketambe

PENDAHULUAN

Sejak masa penjajahan kolonial Belanda pada tahun 1823, masyarakat Ketambe di Kabupaten Aceh Tenggara sudah turun-temurun memanfaatkan hutan dan bercocok tanam padi, jagung, kopi, karet dan komoditi lainnya sebagai sumber dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bilamana memanfaatkan hutan masyarakat mengambil seperlunya atau secukupnya dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana seperti kapak, parang, gergaji tangan, dan alat manual lainnya.

Sejak awal tahun 1980-an, masyarakat di kawasan Ketambe telah dipengaruhi oleh modernisasi yang ditandai dengan penggunaan peralatan yang lebih modern dan efisien untuk mengeksploitasi hutan seperti gergaji mesin dan truk-truk pengangkut muatan kayu dan ditambah dengan masuk dan beroperasinya kilang-kilang pengolahan kayu. Hal ini membuat masyarakat cenderung lebih mudah dan cepat untuk mengeksploitasi hutan dengan skala yang jauh lebih besar. Masyarakat Ketambe pada umumnya menebang kayu gelondongan untuk dijual kepada beberapa pengusaha kilang kayu, sehingga kayu tersebut diolah dan dijual kembali ke luar daerah Aceh Tenggara.

Sejak awal tahun 2000-an sampai saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan telah melarang kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) serta melarang keberadaan kilang-kilang kayu tersebut. Alasannya ialah beroperasinya kegiatan tersebut membuat hutan yang dulunya lebat menjadi gundul dan berdampak pada bencana alam yang kerap terjadi, seperti banjir bandang yang merusak pemukiman, lahan pertanian, dan aktivitas masyarakat setempat.

Sebenarnya masyarakat telah mengetahui bahwa penyebab munculnya bencana alam di daerah Ketambe karena aktivitas eksploitasi hutan seperti *illegal logging* yang mereka lakukan. Namun kegiatan ini masih marak terjadi. Dewasa ini, kayu langsung diolah di dalam hutan atau pembalok tidak lagi menjual kayu gelondongan ke kilang-kilang pengolahan kayu. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut masih tetap sama, yang berbeda hanya cara beroperasinya.

Praktik pembalakan liar menjadi suatu hal yang mengalami pelanggaran atau menjadi kebiasaan masyarakat. Praktik ini disosialisasikan terhadap keluarga secara turun-temurun sebagai profesi atau ladang mencari nafkah. Kebiasaan tersebut tetap dilakukan walaupun mereka mengetahui resiko dan implikasinya pada terjadinya bencana alam di wilayah Ketambe. Kebiasaan masyarakat Ketambe melakukan praktik pembalakan liar tumbuh dari sosialisasi orang tua atau keluarga yang terinternalisasi dalam diri individu yang mengarah pada pola abadi dan ditransfer dari satu individu ke individu lainnya.

Berdasarkan fenomena diatas menarik dikaji mengapa praktik pembalakan liar tetap lestari, meskipun masyarakat mengetahui pembalakan liar itu merupakan pemicu dari terjadinya bencana alam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian. Pertama, tentang praktik pembalakan liar di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Kedua, proses sosialisasi habitus pembalak liar di dalam keluarga masyarakat Ketambe sehingga habitus pembalakan liar tetap bertahan dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, motif yang melatarbelakangi praktik pembalakan liar tetap dilakukan meskipun masyarakat sudah mengetahui resikonya akan berimplikasi pada bencana alam.

Kajian mengenai perilaku masyarakat dalam hal *illegal logging* bukanlah hal baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas tema yang sama diantaranya studi Hasan (2009) dan Narindrani (2018). Namun kedua peneliti tersebut tidak memfokuskan kajian mereka pada sisi pembentukan habitus, melainkan pada sisi upaya penanggulangan dan kajian fiqh *illegal logging*. Demikian halnya dengan studi tentang pembentukan habitus, pernah dilakukan namun dalam konteks dan studi kasus yang berbeda dengan penelitian ini oleh Fithri & Handoyo (2015) serta Aksan (2016).

Teori Habitus

Habitus bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang sifatnya terstruktur serta menentukan dan membimbing cara berpikir dan bertindak seseorang. Eksistensi habitus mengarahkan seseorang untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh struktur objektif (Ritzer & Goodman, 2010). Habitus diperoleh melalui proses belajar dalam jangka panjang yang terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri seseorang (Haryatmoko, 2016). Namun habitus bersifat tidak tetap atau permanen dalam diri seseorang. Habitus dapat berubah melalui pengkondisian tertentu (Takwin, 2006). Dengan demikian, habitus dapat dilihat sebagai hasil dialektika antara struktur objektif dan representasi subjektif (Swartz, 1997). Adapun fenomena yang diangkat dalam studi ini melihat bagaimana sistem-sistem disposisi pembalakan liar tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur terbentuk, kemudian membentuk suatu habitus pembalakan liar pada masyarakat Ketambe. Mengacu pada gagasan Koentjaraningrat (2000) masyarakat Ketambe itu sendiri bisa dilihat sebagai suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya. Masyarakat Ketambe merupakan masyarakat yang majemuk, namun suku yang dominan menempati kawasan tersebut adalah suku Alas dan Gayo.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, dikarenakan kebiasaan masyarakat melakukan kegiatan *illegal logging* secara turun-temurun yang berdampak pada kerusakan hutan dan menimbulkan bencana alam setiap tahun. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini meliputi 3 kategori informan (Hendarsono dalam Suyanto dan Sutinah, 2005: 171-172) diantaranya informan kunci yaitu pelaku *illegal logging* dan penadah kayu, informan utama yaitu tukang tarik kayu, dan informan tambahan yaitu masyarakat Ketambe. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan empat langkah, yakni koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembalakan Liar di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Sumber daya hutan di kawasan Ketambe sangat melimpah, terutama yang berada di hutan lindung. Untuk melindungi kelestarian hutan Indonesia dari tindakan pembalakan liar yang telah merugikan lingkungan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MenhutII/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan yang dikeluarkan berupa sistem verifikasi legalitas kayu (SPLK). Sistem ini merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi *stockholder* guna memastikan sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia menganut beberapa prinsip utama, yaitu memberantas produksi kayu hasil tindakan pembalakan liar, perwujudan *good forest government*, serta menuju permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional. Upaya ini dilakukan guna mengatasi pembalakan liar dan deforestasi pada hutan. Namun realitasnya di lapangan kasus yang seharusnya diproses secara hukum dan diadili, tidak dilakukan secara totalitas. Maka pemerintah perlu pendekatan pendamping, yaitu melalui sertifikasi dan sosialisasi tentang perlunya izin verifikasi dan legalitas kayu sehingga kayu diketahui sumbernya.

Masyarakat di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara yang merambah kawasan hutan lindung sebagian besar belum mengetahui prosedur untuk membuat dan mendapatkan izin

sistem verifikasi legalitas kayu. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah dan masyarakat masih beranggapan bahwa membuat izin itu sulit karena mereka tentunya kekurangan syarat-syarat untuk kelengkapan data yang diperlukan dalam mendapatkan izin merambah hutan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mempekerjakan masyarakat setempat menjadi eksekutor di lapangan. Selain itu, oknum aparaturnegara ikut mengintimidasi serta melakukan tindakan pungli dengan dalih tindakan pembalakan liar adalah suatu tindakan yang melanggar hukum.

Kondisi inilah yang mendorong masyarakat bekerja secara terselubung di lapangan sebagai eksekutor kayu. Mereka mengikuti prosedur tidak resmi dalam melakukan tindakan pembalakan liar, yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemilik modal yang mempunyai relasi yang kuat dengan oknum aparaturnegara. Dengan begitu mereka beranggapan dapat terhindar dari jeratan hukum. Dengan adanya relasi dan kerjasama tersebut, praktik pembalakan liar terjadi secara berkesinambungan sehingga membuat eskalasi deforestasi serta resiko terjadinya krisis lingkungan dan bencana alam meningkat.

Maraknya tindakan terkait perusakan hutan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Pengaturan pemanfaatan hutan sangat penting dalam rangka perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan. Pemerintah berharap masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan tanah di dalam hutan melalui konsensi lahan bagi masyarakat di kawasan Ketambe. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh pemerintah dilakukan dengan mengubah dan mengembangkan kemampuan masyarakat dari profesi sebagai pembalak liar menjadi petani komoditi unggulan seperti karet, kopi, jagung, dan komoditi lainnya sehingga masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Namun pada kenyataannya laju deforestasi di Kecamatan Ketambe semakin meningkat setiap tahunnya karena masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan Ketambe tidak benar-benar secara serius diaplikasikan di lapangan. Selain itu, kebijakan tentang pemanfaatan hutan yang disosialisasikan pemerintah merupakan bentuk formalitas yang bermuatan politis. Hal tersebut mendorong kurangnya kepercayaan masyarakat Ketambe pada pemerintah dalam mengurus izin pengelolaan dan penebangan hutan secara legal. Meskipun memiliki nilai tambah, masyarakat menganggap langkah-langkah pembuatan perizinan cukup sulit dan rumit. Kondisi ini mendorong masyarakat memilih untuk menebang dan menjual kayu secara ilegal.

a. Toke Kayu dan Jaringan

Toke kayu merupakan sebutan untuk para pemilik modal dan mengendalikan beberapa eksekutor untuk kegiatan pembalakan liar. Toke kayu biasanya memiliki pengaruh yang besar dan berpendidikan tinggi di dalam masyarakat Ketambe, seperti salah seorang toke yang bernama “Nih” (nama samaran). Ia merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai perangkat desa serta anak dari seorang mantan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Ketambe sehingga pengaruhnya cukup besar pada masyarakat di wilayah tersebut. Dengan modal dan pengaruh yang besar, toke kayu tersebut memanfaatkan posisinya sebagai tokoh masyarakat untuk memobilisasi dan memfasilitasi masyarakat Ketambe.

Para toke kayu biasanya mempekerjakan pemuda yang telah putus sekolah yang dominan tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak terbatas usia. Selagi masih sanggup dan mampu untuk bekerja maka akan tetap dipekerjakan. Para anggota pembalak yang bekerja pada toke kayu biasanya sebelum melakukan aktivitas pembalakan mendengarkan instruksi dari toke kayu, jenis kayu apa saja yang dibutuhkan untuk diambil dan diproduksi serta keamanan razia dari aparat keamanan hutan sehingga mereka bisa aman dan nyaman bekerja tanpa harus khawatir akan ditangkap aparat keamanan dari pihak kepolisian kehutanan.

Hal tersebut mendorong para eksekutor pembalak liar yang berada di lapangan harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan toke kayu sehingga aktivitas ini bisa saling menguntungkan, karena setiap akan diadakan razia oknum-oknum aparat tersebut telah menginformasikan terlebih dahulu kepada toke kayu sehingga toke kayu tersebut dapat menghentikan sementara aktivitas kegiatan pembalakan. Para toke kayu biasanya memiliki jaringan dengan oknum pemerintahan dan oknum aparat keamanan. Keterlibatan oknum pemerintah dan oknum aparat merupakan sebuah rantai dalam sistem yang terstruktur untuk melancarkan aktivitas pembalakan liar. Diperkuat oleh jaringan dan hubungan yang erat inilah kegiatan ini tetap berlangsung. Untuk mengamankan kegiatan pembalakannya, para toke kayu tersebut biasanya bekerjasama dengan oknum aparatatur negara yang terlibat dalam mengamankan dan menjaga hutan, seperti oknum Dinas Kehutanan, oknum Kepala Desa, oknum Polri, dan oknum TNI dengan memberikan gratifikasi kepada mereka.

Dalam dunia perkayuan atau pembalakan, para toke kayu akan mempertahankan eksistensinya sebagai pemilik modal dan mempertahankan agar eksekutornya tetap mau bekerja kepadanya dengan cara sebelum bekerja mereka sudah diberi fasilitas seperti sepeda motor yang telah dimodifikasi serta alat pemotong kayu dan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan pembalakan, serta sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada para eksekutornya dengan

pembayaran cicil melalui hasil kerja eksekutor tersebut. Hal ini mendorong para eksekutor tetap bekerja pada toke kayu dan menjalankan tindakan sesuai perintah toke kayu tersebut. Melalui metode ini para toke kayu dapat memperhitungkan resiko dan kekuatan persaingan dalam hal produksi dan distribusi serta menjaga kapasitas usahanya agar tetap bertahan dan beroperasi secara kontinu. Kesamaan orientasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan dorongan ekonomi dan doktrinisasi yang melandasi terbentuknya sistem dalam melakukan tindak pembalakan liar. Dengan adanya jaringan toke kayu dengan para oknum aparaturnegara tersebut, memudahkan para toke kayu untuk mendistribusikan kayu tersebut secara terselubung dan sistematis.

b. Pengolahan Kayu

Usaha pengolahan kayu merupakan peluang bisnis yang sangat potensial di Kecamatan Ketambe. Banyak usaha di luar bidang itu yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi. Namun usaha pengolahan kayu menjadi unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat di kawasan Ketambe. Kayu merupakan bahan baku yang banyak dan mudah untuk diperoleh di Kecamatan Ketambe, meskipun kayu tersebut ilegal, Terlebih mesin pengolahan kayu yang ada saat ini sudah sangat modern dan sangat membantu dalam pengolahan perkayuan. Industri perkayuan hingga kini masih menjadi pilihan usaha beberapa orang di kawasan Ketambe. Hal ini berpotensi menambah semaraknya pengolahan kayu sebagai bisnis yang sangat menjanjikan.

Kemudahan dalam hal produksi dikarenakan Kecamatan Ketambe cukup strategis dan mudah dijangkau sehingga mengefektifkan biaya modal. Fasilitas alat dan bahan baku, mesin kerja pengolahan kayu, seperti pemotong kayu, gelondongan, mesin ketam dan penerut kayu, mesin potong kecil, mesin profile, dan perkakas sudah mampu dioperasikan secara baik oleh masyarakat setempat. Demikian pula halnya dengan proses distribusi kayu, tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

Bahan baku yang diperoleh berupa kayu diambil dari kawasan hutan lindung. Prosesnya menggunakan mesin singso sebagai alat untuk menebang dan memotong kayu sesuai ukuran yang diinginkan dan alat lainnya untuk pengangkutan seperti sepeda motor yang telah dimodifikasi baik tenaga dan suaranya agar lebih mudah mengangkut bahan baku dengan cara menyeret kayu tersebut di jalanan, tanjakan, maupun turunan menuju tempat yang diinginkan. Tempat transaksi penjualan berpindah-pindah sesuai siapa pihak yang memesan. Maka dari itu untuk memesan kayu di wilayah Kecamatan Ketambe sangatlah mudah dan dapat disediakan sesuai orderan. Hal tersebut lazim terjadi meskipun negara telah melarang adanya transaksi jual-beli berupa kayu dari kawasan hutan lindung.

Hasilnya didistribusikan ke daerah-daerah kecamatan lain dalam bentuk kayu, tiang, dan papan yang nantinya diolah menjadi bahan kebutuhan panglong. Dari observasi peneliti, pembalak liar di Kecamatan Ketambe mendistribusikan atau memasok kayu ke kecamatan lain pada malam hari dalam jangka waktu satu kali dalam 24 jam. Seperti diutarakan oleh seorang pembalak yang bernama Tumin (47 tahun) dalam wawancara pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Kami ke hutan untuk menebang kayu tidaklah sembarang menebang kayu, kami memulai yang pertama adalah memilih lokasi untuk menebang, sudut kemiringan tanah untuk memudahkan arah tumbangnya kayu dan mudah untuk membawa alat-alat yang kami gunakan seperti gergaji mesin dan minyak. Setelah kami rasa lokasinya cocok meski di bawah jurang namun kami kira-kira sangguplah tenaga manusia untuk memikulnya ke jalan untuk diikatkan ke sepeda motor untuk ditarik ke perkampungan/desa. Setelah kayu sampai ke desa biaya yang langsung terjual namun ada kadang keadaan pembelinya tak ada akan kami stok dulu menunggu pembeli datang ke tempat kami untuk membeli kayu tersebut.” (Tumin, Kecamatan Ketambe, 26/08/2020)

Dari wawancara dengan seorang pembalak kayu di atas, peneliti dapat memahami bahwa praktik kegiatan pembalak liar dilakukan secara sistematis. Tingginya permintaan akan kebutuhan bahan baku kayu membuat kegiatan tersebut berlangsung terus menerus.

Gambar 1. Kayu Hasil Pembalakan Liar



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2020.

Sementara itu, praktik pengangkutan kayu dilakukan pada momen khusus, seperti waktu sholat Maghrib, seperti diutarakan oleh seorang toke kayu yang bernama Suilmar (27 tahun) sebagai berikut :

“Untuk pengangkutan kayu biasanya kami berangkat saat Maghrib karena keadaan tersebut sedang sepi kendaraan sehingga memudahkan kami menghindari aparat di pos penjagaan. Namun ketika kami lewat ditangkap kami sudah ada jaringan dari pihak-pihak tertentu untuk mengeluarkan kayu kami, tapi biasanya ketika ada razia informasi sudah sampai kepada kami sehingga operasi dan kegiatan kami hentikan untuk beberapa saat.” (Suilmar, Kecamatan Ketambe, 13/08/2020)

2. Proses Sosialisasi Habitus Pembalok Liar pada Masyarakat Ketambe

Sosialisasi terjadi melalui interaksi individu dengan individu lainnya, kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok lainnya (Soekanto, 2012). Individu disini belajar sesuatu dari orang-orang yang dekat, seperti keluarga, teman, guru, media, dan orang-orang yang berada di lingkungannya (Astutik, 2017). Ada beberapa tahap dalam proses sosialisasi (Mead dalam Widayanti, 2008) diantaranya tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif.

Proses sosialisasi pembalok liar di lingkungan masyarakat Ketambe melalui beberapa tahap yang berawal dari meniru dimana seorang individu sejak usia anak-anak sudah diajak ke hutan oleh keluarga atau kerabat dekatnya untuk menyaksikan aktivitas pembalokan, meskipun belum turut serta melakukan aktivitas tersebut. Namun anak-anak ini sudah dapat meniru tindakan-tindakan sebagaimana layaknya pembalok. Ketika mereka beranjak pada usia remaja, pada tahap ini mereka telah siap bertindak untuk turut serta dalam melakukan aktivitas pembalokan liar. Mereka telah menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya sebagai seorang pembalok pemula. Kemudian pada tahap menentukan peran, dalam tahap ini mereka sudah dewasa dan dapat menentukan peran di kalangan para pembalok berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya.

Media sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi, melaksanakan, atau melakukan tindakan pembalokan liar. Hal ini memungkinkan masyarakat Ketambe menerima proses sosialisasi tentang bagaimana mencari pekerjaan yang relatif instan dan menghasilkan uang dengan cepat seperti ikut serta menjadi seorang pembalok liar. Ada beberapa agen utama dalam proses sosialisasi terhadap pembalok liar, yaitu:

Pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama yang meliputi orang-orang terdekatnya seperti: ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat, dan keluarga lain yang tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah. Dalam lingkungan keluarga anak mengenal dunia sekitarnya dan aktivitas pembalokan liar yang dilakukan oleh keluarganya sehari-hari. Kedua, teman bermain. Teman bermain dialami seorang anak setelah belajar berinteraksi dengan orang-orang yang sederajat karena mereka seusia atau sebaya. Dalam sosialisasi seorang anak pembalok

liar akan menceritakan tindakan pembalakan atau bahkan menirukan tindakan sebagai pembalak tersebut yang ia saksikan dengan teman sebayanya.

Proses sosialisasi bertujuan untuk mempelajari nilai, norma sosial, membentuk perilaku, dan kepribadian seorang individu di dalam suatu masyarakat dan membentuk pola perilaku individu, menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat, serta menjaga integrasi kelompok di dalam masyarakat. Proses sosialisasi pada pembalak liar tersebut sangat berpengaruh pada mental dan psikis seseorang. Sosialisasi pembalak liar diajarkan untuk menanamkan ide aspirasi atau cita-cita bersama sehingga seorang individu akan bertindak sesuai dengan lingkungan ingknan padanya. Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan yang didominasi oleh para pembalak liar sehingga individu akan terpengaruh menjadi seorang pembalak. Namun melalui proses sosialisasi para pembalak tersebut terbentuk mental dan perilaku sebagai pembalak yang menentukan perannya di kalangan pembalak liar.

a. Proses Internalisasi

Proses internalisasi dimulai dengan seseorang mempelajari suatu norma. Kemudian individu menjalani proses memahami mengapa mereka bernilai atau mengapa mereka masuk akal hingga akhirnya mereka menerima norma sebagai sudut pandang mereka sendiri. Norma yang diinternalisasikan dikatakan bagian dari kepribadian individu dan dapat ditunjukkan sebagai suatu tindakan moral seseorang. Namun, ada juga perbedaan antara komitmen internal terhadap norma dan apa yang ditunjukkan secara eksternal. Satu hal yang dapat mempengaruhi apa yang diinternalisasikan seseorang adalah panutan. Model ini sering digunakan dalam mempercepat suatu proses sosialisasi. Internalisasi membantu seseorang menentukan siapa mereka dan menciptakan identitas dan nilai mereka sendiri dalam masyarakat yang telah menciptakan seperangkat norma, nilai, dan suatu praktik di dalam masyarakat. Proses internalisasi penanaman perilaku, sikap, dan nilai pada seorang pembalak liar yang diperolehnya melalui pembinaan, belajar, dan bimbingan. Harapannya apa yang didapatkannya dan dilakukannya sesuai dengan keinginan dan harapan di kalangan pembalak liar. Internalisasi pada seorang pembalak liar dilakukan berkali-kali dengan cara meniru tindakan seorang mentor dalam hal pembalakan. Alhasil menjadi suatu pola yang normal yang mengatur tindakannya, dibudayakan, maka dari situlah terjadi internalisasi praktik pembalakan. Berikut tahapan dari proses internalisasi pada pelaku pembalak liar pada masyarakat Ketambe.

Pertama, tahap transfer nilai. Pada tahap ini terjadi komunikasi secara verbal, transfer ini sifatnya hanya pemindahan suatu pengetahuan dari pendidik ke peserta didiknya. Nilai-nilai yang

diberikan masih berada pada ranah kognitif. Pada tahap ini pembalak liar menerima masukan melalui saran-saran komunikasi yang disampaikan oleh para keluarga atau kerabat pembalak liar agar para pembalak liar mengetahui nilai-nilai yang pro dan kontra pada tindakan-tindakan aktivitas pembalakan. Pada tahapan ini juga disebut seorang pembalak mulai memahami dan menumbuhkan sikap mengenai makna atau arahan dari keluarga atau pembalak yang lebih berpengalaman sehingga mengurangi tingkat resiko atau kesalahan yang fatal pada aktivitas pembalakan liar. Kedua, tahap transaksi nilai. Pada tahap ini proses yang dilakukan oleh pembalak dengan cara komunikasi timbal balik sehingga memungkinkan informasi nilai yang didapat para pelaku pembalak liar dapat dipahami oleh rekan kerja sehingga mereka dapat merespon nilai yang sama. Ketiga, tahap tran-internalisasi. Tahap ini dilakukan dengan sikap, mental, dan kepribadian para pembalak. Jadi pada tahap ini pembalak berperan secara aktif dalam mengajarkan nilai-nilai dan membangun karakter pada pembalak lainnya yaitu seperti pengetahuan tentang moral ketika berada di kawasan praktik pembalakan seperti tidak boleh sombong (takabur) di dalam hutan dengan perasaan yang selalu waspada ketika melakukan aktivitas pembalakan.

b. Proses Inkulturasi

Proses inkulturasi merupakan suatu proses yang mempelajari suatu nilai dan norma kebudayaan. Seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya serta sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup di dalam kebudayaannya. Proses pembudayaan merupakan panduan dari kompleks pengetahuan, nilai-nilai, gagasan-gagasan pokok dan baku, serta keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang isinya merupakan seperangkat model pengetahuan atau sistem makna yang terjalin secara komprehensif dalam simbol-simbol yang ditransmisi secara historis. Pengetahuan ini juga digunakan sebagai cara selektif oleh warga masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi, melestarikan dan menghubungkan pengetahuan dan sikap serta cara bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses sosialisasi enkulturasi pada para pembalak liar di dalam masyarakat Ketambe melalui suatu kebiasaan tindakan pembalakan dengan terus-menerus ditanamkan dari generasi ke generasi sehingga lambat laun akan menjadi kebiasaan yang melekat dan membudaya pada keluarga atau kerabat para pembalak liar tersebut.

Berdasarkan uraian proses sosialisasi di atas maka peneliti menganalisis bahwa sosialisasi merupakan sesuatu kesadaran mental yang dihasilkan melalui hasil transfer pengalaman empiris sehingga melalui transfer pengalaman tersebut maka akan menghasilkan suatu tindakan-tindakan tertentu. Sosialisasi pembalak liar di kawasan Ketambe berawal dari diperdengarkan, yaitu transfer

melalui memberi pemahaman pada calon pembalak liar. Mereka diberikan cara tentang bagaimana proses untuk membalak yang benar. Berikutnya diperlihatkan, yaitu proses transformasi yang langsung disaksikan tentang cara melakukan pembalakan yang benar. Terakhir diajarkan serta disuruh untuk melakukan tindakan, yaitu ajaran tersebut adalah proses akhir untuk melihat bagaimana hasil yang baik dan sekaligus menjadi suatu tindakan kesadaran mental.

Berdasarkan wawancara dengan salah senebang penebang kayu (penabah kayu) yang bernama Kamal (54 tahun), sosialisasi habitus di Kecamatan Ketambe mulai diajarkan di dalam lingkungan keluarga, sebagaimana keterangan berikut:

“Awalnya aku, urusan kayu adalah pekerjaan sampinganku... dengan orang tua dahulu kami urusan kayu hampir semua teman sebayaku diajarkan urusan kayu... sejak kami anak-anak sudah diajak ke hutan urusan kayu. Dahulu urusan kayu bukan untuk dijual melainkan untuk keperluan rumah kami dan fasilitas desa kami... kalau untuk kebutuhan ekonomi pangan, kami bercocok tanam dengan padi dan memelihara beberapa ternak. Namun untuk sekarang kami mulai tergantung urusan kayu karena lebih mudah menurutku urusan kayu yang diajarkan oleh orang tua kami dahulu... untuk mencari nafkah rumah tangga kami”. (Kamal, Kecamatan Ketambe, 10/08/2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat memahami bahwasanya proses sosialisasi habitus di kalangan keluarga pembalak liar sudah diajarkan sejak mereka kecil dan praktik pembalakan liar dimotori motif instan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun pada awalnya proses pemanfaatan kayu yang diajarkan oleh orang tua di lingkungan tersebut bukan untuk barang komoditi melainkan untuk kebutuhan mereka seperti rumah, jembatan, balai desa, dan lain sebagainya. Dengan adanya proses sosialisasi habitus sebagai pembalak liar, masyarakat Ketambe terperangkap di dalam dunia hitam pembalakan liar yang berlanjut ke generasi berikutnya.

Gambar 2. Proses Pengorderan Kayu secara Langsung di Hutan



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020.

Penebangan pohon dan pengangkutan secara liar oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Ketambe dilakukan untuk memenuhi permintaan pasokan bahan baku kayu dalam rangka memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan proyek kontraktor. Masyarakat menilai usaha di bidang perkayuan bersifat instan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, yaitu dapat memberikan penghasilan secara langsung dan lebih besar dalam waktu yang singkat dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Seperti diutarakan seorang pengangkut kayu yang bernama Ramzani (25 tahun):

“Kegiatan pengangkutan kayu diajarkan kepada kami semenjak kami masih remaja, karena kebanyakan daripada kami putus sekolah karena faktor lokasi nan jauh dan kurangnya tenaga pengajar, dan faktor ekonomi. Hal tersebut menyebabkan kami belajar mengikuti kegiatan orang tua untuk menjadikan kami berurusan dengan perkayuan. Awalnya orang tua kami kebanyakan tukang menebang kayu dan kami belajar berawal dari tukang kuli angkat kayu dari dalam hutan ke tepi jalan sehingga memudahkan untuk pengangkutan ke tempat penampungan kayu tersebut sehingga dapat diperjual belikan atau diolah menjadi kebutuhan panglong”. (Ramzani, Kecamatan Ketambe, 10/08/2020)

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa kegiatan pengangkutan kayu diajarkan dan disosiolisasikan oleh kerabat terdekat semenjak individu memasuki usia remaja dan ditambah kondisi putus sekolah sehingga individu tersebut lebih mudah untuk diajak menjadi seorang pembalak liar di hutan wilayah Ketambe. Kemudian proses sosialisasi habitus berjalan sesuai dengan kebiasaan. Legalisasi tindakan secara mental dan psikis membangun pemahaman dalam masyarakat Ketambe bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang lazim dilakukan dalam lingkungannya meskipun masyarakat tersebut mengetahui dampak dari kegiatan tersebut terhadap kerusakan alam dan krisis sumber daya air pada musim kemarau. Seperti yang diutarakan oleh toke kayu yang bernama ‘Nih’ (nama samaran) (34 tahun) berikut ini:

“Saat ini proses untuk urusan kayu lebih mudah dan lebih menjanjikan ketimbang kerjaan lainnya sehingga masyarakat lebih tertarik walaupun pekerjaan tersebut penuh dengan resiko kematian dan kecelakaan kerja... meskipun pekerjaan tersebut masyarakat mengetahui akibatnya berdampak pada banjir bandang”. (Nih, Kecamatan Ketambe, 11/08/2020)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan seorang toke kayu yang bernama Gunawan dapat dipahami bahwa kegiatan pembalakan liar dilatarbelakangi oleh sulitnya mencari pekerjaan yang layak ditambah keinginan masyarakat mendapatkan sumber daya secara instan menjadikan kegiatan pembalakan liar menjadi pilihan yang sangat rasional. Proses sosialisasi pekerjaan ini sangat mudah karena kebanyakan pemuda memiliki ketertarikan karena secara ekonomi usaha ini sangat menggiurkan meskipun mereka sudah mengetahui dampak dan resiko pekerjaan tersebut

sangatlah tinggi. Berikut ini adalah gambar proses penarikan kayu (ojek kayu) yang berada di wilayah Ketambe:

Gambar 3. Proses Pengejek Kayu



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020.

Dalam rangka memudahkan proses sosialisasi habitus dalam keluarga pembalok, para orang tua dan kerabat mulai melibatkan seorang dari masa remaja terkhusus pada mereka yang sudah putus sekolah. Praktik pembalokan liar dapat terinternalisasi dan terinkulturasi dengan baik bukan hanya karena diajarkan oleh keluarga dan masyarakat, namun juga oleh keadaan. Seperti diutarakan oleh seorang pengejek kayu yang bernama Ilham Dayu (27 tahun) dalam petikan wawancara berikut:

“Pengejek kayu bukan lah pekerjaan pilihanku, namun keadaan memaksaku untuk menjadi seorang pengejek kayu. Dulu aku bekerja sebagai petani di sawah... menanam padi, kacang-kacangan. Setelah lahan pertanianku dibawa oleh arus sungai (abrasi) sehingga hanyut, lahan kami tak bisa terpakai lagi. Menurutku urusan kayu sulit untuk dicegah karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan hidup sehingga kebanyakan masyarakat mengizinkan dan mendukung kegiatan tersebut dikarenakan setelah orang bekerja sebagai pembalok pencurian berkurang di wilayah kecamatan Ketambe”. (Ilham Dayu, Kecamatan Ketambe, 08/08/2020)

Keterangan di atas cukup menarik untuk disimak karena ternyata keberadaan aktivitas pembalokan liar dianggap fungsional oleh masyarakat setempat dalam mengurangi tingkat pencurian di wilayah Ketambe.

Gambar 4. Abrasi Sungai Sawah Yang Telah Menjadi Aliran Sungai



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2020

Proses sosialisasi habitus pada pembalak dipengaruhi oleh suatu sistem yang telah dibangun oleh cara pandang pragmatisme. Masyarakat akan dijanjikan sesuatu yang bersifat materi yang dulunya tidak mereka butuhkan. Namun pada saat ini mereka memiliki ketergantungan sumber daya meskipun proses tersebut banyak merugikan lingkungan alam, khususnya hutan. Demonstrasi kepemilikan materi dilakukan oleh beberapa remaja pembalak liar dengan cara memamerkan benda-benda seperti handphone bermerek dan sepeda motor hasil dari kerja sebagai pembalak liar yang akan membuat para remaja lainnya tertarik dan ingin mengikuti profesi tersebut meski tanpa paksaan.

c. Proses Sosialisasi Habitus Turun-Temurun Pembalak Liar

Dalam hal ini, proses sosialisasi habitus secara turun-temurun di kalangan pembalak liar merupakan kegiatan dari masa lalu. Kemudian habitus tersebut menjadi tradisi yang sudah ada sampai saat ini. Sosialisasi dari generasi ke generasi melibatkan pihak-pihak yang menjalankan aktivitas pembalakan liar. Tradisi turun-temurun dengan membagi peran atau pemberian hak dan kewajiban untuk menjalankan sesuatu akan menciptakan keberlangsungan sebuah pekerjaan dalam artian di sini sebuah produksi kayu meskipun dengan cara tidak sah secara hukum negara. Tindakan pembalakan liar telah disosialisasikan secara turun-temurun sehingga masih bertahan hingga kini

dilihat dari awal tahun 1980-an berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Namun sekarang sudah banyak mengalami pertukaran orang (aktor) yang menjalankan kegiatan tersebut.

Menurut wawancara dengan seorang mantan pembalak liar yang sudah pensiun yang bernama Pak Saharuddin (67 tahun):

“Kegiatan menebang kayu ini sudah turun-temurun diajarkan meski pada awalnya tidak untuk diperjual-belikan, karena sejak kami anak-anak sudah dibawa oleh orang tua kami ke hutan, sehingga di hutan kami diajarkan bagaimana cara untuk menebang kayu yang benar, nama-nama kayu yang bisa dipakai untuk tahan lama, untuk mengetahui kemana arah tumbangannya melalui sudut kemiringan kayu tersebut. Dimana kami melihat lokasi untuk memudahkan kami untuk mengolahnya menjadi kebutuhan yang kami perlukan, sehingga saya juga mengajarkan apa yang pernah diajarkan oleh orang tua ke anak-anakku. Namun bedanya orang tua kami mengajarkan cara menebang kayu... dulu kami diajarkan menggunakan kapak... namun sekarang kami pakai gergaji mesin. Namun cara penebangan dan pemilihan pohonnya masih sama dengan dulu.” (Saharuddin, Kecamatan Ketambe, 10/08/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sekarang profesi informan sudah digantikan oleh anaknya. Menurut informan proses sosialisasi masih tetap dilakukan hingga saat ini. Hal tersebut diajarkan dengan mengajak anak-anaknya ke hutan untuk menyaksikan bagaimana proses menebang kayu, memilih kayu yang dapat bertahan lama dan bagaimana tata cara untuk menebang kayu yang baik sehingga dapat diolah dengan mudah. Proses sosialisasi habitus pembalak dilakukan secara turun-temurun dengan alat yang digunakan mengikuti proses perkembangan zaman sehingga proses pembalakan tersebut menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Namun mekanisme dalam pemilihan kayu dan penebangannya masih sama dengan yang diajarkan oleh keluarga atau kerabat terdekat pembalak tersebut. Dari hasil observasi peneliti menganalisis bahwa proses sosialisasi pembalak liar tersebut yang telah banyak dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Hal ini sangat efektif dalam membantu memudahkan pekerjaan mereka.

Lingkungan sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap individu sebab dalam kehidupan sehari-hari individu lebih banyak bergaul di tempat ia tinggal. Lingkungan membentuk kepribadian dan habitus sebagai pembalak karena di dalam pergaulan sehari-hari seorang individu akan menyesuaikan dengan kebiasaan lingkungannya. Apabila seorang individu bertempat tinggal di suatu lingkungan yang temannya banyak para pelaku pembalak, kemungkinan besar hal tersebut akan mempengaruhinya. Pendidikan di dalam masyarakat adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga dan sekolah, dan merupakan suatu pengharusan akan kehadirannya untuk menentukan peran, terutama dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus secara praktis, yang secara langsung berpengaruh bagi karakternya di dalam masyarakat.

Salah satu dampak dari sosialisasi yang sangat berpengaruh yaitu habitus. Kebiasaan pembalakan liar terbentuk melalui proses konstruksi oleh lingkungan di sekitarnya sehingga menjadi suatu kesadaran mental. Hal tersebut secara langsung terinternalisasi pada diri mereka dan menjadi hal biasa di lingkungan tersebut ditambah dengan dukungan lingkungan dalam memudahkan generasi berikutnya untuk membentuk habitus pembalak baru di masyarakat Ketambe.

3. Motivasi Melakukan Pembalakan Liar

a. Pandangan Ideologis Memenuhi Kebutuhan Hidup

Masyarakat Ketambe yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar dilandasi oleh pandangan pragmatisme tentang bagaimana memperoleh suatu keuntungan ekonomi dalam waktu yang cukup singkat. Pandangan tersebut sangat dipengaruhi oleh desakan kebutuhan hidup sehingga menjadi pembalak liar dianggap sebagai pilihan yang rasional. Dengan cara pandang demikian akan menjadi tindakan yang berpolarisasi kepada suatu kebiasaan yang disosialisasikan melalui pendengaran, penglihatan, dan tindakan.

Para pelaku yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar berusaha untuk mempresentasikan identitas kelompok dan membuat area dalam tempat singgahnya, seperti di warung kopi dekat dengan lokasi pembalakan liar, sehingga aktivitas berkumpul para pembalak liar dapat dilakukan dalam suasana akrab, santai, dan kekeluargaan. Keberadaan identitas kelompok pembalak liar pada area warung kopi tersebut dalam rangka memupuk kebersamaan yang didasari oleh adanya ideologi pragmatisme yang didesain oleh para actor pembalak di wilayah tersebut. Dengan demikian, identitas kelompok pembalak direpresentasikan melalui pragmatisme yang dijadikan pendekatan atau konsep citra dalam bentuk desain.

Meskipun aktivitas pembalakan liar dianggap menyimpang dalam kebanyakan masyarakat karena berdampak negatif terhadap alam, namun hal itu tidak menyurutkan aktivitas pembalakan liar di Kecamatan Ketambe karena mereka telah didoktrin semenjak usia muda bahwa menjadi seorang pembalak adalah pekerjaan yang menjanjikan, bersifat instan, dan tak perlu waktu lama untuk menghasilkan uang atau materi. Hal tersebut didorong oleh kondisi era globalisasi yang serba praktis, yang mendorong mereka untuk bekerja sebagai pembalak liar. Meskipun menjadi pelaku pembalak liar bukan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun pekerjaan sebagai pembalak liar menjadi sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat, terutama pemuda di wilayah Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Motivasi dan Tindakan Sosial

Motivasi merupakan keinginan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar dengan tujuan tertentu sehingga mengakibatkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Apabila dikaitkan dengan pembalakan liar, maka motivasi pembalak liar adalah dorongan dari cara pandang pragmatis tentang memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu yang cukup sehingga berkeinginan memiliki barang-barang tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas pembalakan. Keinginan tersebut sangat menentukan suatu hasil yang dicapainya. Bahkan ada yang menjadi iri terhadap prestasi yang diraih oleh tetangga atau temannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam kegiatan pembalakan untuk meraih hasil yang lebih baik daripada mereka.

Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah modernisasi dan globalisasi (Rosana, 2011; Sztompka, 2014) sehingga mereka terpengaruh gaya hidup yang mahal dan ingin memiliki barang-barang mewah seperti yang dimiliki oleh orang lain yang disaksikannya melalui media. Hal itu menuntun mereka agar bekerja sebagai pembalak liar yang lebih rajin dan giat sehingga hasilnya dapat memenuhi berbagai macam keinginan tersebut. Jadi tindakan pembalakan liar didasari oleh motivasi para pembalak yang mendorong mereka untuk bertindak sehingga melahirkan suatu tindakan sosial.

Tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mendapatkan tujuan tertentu sehingga tindakan tersebut mengenai jenis perilaku manusia, yang ditujukan kepada perilaku orang lain. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya, baik terbuka maupun tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya (Muhlis & Norkholis, 2016). Seperti tindakan praktik pembalakan liar bukanlah perilaku yang kebetulan, tetapi memiliki pola, struktur, dan makna tertentu sehingga dilakukan secara terus-menerus.

Sosialisasi habitus berfokus pada praktik yang terlihat pada hasil dari hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Habitus merupakan struktur-struktur mental atau kongnitif “melalui mana orang berurusan dengan dunia sosial. Seseorang dikaruniai serangkaian skema yang diinternalisasikan. Melalui itu mereka bisa merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial secara dialektis.

Habitus pembalakan liar yang terjadi di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara merupakan produk sosialisasi yang diinternalisasikan melalui struktur-struktur sosial di Kecamatan

Ketambe. Habitus bervariasi tergantung pada hakikat posisi seseorang di lingkungan tersebut, atau tidak setiap orang mempunyai habitus yang sama. Habitus yang tertanam pada individu tertentu diperoleh secara historis dalam kehidupan di lingkungannya.

Bourdieu menggambarkan habitus sebagai dialektika struktur kognitif yang didalamnya berisi nilai-nilai sosial budaya yang memberi arahan untuk bertindak bagi aktor didalam suatu ranah. Seperti pada masyarakat Ketambe, dengan meyakini tindakan pembalakan liar bernilai ekonomi dan efektif untuk mensejahterakan masyarakat mengarahkan mereka untuk bertindak sebagai pembalak liar. Praktik habitus diciptakan dari pengalaman empiris sehingga membentuk karakter pada masyarakat. Di sisi lain lingkungan sosial yang diciptakan sebagai hasil praktik suatu tindakan seperti tindakan pembalak liar membentuk habitus yang akan menjadi polarisasi tindakan. Sebaliknya habitus membantu mempersatukan maupun membangkitkan praktik tindakan pembalak liar. Habitus juga merupakan struktur yang diinternalisasikan yang membatasi pemikiran dan pemilihan tindakan.

Tindakan sosial tersebut sangat berpengaruh pada individu di lingkungan pembalak liar dan akan bersifat membatin atau bersifat subjektif yang berpengaruh pada situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif di dalam suatu masyarakat tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, tindakan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan tradisional (Muhlis & Norkholis, 2016). Tindakan tersebut dilakukan seseorang atas dasar pertimbangan dan pilihan yang sadar dengan tujuan tindakan ketersediaan alat untuk mencapainya dan mesti diajarkan secara turun-temurun.

c. Lapangan Pekerjaan Terbatas

Lapangan pekerjaan yang tersedia di kawasan Ketambe saat ini masih terbatas sehingga belum bisa menandingi jumlah pertumbuhan angkatan kerja di Kecamatan Ketambe. Pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah menjadi salah satu pemicu yang mendorong masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena untuk mendapatkan pekerjaan yang layak harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang bagus, sehingga permintaan dan penawaran (pasar) tenaga kerja di daerah Ketambe tidak seimbang.

Lapangan pekerjaan yang layak sangat terbatas sehingga tidak mampu menyerap para pekerja yang produktif yang setiap tahun jumlahnya terus bertambah di Kecamatan Ketambe. Tingginya tingkat pengangguran menimbulkan berbagai masalah mulai dari aspek ekonomi hingga aspek sosial seperti kemiskinan. Peluang pekerjaan di wilayah Ketambe berbeda dengan di wilayah

kota, apalagi kawasan Ketambe terletak di lereng gunung dan jauh dari kawasan industri. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran belum maksimal. Selama ini hanya dilakukan pelatihan UKM untuk angkatan kerja dan penyuluhan kepada petani. Lapangan pekerjaan yang terbatas tersebut disertai kemajuan modernisasi dan globalisasi sehingga pada angkatan kerja tersebut muncul pandangan pragmatis dengan bekerja untuk memperoleh hasil secara cepat atau instan.

Dengan cara pandang tersebut maka pekerjaan yang sesuai untuk mereka menjadi sangat terbatas. Sementara menjadi seorang petani sudah dianggap pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka karena memerlukan proses yang panjang. Alhasil beberapa dari mereka mencari lapangan pekerjaan yang sesuai, ada yang akhirnya memilih bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), tetapi kebanyakan dari masyarakat Ketambe tersebut memilih bekerja sebagai pembalak liar.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganalisis bahwa banyak dari kehidupan manusia baik secara sosial maupun ekonomi melakukan suatu tindakan berdasarkan motif. Motif yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan tindakan pembalakan liar adalah cara pandang pragmatisme tentang memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu yang singkat ditambah dengan motivasi lingkungan yang ada pada masyarakat Ketambe.

Meskipun pekerjaan terbatas bagi kebanyakan masyarakat Ketambe sehingga memilih bekerja sebagai pembalak liar, namun ada sebagian masyarakat yang memilih tidak terlibat dalam aktivitas pembalakan liar. Mereka berprofesi sebagai petani komoditi seperti padi, jagung, kopi, karet, sere wangi, nilam dan sebagainya. Mereka sadar akan pentingnya keberlangsungan hutan karena penebangan hutan semakin luas akan mengganggu habitat satwa seperti babi, monyet, beruang, dan harimau yang akan menjadi hama bagi produksi pertanian mereka serta mereka penuh dengan rasa waspada akan keselamatan dari hewan buas ditambah lagi dengan bencana banjir yang akan merusak lahan pertanian mereka. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam pembalakan liar untuk menanam kembali berbagai jenis pohon walaupun dalam jumlah kecil.

Meskipun sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam pembalakan liar sadar akan pentingnya keberlangsungan hutan, namun mereka enggan untuk mencegah para pelaku pembalakan liar karena mereka merasa tidak ada wewenang dan takut dinilai mengganggu pekerjaan orang yang akan berakibat dikucilkan dalam prosesi adat. Contoh seperti seorang yang sadar akan pentingnya keberlangsungan hutan sehingga mencegah para pembalak liar untuk berhenti maka masyarakat sekitar tempat tinggalnya tidak akan mau mengikuti prosesi adat baik

berupa perkawinan, khitanan, maupun prosesi adat kematian. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang sadar akan pentingnya keberlangsungan hutan. Alhasil mereka hanya memilih fokus melakukan pekerjaan dan menanam kembali berbagai jenis pohon meskipun mereka harus bungkam melihat tindakan pembalakan liar di wilayah Ketambe.

KESIMPULAN

Praktik pembalakan liar di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara sistematis oleh para toke kayu yang memiliki modal dan posisi yang strategis sebagai tokoh masyarakat. Memiliki relasi dengan oknum aparaturnegara dengan memberikan gratifikasi menjaga keberlangsungan usaha dalam bidang penjarahan hutan. Para toke tersebut memanfaatkan posisinya sebagai tokoh masyarakat dengan memberi kepercayaan pada eksekutor pembalak dilengkapi dengan fasilitas dan sejumlah uang pinjaman kepada eksekutor tersebut. Melalui metode itu bisnis haramnya tetap bertahan.

Sosialisasi habitus pembalak liar pada masyarakat Ketambe melalui transformasi hasil dari pengalaman empiris dengan cara diperdengarkan, diperlihatkan, dan diajarkan untuk bertindak sehingga muncul pemahaman agar bisa bertahan hidup maka mereka harus merambah kayu. Mereka kemudian diperlihatkan secara langsung bagaimana proses untuk menjadi pembalak serta diajarkan untuk terlibat secara langsung atau bertindak. Tindakan yang disosialisasikan tersebut menjadi suatu kesadaran mental sehingga terpolarisasi serta menjadi kebiasaan untuk bertindak sebagai pembalak liar sebagai hasil dari transformasi habitus.

Motif yang mendorong masyarakat Ketambe untuk tetap melakukan tindakan pembalakan liar dipengaruhi oleh cara pandang pragmatisme, yaitu tentang memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat. Hal ini diperkuat oleh norma di lingkungan pembalak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, dan minimnya lapangan pekerjaan sehingga membuat praktik pembalakan liar menjadi pilihan profesi bagi masyarakat Ketambe.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, S. P. H. (2016). Pembentukan Habitus Baru Mahasiswa Perantauan Sumbawa di Surabaya (Studi tentang Bentuk Adaptasi dan Bentuk Habitus Baru Mahasiswa Sumbawa di Surabaya). *Jurnal Paradigma*, 4(1), 1-8.
- Astutik, D. (2017). Telaah Kritis Gagasan Sosialisasi Mead: Self, Mind, Society. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 1(1), 61-79.

- Fithri, E. & Handoyo, P. (2015). Habitus Dugem Kelompok Youngstar sebagai Ritus Modernitas di Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 3(1).
- Hasan, S. (2009). Menakar Illegal Logging: Fiqih Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 60-78.
- Haryatmoko (2016). *Membongkar Rezim Kepastian*. Kanisius.
- Koentjaraningrat (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Muhlis, A. & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 242-258.
- Narindrani, F. (2018). Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 18(2), 241-256.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MenhutII/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono (2018). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, B. & Sutinah (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Takwin, B. (2006). *Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Jalasutra.
- Swartz, D. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. The University of Chicago Press.
- Sztompka, P. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Widayanti, K. (2008). Sosialisasi Keberagaman Pada Anak (Studi tentang Peran Orang Tua dalam Pengenalan Agama kepada Anak di Desa Denhkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Kelatena). *Skripsi*. Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGURANGI PERILAKU MENYIMPANG SISWA DI SMA NEGERI 2 LHOKSEUMAWE

A. Marliah, M. Nazaruddin ¹⁾, M. Akmal

¹ Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, muh.nazaruddin@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on two discussions. First, to describe the application of character education at SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Second, to describe the obstacles in the application of character education so that it is not effective in overcoming student deviant behavior. By using a qualitative approach, this study comes to an understanding that the implementation of character education in SMA Negeri 2 Lhokseumawe is carried out through several strategies, including: a). providing outreach to teachers; b). preparation of syllabus and lesson plans based on character education; c). integrating and applying values in the teaching and learning process in the classroom; d) creating a school culture; e) habituation; and f) teacher exemplary. The implementation of character education in order to reduce students' deviant behavior has not been optimal because it faces a number of obstacles, such as a) minimal family contribution; b) inconsistency of values and norms at school and outside school; and c) teachers' difficulties in adapting to curriculum changes. In addition, the definition of deviant behavior and social dysfunction has so far only relied on "blaming deviant individual behavior", but ignores problems at the school structure level that can lead students to deviant behavior and anomie states.

Keywords: Character Education, School, Conformity, Deviant Behavior, Anomie

ABSTRAK

Studi ini berfokus pada dua hal. Pertama melihat penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Kedua, menggambarkan hambatan dalam penerapan pendidikan karakter sehingga tidak efektif dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini sampai pada pemahaman bahwa penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya: a). pemberian sosialisasi kepada guru; b). penyusunan Silabus dan RPP yang berbasis pendidikan karakter; c). pengintegrasian dan penerapan nilai-nilai dalam proses belajar mengajar di kelas; d) penciptaan budaya sekolah; e) pembiasaan; dan f) keteladanan guru. Penerapan pendidikan karakter dalam rangka mengurangi perilaku menyimpang siswa belum berjalan optimal karena menghadapi sejumlah kendala, seperti a) minimnya kontribusi keluarga; b) inkonsistensi nilai dan norma di sekolah dan di luar sekolah; dan c) kesulitan guru beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Selain itu, pendefinisian perilaku menyimpang dan disfungsi sosial selama ini hanya bertumpu pada "menyalahkan perilaku individu yang menyimpang", tetapi mengabaikan masalah pada level struktur sekolah yang dapat mendorong siswa ke arah perilaku menyimpang dan keadaan anomie.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Sekolah, Konformitas, Perilaku Menyimpang, Anomie

PENDAHULUAN

Fenomena dekadensi moral di Aceh menjadi sorotan tajam selama satu dekade ini. Berbagai media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan tentang persoalan kenakalan remaja yang sangat meresahkan masyarakat. Pada lingkup Kota Lhokseumawe saja, tanggal 15 Februari 2013 silam koran Serambi Indonesia merilis data survey Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dimana 70 persen pelajar di Kota Lhokseumawe terlibat pergaulan bebas sehingga menduduki klasemen pertama di Aceh dimana perilaku seks pra-nikah dan praktik mesum dilakukan oleh pelajar di wilayah ini (www.aceh.tribunnews.com). Baru sekitar tiga tahun berlalu, masyarakat kembali dibuat resah ketika terkuak fenomena LGBT (lesbian, gay, biseksual, transeksual) yang mulai marak di Kota Lhokseumawe. Pelakunya kebanyakan kaum remaja yang biasa mangkal di tempat rekreasi Jl. Lingkar Waduk Lhokseumawe (www.harianrakyataceh.com). Pergaulan bebas ternyata berjalan beriringan dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS di Tanah Pase dimana pada tahun 2019 sudah mencapai 82 kasus (www.aceh.tribunnews.com).

Berbagai kasus kenakalan remaja yang lain juga tidak kalah mengkhawatirkan seperti tawuran antara pemuda dan warga di Terminal Labi-Labi Desa Keude Aceh yang dipicu oleh suara petasan yang terjadi pada tahun 2016 (www.aceh.tribunnews.com), penangkapan 4 remaja yang terlibat dalam peredaran sabu-sabu pada tahun 2017 (www.kanalaceh.com), pembubaran ratusan remaja yang terlibat balap liar di sepanjang Jl. Len Pipa pada tahun 2020 (www.acehportal.com), dan berbagai kasus lainnya. Ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus yang sudah disebutkan ini hanyalah sebagian kecil yang mencuat ke permukaan.

Maraknya fenomena dekadensi moral disinyalir karena pengaruh globalisasi yang mengintrodusir budaya dari luar. Pelajar yang masih dalam masa usia transisi adalah sasaran rentan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemanfaatannya yang salah membuat moral para pelajar mengalami kemerosotan dengan sinyal pengabaian terhadap nilai-nilai dan norma yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Aceh. Sejalan dengan itu, gaya hidup para remaja saat ini mulai meniru budaya luar yang ditandai dengan perubahan pada mode rambut, cara berpakaian, cara berbicara, dan budaya-budaya lain yang tidak sesuai dengan identitas masyarakat Aceh.

Mengantisipasi fenomena perilaku menyimpang tersebut, pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah melakukan berbagai upaya mulai dari penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan dan moral masyarakat hingga penertiban atau penegakan hukum. Dalam ruang lingkup wilayah Aceh, pelaksanaan Syariat Islam tidak mengendur sejak diberlakukan mulai tahun 2006. Namun upaya ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebagai kebijakan

alternatif dalam mengurangi perilaku menyimpang pemerintah kemudian mencoba melakukan upaya lain yang lebih menitikberatkan sisi preventif, yaitu integrasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang wajib diterapkan dalam setiap pembelajaran dan mata pelajaran. Kementerian Pendidikan Nasional (2011) mendukung ini dimana penilaian siswa yang tadinya hanya dilakukan pada aspek kognitif, kini juga harus mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang akhirnya dapat membentuk perilaku siswa yang berakhlak mulia yang sejalan dengan substansi Undang-Undang Sisdiknas. Dalam hal ini, fungsi sekolah tidak hanya sebagai “pabrik” yang menghasilkan lulusan yang cakap pengetahuan dan keterampilannya di tengah masyarakat, tetapi juga menghasilkan lulusan yang mampu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia.

Kurikulum pendidikan karakter sudah diimplementasikan selama beberapa tahun di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Namun terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dalam ruang lingkup sekolah saja masih ditemukan siswa-siswa yang menyimpang seperti terlambat datang ke sekolah, membolos di saat jam pelajaran berlangsung, merokok di dalam toilet, mengeluarkan kata-kata kasar dalam berbicara, berselisih dengan teman, membuang sampah sembarangan, tidak mengucapkan salam jika bertemu sesama, menyontek saat ujian, dan berbagai pelanggaran tata tertib sekolah lainnya. Bahkan dalam laporan guru Bimbingan dan Konseling, beberapa siswa terlibat dalam kasus kenakalan di luar sekolah seperti balapan liar, vandalisme (pengrusakan fasilitas umum), Sementara dari laporan sebagian besar guru, perilaku menyontek paling sering dilakukan siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe yang dikhawatirkan oleh guru akan menghasilkan “siswa yang pintar tapi tidak benar”. Sebagaimana telah umum diketahui, fenomena ini disinyalir sebagai salah satu masalah klasik bangsa Indonesia yang menyebabkan sulitnya bangsa kita maju. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan penulis merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Lhokseumawe? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter dalam rangka mengatasi perilaku menyimpang siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe?

Selama ini, kajian tentang pendidikan karakter lebih sering difokuskan pada lingkup studi ilmu pendidikan terapan. Hal ini karena, sepertinya, jumlah mahasiswa yang kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Indonesia relatif lebih banyak daripada mahasiswa yang kuliah di Program Studi Sosiologi. Dengan kelebihan tersebut, studi tentang tema pendidikan karakter lebih didominasi oleh para sarjana pendidikan. Hal itu seperti beberapa studi yang dilakukan oleh Citra (2012), Maunah (2015), Hendriana & Jacobus (2016), Setiawati (2017). Sementara kajian

tentang pendidikan karakter dalam lingkup studi sosiologi dilakukan oleh Xena (2019) dengan menggunakan perspektif Bergerian. Adapun studi yang akan peneliti lakukan mengangkat masalah penerapan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berfokus pada upaya mengurangi perilaku menyimpang pada siswa. Sejauh ini, kajian tentang penerapan pendidikan karakter di sekolah dalam analisis sosiologi masih sangat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan isu konformitas dan penyimpangan sosial. Hal itu membuat penelitian ini belum usang untuk dilakukan. Berbeda dengan penelitian Xena yang menggunakan perspektif Bergerian, penelitian ini berangkat dari perspektif sosiologis Merton dalam memahami permasalahan dan hambatan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah.

Konformitas dan Perilaku Menyimpang

Perspektif struktural fungsional digunakan sebagai titik tolak dalam memahami permasalahan penelitian ini. Perspektif struktural fungsional berakar dari pemikiran sosiolog klasik yang bernama Emile Durkheim. Ia mengembangkan gagasan tentang fakta sosial (Sunarto, 2004; Ritzer & Goodman, 2011) yang dapat dipahami sebagai norma-norma yang mengikat masyarakat. Dalam perkembangan sosiologi di kemudian hari muncul tokoh lain yang bernama Talcott Parsons. Menurut Parsons masyarakat memiliki skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, and Latency*) sehingga mampu berfungsi dan beradaptasi terhadap berbagai masalah yang dijumpai (Juwita et. al., 2020). Dijelaskan lebih lanjut oleh Parsons dalam Upe (2010), oleh karena masyarakat diatur oleh nilai dan norma yang telah mapan, sistem masyarakat cenderung stabil dan harmonis.

Kontradiktif dengan Parsons, Merton berpendapat bahwa komponen-komponen sistem sosial tidak jarang berada dalam hubungan yang bersifat konflik. Jadi selalu ada konsekuensi disfungsional dalam setiap sistem sosial (Ritzer & Goodman, 2011). Artinya, penyimpangan (deviasi) selalu ada di dalam setiap sistem sosial. Kenakalan siswa pada penelitian ini tergolong sebagai penyimpangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan lingkungan masyarakat. Meskipun keberadaan aturan di dalam masyarakat bersifat fungsional, beberapa kelompok justru memaknainya sebagai belenggu aktivitas (Risawati, 2014). Jadi ketidakpatuhan terhadap hukum pada sebagian kelompok dipicu oleh adanya tekanan spesifik sehingga mereka lebih cenderung berperilaku menyimpang ketimbang berperilaku konform (Setiadi & Kolip, 2011).

Penyimpangan menurut Merton dalam Mulyadi (2009), dapat dibedah dari dua unsur yaitu unsur kultur dan unsur struktur. Kultur menghasilkan *goal*, sedangkan struktur menghasilkan

means. Ketidakharmisan kedua unsur tersebut mendorong ke arah anomie, dan dengan demikian ke arah perilaku menyimpang (Sidi, 2014). Erianjoni (2015) menilai terjadinya pemilihan jalan alternatif yang dianggap menyimpang didorong oleh tidak terdapatnya keselarasan antara tujuan budaya dengan kesempatan yang tersedia dalam mewujudkan tujuan tersebut. Senada dengan opini tersebut, Narwoko & Suyanto (2007) lebih jauh menafsirkan bahwa anomie terjadi karena ada banyak sistem nilai dan struktur budaya yang saling bertentangan di dalam masyarakat. Ketiadaan standar nilai yang ajeg atau pasti membuat masyarakat tidak memiliki kepatuhan atau bertindak sesuai dengan standarnya masing-masing.

Merton dalam Sunarto (2004) mengidentifikasi lima cara adaptasi individu dalam menghadapi situasi tertentu dimana empat diantaranya dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dan hanya satu cara adaptasi yang dapat dikatakan sebagai perilaku tidak menyimpang, sebagaimana gambaran di bawah ini:

Tabel 1. Cara Adaptasi Individu terhadap Situasi Sosial

Cara Adaptasi	Tujuan Budaya	Cara yang Diinstitusionalisasikan
I. <i>Conformity</i>	+	+
II. <i>Innovation</i>	+	-
III. <i>Ritualism</i>	-	+
IV. <i>Retreatism</i>	-	-
V. <i>Rebellion</i>	±	±

Sumber: Sunarto, 2004: 180.

Menurut Durkheim, pemuda dipersiapkan masuk ke dalam masyarakat melalui pendidikan. Sekolah pada umumnya memperkenalkan kepada siswa nilai dan norma masyarakat. aturan-aturan sekolah pun biasanya searah dengan nilai dan norma tersebut (Salmiah, 2017: 99). Jadi sekolah dapat dilihat sebagai agen sosialisasi (Sunarto, 2004). Selain itu, sekolah juga bisa dipandang sebagai alat kontrol sosial yang bersifat preventif dan korektif (Tandi, 2019). Sistem pengendalian sosial ini sudah melembaga di dalam masyarakat (Sunarto, 2004). Perilaku menyimpang dikelola melalui proses pembimbingan tentang nilai dan norma (Herabudin, 2015). Di dalam institusi pendidikan, karakter siswa sengaja dibangun ke arah yang positif. Karakter itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tabiat, perangai, dan sifat-sifat seseorang yang membedakan seseorang dengan yang lain (Badudu dalam Bahri, 2015: 61). Karakter yang dibangun oleh sekolah dengan sengaja mengarah kepada karakter yang konform dengan nilai dan norma masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud menggali pemahaman dan penemuan (Moleong, 2010). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dirasa sudah tepat karena hendak melihat penerapan pendidikan karakter di sekolah melalui pembelajaran dalam upaya mengatasi perilaku menyimpang siswa serta melihat sejauh mana keefektifan dari penerapan pendidikan karakter tersebut. Adapun temuan penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti sudah sangat mengenal lokasi penelitian beserta fenomena yang sering terjadi di sekolah tersebut sehingga bias data atau tingkat keragu-raguan data dapat dipastikan kecil. Selain itu, tingkat kepercayaan responden terhadap peneliti sudah cukup baik karena saling mengenal dalam jangka waktu lama. Alasan lainnya yaitu karena SMA Negeri 2 Lhokseumawe pada saat ini sangat giat dalam penerapan program pendidikan karakter. Hal ini tercermin pada visi, misi, tujuan, dan strategi SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan terhitung mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data terdiri atas wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Responden penelitian ditentukan secara purposif, diantaranya pejabat sekolah, guru bidang studi, dan guru Bimbingan Konseling. Data dikumpulkan dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif sebagaimana dikutip dari Sugiyono (2012) yang terdiri dari: (a) reduksi data, (b) display data, dan (c) verifikasi, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data dengan cara triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran

a. Sosialisasi Pendidikan Karakter

Sosialisasi pendidikan karakter bersumber dari pedoman Kementerian Pendidikan Nasional dan hasil workshop yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri. Hasilnya kemudian disampaikan kepada para guru untuk dirumuskan secara bersama-sama petunjuk teknis penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Waka Kurikulum:

“Sejak diberlakukannya K-13 Kepala Sekolah dan beberapa guru yang telah mendapatkan pelatihan membuat sosialisasi khusus di sekolah, agar semua guru paham tentang pembelajaran berbasis karakter yang nantinya menjadi landasan dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu sosialisasi yang dilakukan tidak diikuti oleh semua guru bidang

studi karena waktu yang sangat terbatas. Tapi sebagian besar mengikuti sosialisasi”. (Sri Warzukni, S.Si, SMAN 2 Lhokseumawe, 07/01/2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum dapat dipahami bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Waka Kurikulum sudah menyelidiki permasalahan ini dengan berbincang secara tidak formal bersama para guru, ternyata pemahaman guru terhadap arah dan spirit yang diusung oleh kurikulum K-13 masih kurang memadai. Sejumlah guru bidang studi masih kebingungan menafsirkan maksud dan tujuan K-13 ini, apalagi jika harus mengaplikasikan pendidikan karakter ke dalam silabus mata pelajaran. Hal ini membuat penting dan mendesaknya untuk dilakukan sosialisasi secara berkala agar guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan karakter dapat memahami secara utuh program pemerintah tersebut. Menurut penulis, sekolah perlu segera menangani permasalahan ini.

b. Penyusunan Silabus dan RPP sebagai Turunan dari Kurikulum

Penyusunan Silabus dan RPP menurut keterangan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam diwajibkan memasukkan nilai-nilai karakter islami sebagaimana pernyataan berikut:

“Dalam penyusunan RPP kami dituntut untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru yang dirancang dengan konsep pendidikan karakter. Jadi dalam pembuatan RPP pun kami harus memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter meskipun dalam proses penerapannya dirasakan sedikit mengalami kendala, sebab nilai-nilai pendidikan karakter harus benar-benar dipahami dan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nilai-nilai tersebut juga harus bernuansa islami.” (Rahmati S.Ag, SMAN 2 Lhokseumawe, 07/01/2020)

Menurut guru bidang studi Sosiologi, dalam proses pembuatan RPP sebagai acuan pembelajaran beliau menerapkan strategi khusus sebagaimana diutarakan:

“Dalam membuat Silabus dan RPP nilai karakter termuat dalam indikator, kalau saya satu indikator nanti termuat beberapa nilai karakter. Nilai karakter yang tertulis dalam RPP tersebut sebisa mungkin akan saya munculkan pada saat proses pembelajaran”. (Dra. Suriya, M.M, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)

c. Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran

1) Pembiasaan dan Budaya Sekolah

Pembiasaan dan perwujudan budaya sekolah sudah dimulai saat siswa hadir di sekolah. Siswa wajib hadir paling tidak 5 (lima) menit sebelum bel masuk berbunyi. Siswa yang terlambat lebih dari 15 menit idealnya mendapatkan sanksi berupa mengutip sampah di pekarangan sekolah dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam pertama sesuai dengan

peraturan yang telah dibuat dalam perencanaan atau telah tertuang dalam tata tertib peraturan sekolah. Namun, dalam praktiknya siswa masih diberikan toleransi 2-3 kali oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan masih boleh mengikuti jam pelajaran pertama. Hal ini bertentangan dengan harapan Kepala Sekolah:

“Sekolah mentolerir keterlambatan siswa itu sekitar 5 menit setelah bel berbunyi. Saya mengharapkan selalu siswa datang tepat waktu karena di pagi hari begitu siswa sampai di sekolah mereka wajib bersalaman dengan guru-guru dan teman-teman. Jika mereka terlambat maka proses ini tidak akan sempat dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih ada siswa yang suka terlambat dengan alasan telat bangun. Dan saya juga mengharapkan sekali agar siswa yang terlambat diberikan sanksi oleh guru namun tidak dalam bentuk hukuman fisik.” (Nur A’la, S.Pd., MM, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)

Mengutip sampah adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang terlambat masuk sekolah. Hukuman ini tidak mengandung unsur kekerasan dan dipandang sebagai salah satu contoh upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bersih serta pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) pada diri siswa sehingga diharapkan terbangun karakter cinta lingkungan dan budaya sekolah yang ramah lingkungan.

Selain itu sekolah mewajibkan seluruh warga sekolah bersalaman setiap pagi sebelum memulai aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Para siswa mencium tangan seluruh guru dan bersalaman dengan sesama teman. Hal ini juga sebagai perwujudan nilai-nilai karakter religius pada diri siswa. Selain bersalaman setiap pagi, para siswa juga didorong untuk terbiasa mengucapkan salam dalam menyapa saat mereka bertemu atau berpisah satu sama lain.

Beberapa pembiasaan yang lain diantaranya Upacara Bendera setiap Senin pagi, berdo’a sebelum belajar, sholat dzuhur tepat waktu dan berjama’ah, membaca Yasin setiap Jum’at, mengantri, senam pagi, dan gotong royong. Apabila ada siswa yang melanggar aturan maka pihak guru atau tenaga kependidikan yang berwenang pada saat itu akan melakukan peneguran secara langsung. Para siswa juga didorong memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan menegur kawannya yang menyimpang dari aturan sebagai wujud dari nilai religius *amar ma’ruf nahi mungkar*.

2) Integrasi dalam Pembuatan Silabus dan RPP

Integrasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dilakukan dengan cara mengembangkan Silabus dan RPP pada kompetensi yang ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan. Sekolah mendorong para guru untuk berusaha mengintegrasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Misalnya dalam mata pelajaran Ekonomi, guru bisa menjelaskan hakikat ekonomi Islam,

misalnya mengapa Allah SWT mengharamkan riba atau mengharamkan mengurangi takaran dalam kegiatan jual beli atau perdagangan. Begitu juga dalam pelajaran MIPA, guru diminta untuk semakin meningkatkan keimanan siswa dengan mengajak mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini.

Menurut salah seorang guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 2 Lhokseumawe selaku pelaksana utama pendidikan karakter dan pemantau kegiatan siswa, pendidikan karakter berperan dalam memerangi perilaku menyimpang pada siswa. Pendidikan karakter sebagai landasan yang harus diperhatikan sebelum mengembangkan aspek yang lain sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Pelaksanaan pendidikan karakter bertujuan untuk mengurangi perilaku menyimpang siswa, dilakukan oleh semua guru pengajar. Hal itu perlu dilakukan agar semua sisi saling mendukung dan tidak bertolak belakang. Guru setiap bidang studi dalam pengajarannya selalu mencoba mengintegrasikan pendidikan karakter melalui tema-tema pembelajaran. Jika siswa telah terbentuk karakter dengan benar, maka sisi lain juga akan lebih mudah untuk dibentuk”. (Nurjamiati, S.Pd, SMAN 2 Lhokseumawe, 09/01/2020)

3) Keteladanan dan Arahkan

Dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe pendidikan karakter dalam proses pembelajaran juga diterapkan melalui kegiatan keteladanan yang merupakan kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yang lebih mengutamakan pemberian contoh dari guru, Kepala Sekolah, dan pengelola pendidikan lainnya kepada peserta didik. Kegiatan ini bertujuan memberi contoh/keteladanan tentang kebiasaan perilaku yang baik. Guru juga memberi contoh dengan perilaku mengutip sampah yang kebetulan berserakan di depan matanya sehingga murid yang ada di sekitar sekolah juga mengikuti perilaku tersebut dengan membantu sang guru membersihkan lingkungan sekolah.

Kendati demikian, berdasarkan pengamatan peneliti masih sering ditemukan di dalam kelas siswa suka berbohong, menyontek, dan membawa handphone untuk berkomunikasi di tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan ada juga siswa yang merokok di tempat tersembunyi seperti di toilet. Hal ini menurut terjadi bukan karena sekolah tidak berbuat apa-apa. Para guru sudah menunjukkan keteladanan dimana mereka tidak pernah merokok di lingkungan sekolah dan tidak asyik bertelepon atau menggunakan handphone pada saat jam pelajaran tengah berlangsung.

Menurut guru Pendidikan Agama Islam, efektivitas pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe khususnya perilaku menyimpang siswa masih belum efektif. Meskipun penerapan pendidikan agama, moral, budaya, dan karakter bangsa telah tercakup dalam proses belajar mengajar, namun penerapan karakter-karakter yang coba ditanamkan tersebut belum begitu

mampu diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe.

Selain masalah atas, dari hasil wawancara dengan beberapa guru bidang studi juga diketahui bahwa selama penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe belum terlihat perubahan yang berarti di mana siswa yang dari awalnya mempunyai perilaku yang kurang baik, sampai dengan akhir masa belajar di SMA tersebut belum menampakkan perubahan. Terlebih jika tidak ada dukungan dari orang tua, maka akan sangat mustahil penerapan pendidikan karakter akan efektif, karena waktu siswa lebih dari 70 persen berada di luar lingkungan sekolah.

2. Hambatan Penerapan Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa

Kendala pertama datang dari pihak keluarga. Ruang lingkup pendidikan karakter pertama kali tentunya harus ditanam melalui sebuah keluarga. Sebagai wadah dan proses pendidikan pertama bagi seorang anak, keluarga yang pemeran utamanya kedua orang tua memiliki posisi sentral dalam membentuk seorang anak memiliki karakter. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang tua paham tentang karakter dan bahkan disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak sebelum anak dititipkan di sekolah. Hal itu berdasarkan pengungkapan Kepala Sekolah yang mengatakan:

“Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga. Rumah merupakan tempat pertama sekali anak-anak dibimbing, dibentuk, dan diarahkan. Jika pondasinya udah kuat maka tidak akan sulit pihak sekolah mengembangkannya. Tapi kebanyakan tidak...” (Nur A’la, S.Pd., M.M, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)

Terkait pendidikan dasar dalam keluarga, status pendidikan orang tua dan status sosial juga turut mempengaruhi pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga. Orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi tidak mengetahui pola asuh terbaik bagi anaknya. Sedangkan status sosial orang tua yang rendah memaksa mereka bekerja sepanjang hari sehingga tidak memiliki banyak waktu dalam memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anaknya. Pernyataan Kepala Sekolah berikut ini terkait status pendidikan dan status sosial keluarga yang pada akhirnya memberi hambatan bagi proses pendidikan karakter di sekolah sebagaimana disampaikan:

“Banyak orang tua yang belum paham tentang pendidikan karakter bahkan mereka menganggap bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan akademik di sekolah. Mencari nafkah lebih mereka prioritaskan daripada datang menghadiri rapat di sekolah jika sekolah mengundang untuk kegiatan sekolah. Memang kalau tidak demikian mereka mau makan apa untuk sehari-hari. Jadi akhirnya bebannya ke kami para guru.” (Nur A’la, S.Pd., M.M, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)

Penjelasan Kepala Sekolah di atas menyiratkan masyarakat dari kelas bawah sebagian besar tidak memahami betul apa dan bagaimana proses pendidikan karakter dengan menerapkan pola asuh yang baik. Ini terjadi karena masyarakat dari kelas bawah lebih banyak menghabiskan waktu mereka dalam memenuhi roda ekonomi keluarga yang belum mapan sehingga pendidikan karakter bagi anak mereka sedikit terlupakan. Dengan strata sosial seperti ini proses pengenalan pendidikan karakter dalam internal keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hambatan kedua ialah faktor lingkungan. Lingkungan berperan besar dalam pembentukan karakter seorang anak. Betapapun bagus sebuah keluarga dalam mengajarkan pendidikan karakter di rumah namun jika lingkungan anak tersebut tidak mendukung, sudah pasti proses ini akan gagal. Lingkungan dalam hal ini juga termasuk lingkungan pergaulan anak atau kelompok bermain anak. Berdasarkan pengalaman berkecimpung di dalam dunia pendidikan, peneliti menemukan bahwa keluarnya kata-kata kasar dan jorok dari anak-anak saat ini bukan berasal dari pendidikan keluarga, tetapi dari pergaulannya di lingkungan sekitar, khususnya karena meniru teman sepermainan. Guru dan orang tua seringkali dibuat terkejut dengan perilaku buruk siswa atau anak. Padahal sekolah dan keluarga tidak pernah mengajarkan hal demikian.

Hambatan ketiga datang dari kurikulum dan guru/pendidik. Dalam praktiknya di lapangan, pemerintah telah merevisi berkali-kali kurikulum nasional yang menekankan akan pentingnya nilai-nilai karakter diterapkan dalam pembelajaran. Beberapa diantaranya adalah kejujuran, religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Namun ditemukan beberapa kendala. Diantara kendala yang dihadapi yaitu kesiapan guru dalam beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Gonta-ganti kurikulum yang sering terjadi setiap pergantian pemerintahan membuat para guru bekerja keras untuk menyesuaikan kembali indikator capaian, metode, standar evaluasi, dan sebagainya. Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe ada temuan bahwa diantara kalangan guru sendiri belum dilakukan dengan baik dan belum dapat memberikan keteladanan kepada siswa.

Salah seorang guru bidang studi juga mengungkapkan hal yang sama dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Guru PPKN tersebut menyampaikan keterangan yang berbeda dengan beberapa responden penelitian ini, sebagaimana dikatakan:

“Pendidikan karakter yang baru-baru ini diberlakukan di setiap sekolah masih banyak bertumpu pada teori dan belum benar-benar diaplikasikan ke dalam kehidupan pribadi siswa yang efeknya bisa mengurangi perilaku menyimpang siswa. Walaupun demikian, di SMA Negeri 2 Lhokseumawe ini jarang ditemukan pelanggaran atau perilaku menyimpang

yang termasuk dalam kategori berat. Namun hanya perilaku menyimpang yang masih dalam batas kewajaran dalam artian masih dapat dimaafkan dan diberi sanksi berupa nasehat atau teguran. Menurut agama fenomena yang demikian juga tidak bisa dibiarkan terus-terusan yang akhirnya memberikan efek yang tidak baik kepada siswa”. (Mursyidah. S.Pd, SMAN 2 Lhokseumawe, 10/01/2020)

3. Pembahasan

Masyarakat memiliki sebuah elemen yang disebut “fakta sosial”. Dalam tingkat mezzo (menengah), norma sebagai fakta sosial juga terdapat di dalam ruang lingkup sekolah. Sekolah adalah miniatur masyarakat dimana norma-norma yang ada di sekolah mencerminkan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Berbagai aturan baik yang bersifat tertulis atau pun tidak tertulis diberlakukan kepada segenap warga sekolah dan memiliki kekuatan memaksa.

Diskusi ini bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan: bagaimana tatanan sekolah dicapai dan dipertahankan dan apa tujuan mempertahankan tatanan sekolah? Tatanan sekolah muncul dari norma dan aturan yang dipraktikkan oleh segenap warga sekolah. Norma memungkinkan guru dan siswa untuk beraktivitas di sekolah melalui kesepakatan diantara mereka. Tanpa norma dan aturan, sekolah akan berada dalam kekacauan dan individu yang berinteraksi di dalamnya tidak akan mampu mengendalikan kekacauan tersebut.

Tatanan sekolah terwujud bilamana sekolah berada dalam stabilitas karena konsensus yang mengikatnya. Tatanan sekolah hadir ketika seluruh guru dan siswa “menyetujui” kontrak sosial bersama dimana nilai dan norma tertentu dipertahankan dan aturan ditegakkan. Dengan demikian, adanya nilai, keyakinan, praktik, dan perilaku yang bertentangan dengan tatanan sekolah akan dianggap menyimpang bahkan berbahaya sehingga dibatasi melalui penegakan aturan, norma, dan tabu.

Tatanan sekolah pada umumnya bersifat hierarkis. Dalam hal ini, beberapa orang memegang kekuasaan lebih dari yang lain sehingga mereka dapat menegakkan aturan dan norma yang diperlukan untuk pelestarian tatanan sekolah. Mereka adalah Kepala Sekolah dan para guru yang memainkan peran formatif dalam mengembangkan kesadaran kolektif seluruh siswa. Maka mereka juga disebut sebagai figur otoritas di lingkungan sekolah. Melalui interaksi dengan figur otoritas siswa berpartisipasi dalam pemeliharaan aturan dan norma serta perilaku yang memungkinkan kelancaran fungsi belajar mengajar di sekolah. Ketertiban di sekolah muncul ketika ada kerjasama yang baik diantara seluruh warga sekolah.

Sekolah adalah wadah yang akan menghubungkan individu dengan masyarakat. Sekolah membantu dalam mengatur individu dan mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Proses

sosialisasi berpedoman pada norma dan diajarkan kepada anak didik oleh figur otoritas di sekitarnya, termasuk juga dalam hal ini keluarga, guru, dan tokoh agama. Seorang anak mempelajari norma tidak hanya melalui arahan lisan dan tertulis, tetapi juga dengan mengamati orang-orang di sekitarnya. Mempelajari norma-norma di sekolah dan di dalam kelompok masyarakat memungkinkan anak tersebut berfungsi secara sosial dalam sistem masyarakat tersebut dan pada akhirnya diterima sebagai bagian dari kelompok atau masyarakat.

Aturan sekolah merupakan representasi dari norma-norma masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Sebab sekolah adalah salah satu agen masyarakat. Apabila ada siswa yang melanggar aturan, ia secara sosial akan dicap menyimpang, maka siswa itu pun akan menerima sanksi dari figur otoritas di sekolah tersebut. Pelabelan menyimpang dan penerapan sanksi bagi pelaku penyimpangan menegaskan bahwa nilai-nilai dan norma-norma itu memang nyata adanya.

Sebagian besar siswa pada dasarnya menyadari keberadaan norma yang berada di luar dirinya yang bersifat “memaksa” ini sehingga mereka tahu caranya menyesuaikan perilaku sesuai dengan arahan norma tersebut. Selain itu, mereka juga menilai perilaku sesama siswa yang lain sesuai dengan norma-norma yang dianut. Dengan demikian, norma lebih sering ditegakkan dengan cara yang tidak disadari. Menurut penulis, setiap siswa bisa merasakan bahwa perilakunya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh norma, sehingga kebanyakan dari siswa mematuhi aturan-aturan di sekolah. Kekuatan peraturan di sekolah sesungguhnya berasal dari ekspektasi orang lain, diantaranya ekspektasi guru dan sesama siswa terhadap siswa lain. Adanya ancaman dipermalukan, diberi sanksi, atau dikucilkan karena tidak mematuhi peraturan, memaksa siswa untuk senantiasa mengingat dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukannya. Norma pada akhirnya merupakan kekuatan moral yang mampu menahan ego setiap siswa untuk berbuat semaunya atau berbuat tidak sesuai dengan aturan sekolah.

Norma sekolah memandu perilaku siswa. Ketika perilaku seorang siswa rusak, norma sekolah meminta reaksi orang lain (guru dan teman siswa) untuk menegaskan keberadaannya. Guru mungkin memberikan sanksi terhadap perilaku siswa secara visual dengan kontak mata dan ekspresi wajah, atau secara lisan, atau memberikan hukuman secara langsung yang diharapkan dapat meninggalkan kesan atau efek jera. Sementara teman-teman siswa menjauhi, menggunjing, atau menertawakannya. Hal ini sebagai salah satu bentuk sanksi sosial. Keadaan tersebut membentuk kekuatan moral bersama yang mampu mempertahankan sentimen semangat solidaritas dalam kesadaran semua siswa. Demikianlah kontribusi positif yang dapat diberikan oleh institusi pendidikan dalam pemeliharaan sistem sosial.

Kendati demikian, pelanggaran terhadap aturan dan norma baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah masih kerap kali terjadi. Pihak sekolah dalam hal ini bertindak dalam rangka melindungi institusi dari berbagai “disfungsi” yang mungkin dilakukan oleh sebagian warga sekolah. Namun bila dilihat lebih dekat, istilah disfungsi itu sendiri sebenarnya mengandung masalah, sarat dengan kepentingan kelompok tertentu, dan terlalu mengeneralisasi pendefinisian. Disfungsi yang terjadi di dalam tubuh institusi pendidikan ini kiranya perlu diidentifikasi lebih jauh dengan melihat sudut pandang siswa yang “dituduh” melakukan penyimpangan. Peneliti menggali permasalahan siswa dalam sejumlah percakapan informal dengan beberapa siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe dengan hasil temuan sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sudut Pandang Pelaku Konformitas dan Penyimpangan

No	Pola Adaptasi Siswa	Fenomena yang Mencuat	Alasan Pelaku
1	<i>Conformity</i>	Tekun belajar, jujur, religius, tanggung jawab, dan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Harapan dan doa orang tua - Kesadaran siswa demi meraih cita-cita - Nasehat guru pasti untuk kebaikan - Belajar sudah membudaya di dalam diri
2	<i>Innovation</i>	Menyontek	<ul style="list-style-type: none"> - Lupa belajar - Tidak memahami materi pelajaran karena masalah metode mengajar guru yang membosankan - Tidak suka dengan suatu mata pelajaran tetapi terpaksa harus mempelajari semuanya
3	<i>Ritualism</i>	Tidak tahu tujuan menempuh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah karena dipaksa orang tua - Sekolah karena teman-teman semua pergi ke sekolah - Lebih baik ke sekolah daripada cuma bengong di rumah
4	<i>Retreatism</i>	Membuang sampah sembarangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan di lingkungan luar sekolah karena semua orang membuang sampah sembarangan - Sudah ada petugas kebersihan yang akan membersihkan sampah - Kebiasaan membuang sampah karena di lingkungan luar sekolah pemerintah tidak menyediakan tong sampah yang memadai
		Membolos	<ul style="list-style-type: none"> - Guru yang mengajar tidak menarik - Dipengaruhi teman - Takut dikucilkan dalam pergaulan
		Merokok	<ul style="list-style-type: none"> - Dipengaruhi teman - Takut dikucilkan dalam pergaulan kelompok - Orang tua kok boleh merokok - Merokok itu keren
		Menyalahgunakan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Broken home</i> - Dipengaruhi teman - Sudah kecanduan

		Pacaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah jadi trend anak muda saat ini - Pengaruh media - Malu kalau dibilang jomblo atau “gak laku”
		Berkata kasar dan bercakap kotor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh lingkungan - Pengaruh <i>peer group</i> - Pengaruh media
5	<i>Rebellion</i>	Sejauh ini tidak ada gejala siswa terpapar radikalisme atau hal-hal lain yang mengarah ke arah sana	

Memperhatikan kembali beberapa motif siswa pelaku penyimpangan di atas dapat dimengerti bahwa tidak semua tindakan menyimpang lahir murni sebagai wujud dari karakter siswa yang buruk. Terdapat konteks situasi yang mendorong lahirnya penyimpangan. Penulis mengambil contoh menyontek sebagai perilaku menyimpang (pola adaptasi *innovation*) yang berdasarkan laporan guru merupakan masalah paling banyak terjadi di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Bila dikaitkan dalam pembahasan pendidikan karakter, realitasnya siswa yang menyontek tersebut cenderung diberi label oleh gurunya sebagai siswa malas. Tetapi apakah semua siswa yang menyontek itu benar-benar siswa yang malas dan dengan demikian disebut siswa menyimpang atau disfungsi? Ataukah jangsan-jangsan institusi pendidikan yang menerapkan nilai dan norma itu sendiri juga sedang mengalami disfungsi?

Bila memahami alasan siswa menyontek karena tidak mengerti dengan materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru, hal ini berarti ada yang salah dalam metode pengajaran yang diterapkan oleh guru. Atau bahkan mungkin ada masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya. Beberapa guru memang harus dimaklumi, berdasarkan amatan peneliti, tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar. Secara makro, institusi pendidikan yang melahirkan guru, misalnya universitas, seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas situasi ini yang menyebabkan terjadinya disfungsi dalam sistem belajar mengajar di sekolah. Mengapa ada guru yang tidak bisa mengajar tetapi bisa lulus menjadi seorang guru?

Begitu pula halnya dengan kurikulum dan mata pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, apakah sudah benar-benar mengakomodasi bakat dan minat para siswa? Ataukah pendidikan yang dijalani selama ini terlalu bersifat umum, menyamaratakan, dan cenderung hanya mempersiapkan siswa sebagai “calon tenaga kerja” atau “calon buruh” untuk mendukung berjalannya institusi ekonomi? Ditambah lagi dengan fenomena kurikulum yang dibuat terlalu prosedural sehingga guru pada akhirnya berupaya mengejar ketercapaian penyampaian materi pelajaran beserta indikator-indikatornya yang tertuang di dalam Silabus tanpa memperhatikan

apakah seluruh siswa benar-benar sudah menyerap materi pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya.

Di sisi lain, sekolah tidak mengklasifikasikan pola adaptasi *ritualism* sebagai tindakan menyimpang siswa. Siswa yang biasa-biasa saja ini memang cenderung patuh terhadap semua aturan di sekolah dan jarang berbuat keonaran. Tetapi bila benar-benar ditanyakan dan ditelusuri motif mereka ke sekolah, tidak diperoleh keterangan yang jelas. Para siswa hanya menjalani rutinitas di sekolah karena memang lingkungan sosial sudah merancang sedemikian adanya. Pendidikan formal sudah menjadi institusi yang diterima keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak mungkin ada anak yang mampu menolak disuruh pergi ke sekolah. Ia pasti akan “dipaksa” ke sekolah. Namun karena siswa yang mengambil pola adaptasi *ritualism* jarang berbuat keonaran atau berbuat masalah di sekolah, mereka tidak dilabel menyimpang, meskipun sesungguhnya kelompok siswa ini tidak memahami tujuan kebudayaan yang diharapkan ada pada diri mereka.

Tabel 3.
Tindakan Pihak Sekolah terhadap Perilaku Menyimpang

No	Pola Adaptasi Siswa	Identifikasi Pihak Sekolah	Tindakan Guru/Pihak Sekolah
1	<i>Conformity</i>	Tidak menyimpang	Perilaku para siswa kelompok ini adalah yang diharapkan oleh sekolah dan masyarakat pada umumnya sehingga diberi hadiah dan apresiasi.
2	<i>Innovation</i>	Menyimpang	Menegur, menasehati, memarahi, memasang raut muka tidak suka, menghukum, memberi nilai jelek, tidak diluluskan.
3	<i>Ritualism</i>	Tidak menyimpang	Umumnya siswa kategori ini tidak dilabel oleh sekolah sebagai perilaku menyimpang. Hal ini karena para siswa sudah memenuhi minimal prosedur administrasi sekolah dan formalitas dalam proses pendidikan.
4	<i>Retreatism</i>	Menyimpang	Menegur, menasehati, memarahi, menghukum, memberi nilai jelek, menyurati orang tua, tidak diluluskan, menghadap guru BK, mengeluarkan dari sekolah.
5	<i>Rebellion</i>	Menyimpang	Kasus belum ada namun sekolah tetap melakukan upaya preventif karena dewasa ini program pemerintah yang terkait dengan pencegahan radikalisasi begitu masif.

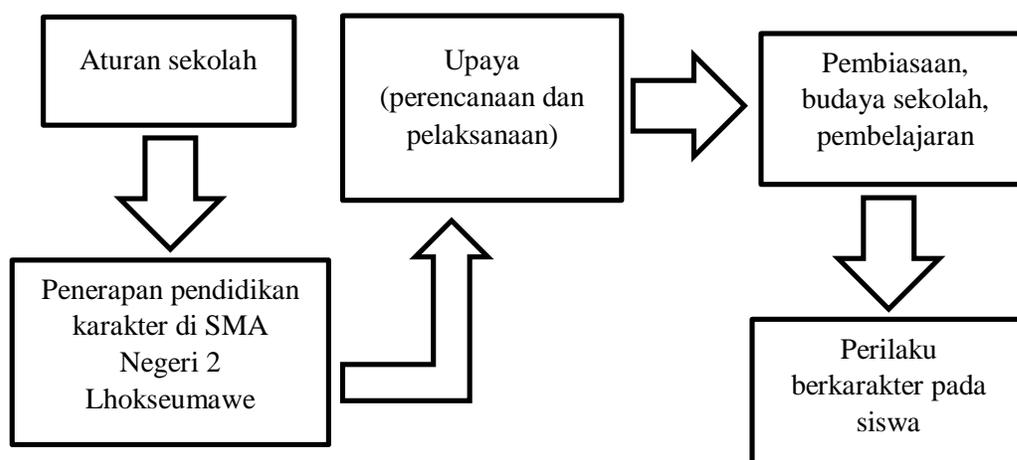
Menurut peneliti, fenomena penyimpangan sosial yang mencuat beserta permasalahan yang melatarbelakanginya mungkin luput dari pemahaman pihak sekolah sehingga dibuat program dan

kegiatan pendidikan karakter yang tidak semuanya menyentuh akar permasalahan di tingkat siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa program pendidikan karakter cenderung hanya mengarahkan targetnya kepada siswa atau individu. Program ini tidak menjangkau permasalahan yang bersifat sistemik seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Maka tidak mengherankan bila temuan lapangan dari hasil pandangan subjektif para informan menilai program pendidikan karakter belum mampu secara efektif mengatasi perilaku menyimpang seluruh siswa, terutama sekali perilaku siswa yang suka menyontek di setiap pelaksanaan ujian.

Menurut penulis, permasalahan siswa bukan hanya terletak pada aspek karakter yang buruk sehingga mereka menyontek. Tapi ada kondisi dimana mereka tidak menguasai materi sehingga dalam mencapai tujuan budaya untuk “lulus ujian” mereka terpaksa menggunakan cara-cara di luar ketentuan institusi yang sah. Sementara program pendidikan karakter yang diterapkan oleh sekolah tidak menjawab permasalahan ini.

Bila diilustrasikan, harapan pihak sekolah melalui penerapan program pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe sebagai berikut:

Bagan 2.
Skema Program Pendidikan Karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe



Ilustrasi bagan yang ditampilkan di atas memberi sinyal bahwa program pendidikan karakter ini merupakan kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara *top-down* (dirumuskan dari atas ke bawah) tanpa melibatkan siswa, minimal dengan bertanya permasalahan mendasar yang dialami oleh siswa sehingga berperilaku menyimpang. Pendekatan semacam ini mengabaikan konteks situasi penyebab perilaku menyimpang dengan langsung memvonis tindakan menyimpang

pada diri individu yang salah. Karena salah, perilaku individu harus diubah ke arah yang benar. Tetapi tanpa mengubah sistem yang salah, apakah individu akan mampu berubah dari perilaku salah?

Masalahnya bila siswa yang tidak mengerti materi pelajaran tidak menyontek maka ia terancam tidak akan lulus ujian. Banyaknya siswa yang tidak lulus ujian pada akhirnya juga menjadi masalah di dalam sekolah yang dapat mencoreng nama baik sekolah di mata Dinas Pendidikan. Kadangkala terjadinya kebocoran soal ujian nasional juga diinisiasi oleh beberapa oknum figur otoritas di dalam sekolah sehingga hal ini juga menambah buruk situasi pendidikan karakter yang sesungguhnya karena terjadi keadaan anomie. Para siswa kebingungan dengan situasi dimana sekolah mengajarkan pentingnya kejujuran, tapi pada situasi tertentu ada oknum guru atas nama sekolah yang mendorong terjadinya tindakan menyontek kunci jawaban pada saat ujian nasional berlangsung dan informasi ini sampai pula kepada siswa-siswa yang lebih junior. Jadi dimana letak keteladanan guru dalam kasus ini?

Sejauh ini, sekolah tampaknya terlalu memaksakan pengkaitan konsep antara variabel pendidikan karakter dan variabel perilaku menyimpang. Secara pemahaman konsep sangat tidak mungkin program pendidikan karakter akan mampu menangani semua bentuk perilaku menyimpang. Apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan cenderung mendukung *status quo*, konservatif, prosedural, dan abai terhadap disfungsi di tingkat sistem.

Selama ini sekolah menerapkan pendisiplinan tubuh pada diri siswa. Siswa diatur jam masuk sekolah, seragam yang harus dikenakan, indikator kerapian, apa yang harus dipelajari, harus mengerjakan tugas-tugas dari guru, dan seterusnya. Bila aturan dilanggar, sanksi akan diberlakukan. Beberapa sanksi yang diterapkan misalnya mengutip sampah, menghafal ayat-ayat pendek, dan sebagainya. Seluruh aktivitas ini dibingkai dalam istilah yang dinamakan penciptaan budaya sekolah yang mendukung pendidikan karakter. Sebuah upaya pembudayaan atau pendisiplinan. Beberapa aktivitas lainnya yaitu mengantri dan mengikuti upacara bendera tetapi sering terjadi tanpa penghayatan. Dalam kaitannya dengan aspek religiusitas beberapa kegiatan yang dibudayakan seperti mengucapkan salam, berdoa, sholat berjamaah, mengaji surat Yasin, ceramah, pesantren kilat, dan kegiatan yang menunjang sisi ruhiyah. Hal ini sebenarnya sangat diperlukan dan tidak menjadi permasalahan. Tetapi menurut penulis, masih ada satu hal yang kurang atau terlewatkan dalam rangkaian proyek sosial tersebut. Suatu hal yang tidak mencuat ialah tidak terjadinya proses dialog yang setara, yang tidak terdistorsi, dan mencerahkan. Suatu upaya mengembalikan siswa kepada hakikat kemanusiaannya. Pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan malah membuat siswa seperti robot yang dikendalikan sedemikian rupa. Aspek

pencerahan ini belum benar-benar berjalan dalam sistem pendidikan di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Keadaan ini membuat aturan dijalankan lebih karena ketakutan atas sanksi yang dapat diterima kalau melanggar ketimpang kesadaran internal siswa untuk menegakkan aturan. Diperparah lagi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masalah siswa tidak terakomodasi dengan baik sehingga mereka terpaksa menyimpang.

Ketika program pendidikan karakter digaungkan, aktivitas yang dilakukan oleh perumus dan pelaksana kebijakan kembali terjebak dalam nuansa birokratis dan prosedural. Menyusun RPP dan Silabus, tapi tidak ada jaminan dalam penerapannya di lapangan karena satu dan lain hal. Sementara proses pengendalian sosial dilakukan dengan cara menegur dan mengingatkan, atau sistem muzakarah. Hal ini tampaknya hanya dijalankan oleh guru, sementara di tingkat siswa masih ada keengganan untuk menjalankannya. Sementara cara persuasif yang diterapkan oleh guru walaupun dalam spirit hukuman non kekerasan, dalam amatan peneliti ada beberapa kasus dimana guru justru menerapkan bentuk kekerasan verbal.

Beberapa pembudayaan sekolah yang lain seperti gotong royong, operasi semut, dan piket kelas juga tidak dilakukan oleh siswa benar-benar karena dorongan kesadarannya, tetapi karena takut mendapatkan sanksi dari figur otoritas. Hal ini seolah berantitesa dengan slogan-slogan yang ditempelkan di seputaran lingkungan sekolah yang kosong tanpa makna.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji permasalahan dan temuan data lapangan di atas, peneliti dapat memahami bahwa penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya: a). Pemberian sosialisasi kepada guru tentang program pendidikan karakter yang bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para pendidik di lingkungan SMA Negeri 2 Lhokseumawe; b). Penyusunan Silabus dan RPP yang berbasis pendidikan karakter yang dituangkan dalam indikator capaian pembelajaran; c). Pengintegrasian dan penerapan nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar di kelas; d) Penciptaan budaya sekolah yang mendukung proses pendidikan karakter; e) Pembiasaan siswa untuk berperilaku sesuai dengan harapan sistem; dan f) Keteladanan guru.

Penerapan pendidikan karakter dalam rangka mengurangi perilaku menyimpang siswa belum berjalan optimal karena menghadapi sejumlah kendala, seperti a) Minimnya kontribusi keluarga dalam mendidik anak dan tidak adanya pondasi pendidikan karakter yang kuat dari keluarga; b) Inkonsistensi nilai dan norma sekolah dengan nilai dan norma di lingkungan luar sekolah, terutama dalam kelompok bermain siswa; dan c) Kurikulum pendidikan yang mudah

berganti dan kurangnya pemahaman guru dalam menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai karakter ke dalam pelajaran. Selain itu, dan mungkin sangat krusial sifatnya, pendefinisian perilaku menyimpang dan disfungsi sosial selama ini hanya bertumpu pada “menyalahkan perilaku individu yang menyimpang”, tetapi menutup mata pada masalah pendidikan yang bersifat sistemik yang pada akhirnya mendorong siswa ke arah perilaku menyimpang dan keadaan anomie.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada SMA Negeri 2 Lhoksemawe sebagai berikut:

1. Sekolah perlu melakukan kajian mendalam dan menyeluruh mengenai penyebab perilaku menyimpang pada siswa dari perspektif siswa sendiri. Dengan demikian, dapat dipetakan masalah yang sebenarnya karena ada upaya untuk mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan selama ini di dalam institusi pendidikan. Dalam hal ini, guru Bimbingan Konseling dapat diberdayakan sebagai ujung tombak dalam menggali dan memahami masalah-masalah yang dialami siswa dan perlu dijauhkan adanya kesan untuk menghukum siswa.
2. Sekolah perlu membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat dan keluarga dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter dan pengontrolan perilaku siswa di luar jam sekolah.
3. Sekolah perlu mengobati penyakit di dalam institusi pendidikan yang sifatnya sistemik dan disfungsi seperti masalah guru yang tidak mampu dan tidak menarik dalam mengajar melalui kebijakan Kepala Sekolah, program, dan kegiatan yang mampu mengeksekusi dan mengatasi permasalahan tersebut langsung di tingkat sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh.tribunnews.com (15/02/2013). Pelajar Lhokseumawe Terlibat Pergaulan Bebas. Diakses 5 Februari 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2013/02/15/70-pelajar-lhokseumawe-terlibat-pergaulan-bebas>
- Aceh.tribunnews.com (22/06/2016). Pemuda Tawuran di Terminal 1 Luka. Diakses 5 Februari 2020. <https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/06/22/pemuda-tawuran-di-terminal-1-luka>
- Aceh.tribunnews.com (10/04/2019). Ini Jumlah HIV/AIDS yang Ditemukan di Lhokseumawe Pada Tahun Ini. Diakses 5 Februari 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/10/ini-jumlah-kasus-hivaidis-yang-ditemukan-di-lhokseumawe-pada-tahun-ini>

- Acehportal.com (28/04/2020). Ratusan Remaja Balap Liar di Jalan Len Pipa Aceh Utara Ditangkap Polisi. Diakses 30 April 2020. <https://www.acehportal.com/2020/04/28/ratusan-remaja-balap-liar-di-jalan-len-pipa-aceh-utara-ditangkap-polisi/>
- Bahri, S. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Sekolah. *Ta'allum*, 3(1), 57-76.
- Citra, Y. (2012). Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. *E-JUPEKhu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 237-249.
- Erianjoni (2015). Pelabelan Orang Minangkabau pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus pada Dua Nagari di Sumatera Barat. *Humanus*, 14(1), 31-39.
- Harianrakyataceh.com (02/09/2016). LGBT Mulai Marak di Lhokseumawe. Diakses 4 Maret 2020. <https://harianrakyataceh.com/2016/09/02/lgbt-mulai-marak-di-lhokseumawe/>
- Hendriana, E. C. & Jacobus, A. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia* 1(2), 25-29.
- Henslin, J. M. (2017). *Sociology: A Down-to-Earth Approach*. Pearson Education.
- Herabudin (2015). *Pengantar Sosiologi*. Pustaka Setia.
- Kanalaceh.com (17/11/2017). Terlibat Narkoba 4 Remaja Lhokseumawe Dibekuk. Diakses 4 Maret 2020. <https://www.kanalaceh.com/2017/11/17/terlibat-narkoba-4-remaja-lhokseumawe-dibekuk/>
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2011). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Badan Litbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendiknas.
- Juwita, R, et. al. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(1), 1-8.
- Maunah, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 90-101.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2009). Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. *Jurnal Hukum*, 5(6), 1-29.
- Narwoko, J. D. & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Risdawati (2014). Upaya Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang. *Hikmah*, 8(2), 74-87.
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. (2011). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Salmiah (2017). Peran Sekolah sebagai Agen Sosialisasi dalam Pembentukan Moral Siswa di MAN 3 Makassar. *Jurnal Sosialisasi*, 4(1), 98-103.

- Setiadi, E. M. & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana.
- Setiawati, N. A. (2017). Pendidikan Karakter sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. *Proseding Seminar Nasional Tahunan FIS Unimed*, Tahun 2017 Volume 1 Nomor 1.
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 72-81.
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tandi, S. (2019). Educational Contribution of Emile Durkheim: a Functional Assessment. *The Research Journal of Social Sciences*, 10(2), 146-156.
- Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Rajawali Pers.
- Xena, A. (2019). Internalisasi Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren. *Dewantara*, 7(1), 90-103.

POLA PARENTING DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 6 KABUPATEN BIREUEN

Zuraida Adam, Suadi¹⁾, Abidin

¹ Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, suadi@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study describes the implementation of the parenting program and looks at the changes in the character of students after the implementation of the parenting program at SD Negeri 6 Bireuen. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of school officials, teachers, parents, school committees, and students. The results showed that the parenting program implemented at SD Negeri 6 Bireuen was running well by involving a socialization scheme, namely externalization, objectivation, and internalization of values and norms in the context of building student character. Changes in children's character are marked by changes in their daily attitudes that have become a habit. The values of character education that have been successfully implemented include religious values, discipline, responsibility, love for the environment, and honesty.

Keywords: Parenting, Character Education, Socialization, Values and Norms, School

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pola *parenting* dan melihat sejauh mana perubahan karakter siswa setelah penerapan program *parenting* di SD Negeri 6 Kabupaten Bireuen. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *parenting* yang dilaksanakan di SD Negeri 6 Bireuen berjalan baik dengan melibatkan skema sosialisasi yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi nilai dan norma dalam rangka pembentukan karakter siswa. Perubahan karakter pada anak ditandai dengan perubahan sikap sehari-hari yang mulai menjadi suatu kebiasaan. Adapun nilai pendidikan karakter yang berhasil diterapkan diantaranya nilai religius, disiplin, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan kejujuran.

Kata Kunci: *Parenting, Pendidikan Karakter, Sosialisasi, Nilai dan Norma, Sekolah*

PENDAHULUAN

Anak amal shaleh berdasarkan pemahaman agama Islam adalah satu investasi terbaik yang dapat mengalirkan pahala bagi kedua orang tua (Helmawati, 2016). Maka dari itu, ikhtiar orang tua agar anak mereka berakhlak mulia sudah dilakukan jauh hari, bahkan sudah dimulai sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Pada masa ini, seorang ibu yang sedang mengandung menjaga sekali tata perilakunya dengan harapan tidak akan mewariskan akhlak yang buruk kepada anak yang dikandungnya. Ketika sang buah hati lahir, anak tersebut kemudian melalui tradisi pendidikan awal di tingkat keluarga. Selanjutnya pada jenjang usia sekolah orang tua mulai mendaftarkan anak-anak mereka masuk ke dalam institusi pendidikan, terutama sekali pendidikan formal.

Tetapi pada banyak kasus, momentum ini seolah memberi isyarat institusi keluarga “angkat kaki” dalam proses pendidikan anak. Beberapa orang tua memaknai proses dan hasil pendidikan adalah tanggung jawab guru secara penuh karena anak sudah diserahkan oleh orang tua kepada pihak sekolah. Dalam proses penyerahan itu, orang tua sudah membayar segala biaya pendidikan yang dipersyaratkan oleh sekolah dan memaknai kompensasi tersebut sebagai pengalihan tanggung jawab dari orang tua kepada sekolah. Realitas ini membuat pendidikan anak berpusat pada sekolah. Sementara keluarga dan masyarakat tidak lagi mengambil peran yang setara. Kesibukan orang tua (terlebih pada kasus ayah dan ibu sama-sama bekerja) kerap kali dijadikan basis legitimasi dalam mendukung pandangan tersebut.

Fenomena ini dirasakan juga pada awalnya di SD Negeri 6 Bireuen. Ketika pihak sekolah mengirim surat tentang permasalahan siswa kepada orang tua, sering ditanggapi kurang serius. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan sebagian orang tua sehingga segala informasi tentang perilaku anak di rumah tidak dapat diakses oleh guru di sekolah. Alhasil peran orang tua dalam proses pendidikan semakin berkurang. Minimnya fungsi pengontrolan dari orang tua ini membuat anak lalai mengerjakan tugas-tugas (pekerjaan rumah) yang diberikan oleh guru. Bahkan pada saat pengambilan raport sebagai momen yang sangat penting bagi siswa tidak jarang diwakili oleh saudara yang lain. Keadaan diperburuk lagi karena para orang tua yang tergabung dalam Komite Sekolah juga kurang berfungsi.

Hal ini ternyata berdampak tidak baik pada siswa. Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang guru, pada saat itu karakter siswa dinilai relatif buruk. Informan mengatakan bahwa tingkat kesopanan siswa terhadap guru dan budaya saling menghargai terhadap teman-teman di kelas masih sangat kurang.

Realitas ini membuat para guru merasa upaya menumbuh-kembangkan pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan di SD Negeri 6 Bireuen. Menanggapi sekelumit

problematika ini, pihak sekolah sendiri sudah berusaha menjembatani ruang komunikasi antara guru dan orang tua supaya mampu bekerjasama dengan baik dalam proses mendidik anak. Akan tetapi niat baik tersebut tidak semulus yang diharapkan. Dalam prosesnya terjadi berbagai dinamika. Ternyata masih ada orang tua yang marah ketika dipanggil ke sekolah dan diceritakan oleh wali kelas tentang kondisi anak mereka.

Tindakan ini sangat disayangkan karena orang tua sesungguhnya memiliki fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam proses membentuk jati diri anak. Secara sosiologis, keberadaan keluarga sangat dibutuhkan pada masa awal perkembangan anak. Kurangnya perhatian dari orang tua dapat berimbas pada perilaku anak sehingga berdampak pula pada penurunan prestasi di sekolah. Oleh sebab itu, pihak sekolah merasa perlu menciptakan ruang komunikasi dan kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua, sebab keluarga masih diyakini sebagai pihak yang meletakkan landasan moral yang di atasnya seluruh institusi sosial dibangun. Maka sinergi antara guru dan orang tua juga menjadi poin penting dalam proses pembentukan karakter anak. Mengingat signifikannya peran keluarga di dalam pendidikan, maka dibentuk suatu wadah yang dinamakan program *parenting*.

Program *parenting* merupakan sebuah aktivitas yang dimaksudkan sebagai pendidikan bagi orang dewasa. Sasaran dari program *parenting* adalah para orang tua atau anggota keluarga yang lain dengan membekali mereka pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial dan pendidikan di rumah. Fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan mengasuh, merawat, melindungi, dan mendidik anak. Tujuannya supaya pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicapai secara optimal sesuai dengan usianya. Menurut Ganevi (2018), program *parenting* bermanfaat dalam membangun komunikasi yang baik antara institusi pendidikan dan institusi keluarga sehingga pola pengasuhan yang dijalankan di kedua institusi sosial tersebut berjalan selaras. Manfaat lainnya yaitu orang tua dapat mengetahui capaian perkembangan anak.

Program *parenting* sudah diterapkan di SD Negeri 6 Bireuen sejak tahun 2018. Setelah berjalan dalam jangka waktu 3 tahun dampak positifnya sudah mulai dirasakan oleh pihak sekolah terutama tampak pada perubahan karakter siswa yang lebih baik dan lebih patuh dari sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan tajuk: “Pola *Parenting* dan Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar Negeri 6 Kabupaten Bireuen”.

Penelitian tentang program *parenting* ini telah banyak dikaji sebelumnya namun dalam konteks yang berbeda seperti diteliti oleh Hayati & Mamat (2014), Hatimah (2016), Wulandary & Herlisa (2017), Ningsih et. al. (2018), Sa’adah (2018), Ganevi (2018), Bidasari (2019), dan Jamilah

(2019). Namun beberapa studi tersebut di atas ternyata lebih cenderung mengkaji pola pengasuhan anak atau *parenting* dari sisi keilmuan keguruan dan ilmu pendidikan, serta sudut pandang administrasi pendidikan. Sementara kajian tentang program *parenting* dari sudut pandang sosiologi masih sangat terbatas dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memperdalam kajian program *parenting*, secara khusus dari sudut pandang sosialisasi.

Perspektif Teoritik Peter L. Berger

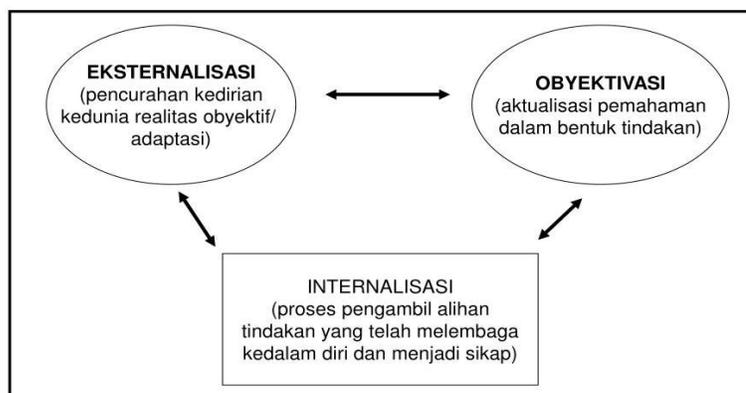
Secara sosiologis, perspektif yang relevan dikembangkan dalam penelitian ini adalah perspektif sosialisasi yang digagas oleh Peter L. Berger. Berger ialah seorang sosiolog yang memiliki sudut pandang “realitas sebagai konstruksi sosial”. Hal ini bermakna seseorang mampu berinteraksi dengan yang lain karena kebudayaan yang mengajarkannya (Ngangi, 2011). Penguasaan norma tidak bersifat kodrati (biologis), tetapi dilakukan dengan proses belajar (Narwoko & Suyanto, 2007). Maka dalam perspektif Bergerian, setiap anggota baru sebuah masyarakat akan melalui suatu proses yang dinamakan sosialisasi atau belajar menjadi anggota masyarakat dengan memahami peran-peran yang ada (Sunarto, 2004). Dalam hal ini, seseorang yang berstatus sebagai anak dituntut untuk berperan sebagaimana harapan sistem yang ada pada masyarakat itu sehingga memungkinkan individu konform dengan segala norma yang ada (Narwoko & Suyanto, 2007).

Proses sosialisasi melibatkan tiga peristiwa yang berlangsung secara simultan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990). Dalam konteks masyarakat Aceh, kehadiran norma-norma sosial di tengah masyarakat adalah hasil eksternalisasi di masa lalu. Pada kenyataannya pengaruh Islam begitu kuat mengakar di Aceh (Samad, 2015). Tatanan kebudayaan tersebut lahir sebagai hasil eksternalisasi dan dialektika antara ajaran Islam dan nilai-nilai nenek moyang bangsa Aceh yang sudah berlangsung sangat lama. Hal ini mengendap dan menghasilkan adat dan tradisi yang diwariskan kepada generasi baru. Kemudian melalui suatu proses pelembagaan (institusionalisasi) menghasilkan pembiasaan (habitualisasi) (Sulaiman, 2016). Tahap ini adalah tahap obyektivasi. Contohnya “mencium tangan orang tua” adalah hasil dari pentradisian dan pewarisan pengalaman dari generasi ke generasi yang merupakan wujud dari norma kesopanan dan karakter anak yang berakhlak mulia. Obyektivasi ini membutuhkan legitimasi melalui agama Islam sebagai hirarki norma tertinggi bagi masyarakat Aceh.

Selanjutnya proses internalisasi makna termanifestasi dari proses-proses subjektif orang lain (orang tua, guru, teman sebaya, dan lain-lain) yang dengan demikian menjadi bermakna

subjektif bagi individu tersebut (Dharma, 2018). Internalisasi berlangsung seumur hidup melibatkan sosialisasi, baik primer maupun sekunder. Sosialisasi primer dialami oleh individu pada masa kanak-kanak. Dalam hal ini keluarga dan sekolah adalah agen sosialisasi yang bertindak “mewakili masyarakat” dalam membentuk karakter anak agar sesuai dengan harapan-harapan sosial sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Bagan 1. Teori Konstruksi Sosial Budaya



Sumber: Berger & Luckmann, 1990: 185.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka menata kehidupan masyarakat yang tertib sebab tertib sosial tidak mungkin bisa terwujud dengan sendirinya. Jadi dapat dipahami bahwa sosialisasi memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama, sosialisasi membantu individu berpartisipasi secara baik di dalam masyarakat. Kedua, sosialisasi menjaga kelestarian masyarakat beserta tatanan sosialnya (Herabudin, 2015). Maka dalam perspektif Berger eksistensi manusia yang utuh hanya mungkin ada di dalam masyarakat, begitu pun sebaliknya, eksistensi masyarakat hanya mungkin ada karena aktivitas manusia sebagai penciptanya (Harold, 2016).

Sosialisasi diharapkan membentuk karakter yang baik dan unggul. Karakter dapat didefinisikan sebagai sifat-sifat khas yang menandai kepribadian individu atau sekumpulan individu (Effendi, 2015). Karakter adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir (Narwanti, 2011). Wynne dalam Zubaidi (2011) menjelaskan bahwa karakter berfokus pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Pada satu sisi, karakter masyarakat dibentuk oleh proses pembelajaran perilaku. Pada konteks ini, karakter menjadi bagian dari proses

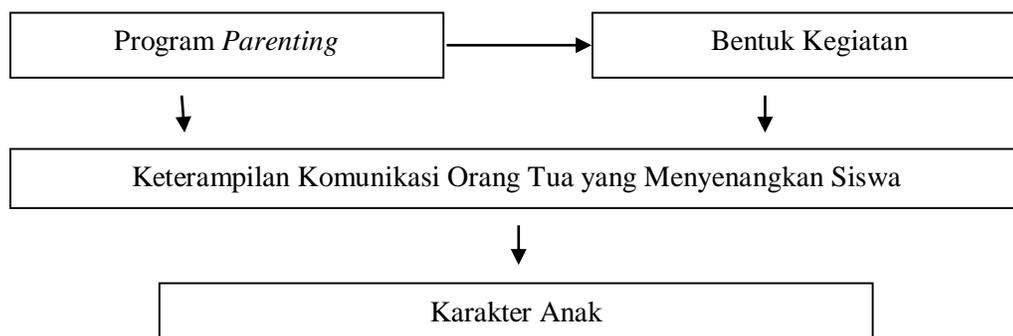
pembudayaan yang dilakukan para individu dalam lingkup kolektif dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya dalam konteks kebudayaannya sendiri (Effendi, 2015).

Pola Parenting

Parenting atau pola asuh adalah segala hal yang mencakup apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua/pengasuh dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung terhadap perkembangan anak (Roesminingsih, 2010). Menurut Kagan dalam Jahja (2011: 39) *parenting* adalah serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh agar anak mampu bertanggungjawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua atau pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan melakukan kewajibannya dengan baik.

Program *parenting* merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan antara guru, orang tua, dan siswa. Melalui program *parenting* segala aktivitas siswa dapat terkontrol dengan baik. Kegiatan ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dari orang tua agar siswa tidak merasa terlalu dikekang dan diatur. Djamarah (2014) mengemukakan beberapa macam tipe *parenting* atau pola asuh orang tua, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, kharismatik, dan transaksi. Program *parenting* berupaya menjadikan orang tua lebih berkualitas, tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai pengasuhan saja, tetapi juga dibekali keterampilan-keterampilan khusus agar orang tua mampu menyesuaikan perkembangan anak sebagaimana ilustrasi berikut ini:

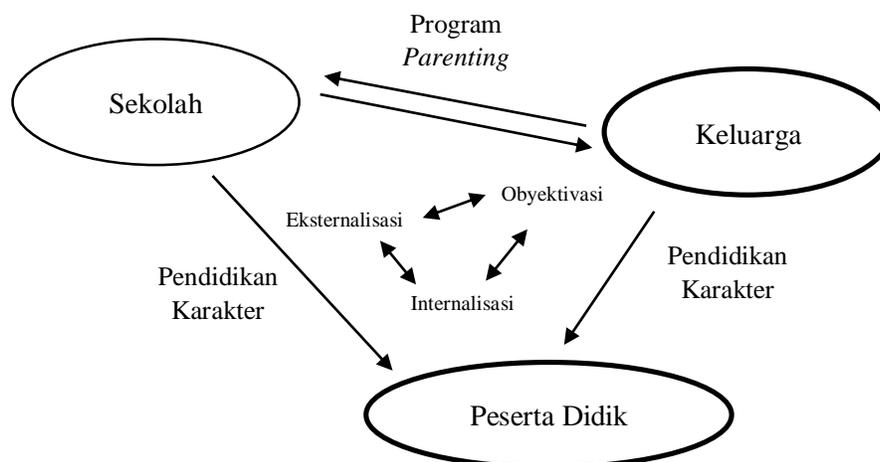
Bagan 2. Skema Program *Parenting*



Hasbullah (2003) menegaskan bahwa tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sementara Goode dalam Suhada (2016) berpendapat keluarga memiliki beberapa fungsi yakni pengaturan seksual,

reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, dan kontrol sosial. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi. Hal ini dimungkinkan karena keluarga sebagai kelompok primer yang selalu bertatap muka diantara anggotanya, hubungan emosional yang kuat, dan hubungan sosial yang tetap (Setiadi & Kolip, 2011: 177).

Bagan 3. Bagan Alir Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan dengan ciri rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Sekolah Dasar Negeri 6 Bireuen. Pertimbangan memilih lokasi ini atas dasar keunikan dimana SD Negeri 6 Bireuen merupakan salah satu dari dua sekolah dasar di Kabupaten Bireuen yang menerapkan program *parenting* dalam proses pembelajaran sehari-hari dan dinilai paling berhasil dalam menerapkan program *parenting*. Informan ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Subjek penelitian ini diantaranya pejabat sekolah, guru, orang tua, siswa, Komite Sekolah, dan masyarakat yang ikut serta atau berpartisipasi dalam program *parenting*. Desain penelitian dibagi dalam empat tahap (Moeleong, 2010) antara lain tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian bermakna peneliti terlibat dalam seluruh tahapan penelitian (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara analisis data merujuk pada Miles & Huberman dalam Sugiyono (2012),

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh melalui tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola *Parenting* dalam Membentuk Karakter Siswa

Sejak diterapkan program *parenting*, sekolah membuat brosur yang berisikan komitmen aturan sekolah yang harus disepakati oleh pihak orang tua yang anaknya akan bersekolah di SD Negeri 6 Bireuen. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi pertanyaan atau keberatan dari orang tua di kemudian hari untuk terlibat dalam proses pendidikan karakter anak di rumah. Hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah memperkuat temuan ini yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program *parenting* ini pihak sekolah membuat kesepakatan dengan orang tua terkait pengawasan kegiatan anak di rumah. Kegiatan ini dituangkan dalam brosur komitmen orang tua yang anaknya akan bersekolah di SD ini. Hal ini merupakan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan, brosur ini dinamai laman keluarga”. (Anita, S.Pd, SD Negeri 6 Bireuen, 13/01/2020).

Laman/brosur kegiatan orang tua dan guru/pihak sekolah ini berisikan catatan komunikasi antara orang tua dan guru tentang kegiatan siswa di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan yang sudah disepakati bersama-sama yang kemudian dijalankan oleh pihak sekolah selaku pelaku utama dan orang tua selaku pihak kedua berkontribusi besar dalam menyukseskan program *parenting* di SD Negeri 6 Bireuen. Catatan-catatan yang diberikan berhubungan dengan perkembangan siswa dan capaian-capaiannya. Maka yang disampaikan bukan laporan yang negatif saja, tetapi juga laporan yang positif.

Tabel 1. Laman Laporan Guru Kelas

IDENTITAS SISWA	KETERANGAN
Nama Siswa	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Ruang	:
Guru Kelas	:
IDENTITAS ORANG TUA	KETERANGAN
Nama Ibu	:
Nama Ayah	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
No. Hp	:

JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1. Penggunaan HP di sekolah	Membawa HP ke sekolah dan menggunakan di saat jam belajar
2. Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak hadir di sekolah selama 3 hari tanpa keterangan 2. Sakit 1 hari (diinfokan oleh orang tua via telepon seluler) 3. Izin 1 hari (orang tua menginformasikan langsung ke sekolah dengan menjumpai wali kelas)
3. Catatan Putih Siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama di kelas 2. Selama di kelas siswa tergolong ke dalam siswa yang aktif 3. Aktif melakukan komunikasi dengan sesama teman di dalam kelas
4. Catatan Hitam Siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak hadir ke sekolah selama 3 hari tanpa informasi dari orang tua. 2. Melewatkan beberapa tugas kelas yang diberikan akibat dari ketidakhadiran di sekolah 3. Mudah teralih fokus belajar jika ada teman yang mengajak bermain 4. Ada beberapa pekerjaan rumah yang berupa karya seni yang tidak dikumpulkan
SARAN ORANG TUA	
TTD ORANG TUA/WALI	

Sumber: Dokumen SD Negeri 6 Bireuen

Terkait pelaksanaan program *parenting* Waka Kurikulum menjelaskan bahwa pihak sekolah juga mengadakan kegiatan khusus yang dibuat untuk orang tua/wali siswa. Kegiatan tersebut dinamakan kelas orang tua (*parent class*). Waka Kurikulum mengatakan:

“Selain kegiatan tersebut, sekolah juga melaksanakan kelas orang tua (*parent class*) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Pertemuan ini wajib dihadiri oleh orang tua. Tema pertemuan disepakati bersama orang tua, sedangkan narasumbernya dapat berasal diantara orang tua atau narasumber lain sesuai kesepakatan. Waktunya pun apakah akan menggunakan hari kerja dan jam kerja, hari kerja tetapi sore hari (di luar jam kerja), atau mungkin hari libur. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan pencerahan terhadap masalah tertentu yang ingin diketahui terutama terkait perkembangan anak di sekolah”. (Annisa, S.Pd, SD Negeri 6 Bireuen, 13/01/2020)

Pertemuan orang tua merupakan kegiatan rutin yang diinisiasi oleh pihak SD Negeri 6 Bireuen. Dalam pertemuan tersebut terjadi transfer pengetahuan baik dari pihak sekolah kepada orang tua atau pun sebaliknya. Selain itu, pertemuan tersebut sangat memungkinkan untuk mengundang narasumber eksternal, baik itu akademisi, praktisi pendidikan, psikolog, maupun pemerintah. Semuanya memberikan inspirasi, motivasi, dan bekal pengetahuan bagi orang tua dan guru agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses tumbuh kembang anak dan pembentukan karakternya.

Selain mengadakan kegiatan pertemuan orang tua, dalam program *parenting* ini dilakukan pula kegiatan kunjungan rumah (*home visit*). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas,

selain proses penugasan yang diberikan oleh guru kepada orang tua, ada juga proses kunjungan rumah yang diadakan setiap Semester seperti disampaikan:

“Salah satu tugas saya sebagai guru kelas saya harus mengadakan *home visit* ke setiap rumah siswa yang dilaksanakan satu Semester sekali, dalam kunjungan rumah tersebut saya dibekali dengan brosur notulensi yang berisikan tentang riwayat kondisi rumah siswa sampai pada penggunaan fasilitas di rumah.” (Darmiati, SD Negeri 6 Bireuen, 14/01/2020)

Tabel 2. Notulensi Kunjungan ke Rumah Siswa

No	Informasi yang digali	Informasi yang diperoleh
1	Riwayat lahir dan kesehatan	Lahir dengan normal tidak ada riwayat penyakit
2	Latar belakang keluarga	Keluarga tidak memiliki riwayat penyakit, sudah mulai beradaptasi dengan peraturan SD Negeri 6 Bireuen
3	Interaksi dengan ayah dan ibu	Interaksi antara ayah dan anak masih perlu diberikan bimbingan dikarenakan anak masih belum bisa mengatur bahasa dengan baik. Jika diminta bantuan, anak masih lama untuk mengerjakannya
4	Ibadah di rumah	Anak sudah menyadari bahwa shalat wajib dilakukan, hanya saja perlu diingatkan seperti shalat Subuh dan Ashar
5	Adab di rumah dengan orang tua, kakak adik, orang yang tinggal di rumah dan teman	Ketika berhadapan dengan kakak/abangnya masih ingin menang sendiri dan kurang mau berbagi
6	Proses belajar di rumah (Al Qur'an dan iman)	Anak belajar Al Qur'an di rumah bersama orang tua. Proses belajarnya sangat bagus, kedua orang tuanya memiliki cita-cita dan target yang tinggi
7	Jadwal bermain, nonton tv dan game	Tidak ada jadwal khusus untuk bermain, nonton tv dan game, apabila ingin bermain biasanya dilakukan di hari libur. HP hanya boleh digunakan jika berada dalam pantauan orang tua
8	Kondisi kamar tidur (apakah ada tv, gadget, gambar yang tidak diperkenankan)	Tidak terdapat benda-benda yang tidak diperkenankan di dalam kamar apalagi televisi dan gadget
9	Permasalahan atau hal lain yang disampaikan orang tua tentang anak	Permasalahan yang sering dihadapi adalah anak belum mandiri dan belum terbiasa meletakkan barang pada tempatnya
10	Pertanyaan seputar SD Negeri 6 Bireuen dan pembelajaran dari orang tua kepada guru	Sejauh ini orang tua sangat setuju dengan konsep SD Negeri 6 Bireuen
11	Saran dari ayah dan ibu untuk guru dan SD Negeri 6 Bireuen	Mohon banyak bersabar dengan kondisi anak yang masih dalam proses belajar
12	Saran dari guru untuk anak dan orang tua	Mohon untuk tidak terlalu mengedepankan ilmu dalam proses belajar mengajar

Sumber: Dokumen SD Negeri 6 Bireuen, data diolah kembali.

Selain lembar kegiatan siswa, dilakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) oleh wali kelas. Dalam pelaksanaan program *home visit* hal yang ditekankan untuk diperhatikan oleh guru adalah mulai dari etika anak dalam menerima tamu, kondisi hubungan dan interaksi setiap anggota

keluarga sampai kepada fasilitas yang digunakan oleh anak di rumah. Program *home visit* dilaksanakan sebagai bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh guru terhadap aktivitas anak di rumah yang melibatkan seluruh elemen keluarga dari ayah, ibu, saudara sampai kepada suasana rumah yang juga memberikan kontribusi pada proses belajar anak. Sebab rumah yang nyaman juga akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan pendidikan anak.

Perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan sedemikian rupa dalam menjalin hubungan komunikasi antara guru dan orang tua. Pada saat ini pihak sekolah sudah mengizinkan para orang tua meminta izin tidak masuk bila anaknya sakit atau ada keperluan lainnya melalui handphone. Syaratnya hal itu harus dilakukan langsung oleh ayah atau ibu dari siswa yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab orang tua atas keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Hasil wawancara terkait hal ini, salah seorang guru kelas menambahkan bahwa:

“Selalu ada koordinasi antara guru dan orang tua dalam bentuk apapun, misalnya ada siswa yang tidak masuk sekolah ini menjadi hal penting bahwa orang tua tidak boleh menitipkan izin anak melalui teman sekelasnya. Orang tua wajib mengabarkan langsung guru kelasnya melalui telpon atau melalui messenger. Hal ini memberikan kepekaan rasa peduli orang tua pada kondisi anak.” (Yusra, S.Pd, SD Negeri 6 Bireuen, 15/01/2020)

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan dokumen Lembar Kegiatan Siswa yang diawasi oleh orang tua terhadap aktivitas anak dalam membentuk karakter anak melalui proses pembiasaan terhadap hal-hal yang baik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Kegiatan Harian

No	Adab/Dzikir	Hari Ke-						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Dzikir pagi/sore	√	√	√	Sore	√	Sore	√
2	3 Qul ketika tidur	√	√	√	√	√	√	√
3	Mengucap salam (dimana saja)	√	√	√	√	√	√	√
4	Adab kepada orang tua	√	√	X	√	√	X	√
5	Adab menutup pintu dan jendela ketika sore	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Dokumen SD Negeri 6 Bireuen, 2019

Lembar Kegiatan Harian ini berisi kegiatan siswa yang mengarahkan anak pada perilaku dan pembentukan karakter yang baik yang dibimbing oleh orang tua sendiri. Para orang tua diwajibkan mengontrol kegiatan anak-anak di rumah yang berhubungan dengan adab setiap harinya. Orang tua ditugaskan membubuhkan tanda centang (√) jika anak-anak mengerjakan apa

yang diperintahkan dan membubuhkan tanda silang (X) jika tidak mengerjakannya. Selain itu, para orang tua juga ditugaskan untuk memantau dan mengontrol aktivitas peribadatan anak seperti berdzikir di waktu pagi atau sore hari. Salah seorang guru kelas menambahkan:

“Hasil yang ada dalam tabel kegiatan harian anak merupakan evaluasi untuk kegiatan anak setiap harinya yang akan diberikan kembali kepada gurunya pada setiap akhir pekan atau dalam jangka waktu satu minggu. Guru akan menanyakan kembali kepada siswa kenapa ada perilaku adab yang tidak dikerjakan. Selain dari pernyataan anak, orang tua siswa juga memberikan keterangan kepada guru mengenai kegiatan anak sehari-hari kenapa ada perilaku adab yang tidak dikerjakan”. (Mutia Sari, S.Pd, SD Negeri 6 Bireuen, 14/01/2020)

Keberadaan Lembar Kegiatan Siswa yang bersifat harian ini dapat digunakan oleh orang tua sebagai sarana untuk mengontrol anak. Lembar Kegiatan Siswa adalah representasi figur otoritas guru di rumah. Hal itu menjadi simbol yang disegani oleh anak. Pada beberapa keluarga, anak-anak yang sudah terlanjur manja dengan orang tuanya punya kecenderungan untuk tidak mendengar nasehat orang tua. Biasanya para orang tua akan memanfaatkan keberadaan Lembar Kegiatan Siswa sebagai “ancaman halus” bila anak melawan otoritas orang tuanya. Hal ini membuat anak berpikir dua kali untuk melawan perintah yang diberikan. Mengenai lembar kegiatan siswa pada saat pulang ke rumah, hasil wawancara dengan salah seorang siswa diperoleh keterangan bahwa:

“Pada saat pulang ke rumah saya memberikan salam kepada orang tua. Setelah itu saya berwudhu dan mengerjakan shalat Zhuhur. Ibu juga meminta saya untuk merapikan sendiri pakaian yang baru saya gunakan agar terbiasa.” (Niswa, SD Negeri 6 Bireuen, 17/01/2020)

Komite Sekolah yang memiliki fungsi sebagai perwakilan masyarakat juga memberikan kontribusi penuh dalam pelaksanaan program *parenting*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota Komite Sekolah keterlibatan masyarakat dalam bentuk ikut mengawasi perilaku siswa yang nakal seperti diungkapkan:

“Saya juga ikut memantau jalannya aktivitas sekolah. Rumah saya berada di dekat sekolah jadi cukup mudah untuk saya memantau kegiatan mereka, Pada saat jam istirahat saya memantau siswa mana yang keluar masuk pekarangan sekolah, siswa mana yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Saya juga selalu hadir jika ada undangan rapat di sekolah agar saya tahu selalu perkembangan sekolah.” (Nuraini, di sekitar SD Negeri 6 Bireuen, 17/01/2020)

Dengan demikian, masyarakat juga berfungsi sebagai perwakilan orang tua dan guru. Warga di sekitar sekolah seyogianya juga perlu dibangun citranya menjadi figur otoritas baru bagi siswa dan dihormati oleh siswa. Sebab kearifan lokal Aceh memang demikian halnya, namun pada saat ini sudah mulai terdegradasi sehingga banyak warga yang cuek dengan permasalahan di

sekitarnya. Program *parenting* secara spesifik juga bermanfaat dalam menghidupkan kembali nuansa keterlibatan masyarakat sebagai aktor pendidikan karakter anak.

2. Perubahan Karakter Siswa setelah Penerapan Program *Parenting*

Setelah penerapan program *parenting* dilakukan oleh SD Negeri 6 Bireuen mulai tampak perubahan karakter siswa. Perubahan karakter tersebut dapat dilihat dari perilaku siswa sehari-hari di rumah dan di sekolah. Hasil wawancara dengan siswa, orang tua, guru, demikian pula beberapa dokumen seperti lembar kegiatan siswa dan notulensi kunjungan ke rumah (*home visit*) menunjukkan perubahan perilaku anak. Salah satunya seperti dirasakan oleh guru kelas berikut:

“Sejak sekolah memberlakukan program *parenting* anak mulai terlihat santun dalam bersikap terutama nilai kejujuran mulai terasa, anak sudah dibiasakan untuk selalu berkata jujur meskipun salah, anak diajarkan sopan santun misalnya salam, sapa dan senyum. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang suka menjahili temannya sendiri.” (Yuniar Wati, S.Pd, SD Negeri 6 Bireuen, 06/07/2020)

Menurut para informan, beberapa karakter yang berhasil ditanamkan ke dalam diri siswa diantaranya kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab.

3. Pembahasan

Sosialisasi primer dan pengajaran norma pertama kali terjadi di dalam lingkungan keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lain yang sudah dewasa mengajari anak-anak tentang hal-hal yang dianggap perilaku yang pantas untuk konteks budaya mereka, seperti norma yang mengatur cara makan, cara berbicara, cara berpakaian, menjaga kesehatan dan kebersihan, cara beribadah, dan bagaimana berinteraksi dengan sikap sopan dan ramah dengan orang lain. Ketika masih kecil, individu mempelajari norma dari institusi sosial dan dari figur otoritas dalam kehidupannya. Dalam hal ini orang tua adalah figur otoritas terdekat. Sosialisasi mengajarkan anak-anak untuk mengontrol impuls biologis mereka. Proses sosialisasi juga membantu individu mengembangkan hati nurani yang selaras dengan norma sosial dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan berbagai peran. Anak-anak disosialisasikan agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh budaya setempat agar kelak dapat berfungsi dan berperan dalam masyarakat tempat ia tinggal.

Lembaga pendidikan, dalam hal ini SD Negeri 6 Bireuen sebagai institusi pendidikan formal, pada kenyataannya berfungsi sebagai agen sekaligus wadah dalam mempelajari norma-norma sosial masyarakat Aceh di wilayah Bireuen. Walaupun dalam kesadaran umum masyarakat sekolah lebih sering dianggap sebagai tempat mempelajari ilmu pengetahuan, ternyata realitasnya

sekolah juga memiliki fungsi mengajarkan norma-norma seperti etika saling berbagi, saling menghormati, berkolaborasi/bekerjasama, berdisiplin, bertanggungjawab, dan menerapkan budaya antri melalui peran para guru sebagai figur otoritas.

Pendidikan karakter melalui penerapan program *parenting* merupakan bagian dari proses sosialisasi. Hal ini melibatkan struktur sosial dan hubungan interpersonal yang dapat dianalisis dalam empat bagian kunci, yaitu **konteks**, **konten**, **proses**, dan **hasil**.

Pertama, **konteks** program *parenting*. Konteks kehidupan akan sangat mempengaruhi bagaimana proses sosialisasi berlangsung. Konteks mencakup sejarah dan peran yang dimainkan orang dan institusi di masa lalu. Masyarakat Aceh yang sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) sejak zaman dahulu berdampak besar pada esensi nilai dan norma yang disosialisasikan dan cara masyarakat mensosialisasikan nilai dan norma tersebut. Program *parenting* diadakan tidak terlepas dari latar belakang atau situasi perubahan sosial di tengah masyarakat Aceh yang kemudian mendorong perubahan sikap, perilaku, dan watak generasi muda yang cenderung tidak konform lagi dengan norma-norma sosial dan budaya masyarakat Aceh. Hal ini menjadi menarik karena institusi pendidikan selama ini sebenarnya sudah berjalan dalam fungsinya sebagai agen sosialisasi.

Demikian halnya yang terjadi di SD Negeri 6 Bireuen dalam skala yang lebih kecil. Setelah didiskusikan bersama, para pendidik di SD Negeri 6 Bireuen menemukan sebuah permasalahan kunci, yaitu tidak terintegrasinya upaya mengembangkan karakter anak antara sekolah dengan keluarga yang terjadi selama ini. Maka para praktisi pendidikan di SD Negeri 6 Bireuen bersepakat untuk membuat terobosan baru yang mampu membuka ruang komunikasi antara institusi pendidikan dan institusi keluarga dengan seluas-luasnya. Harapannya dari upaya membuka ruang komunikasi ini adalah terbangun pula ruang kerjasama antara guru dan orang tua ditambah dengan masyarakat sekitar sekolah. Tentunya hal ini juga setelah mengkaji atau menelaah sejumlah kebijakan dan rekomendasi dari Kemendiknas.

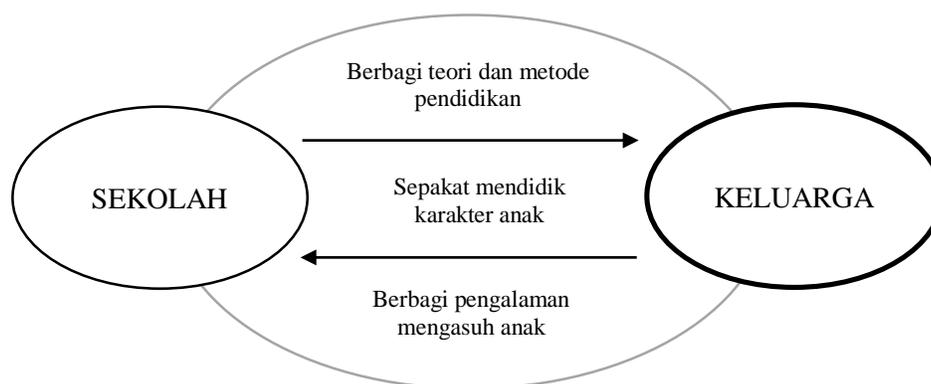
Kedua, **konten** yang diajarkan di dalam program *parenting*. Program *parenting* dibuat dengan tujuan menyamakan frekuensi kesepahaman antara guru dan orang tua tentang bagaimana memberikan pola pengasuhan terbaik bagi anak demi terwujudnya generasi muda yang berakhlakul karimah. Jadi konten utama yang disosialisasikan dalam program *parenting* ini menitikberatkan pada pola asuh. Adapun konten yang lainnya terkait tentang bagaimana merawat kesehatan anak, menyediakan asupan gizi yang cukup, dan melindungi anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Khusus di SD Negeri 6 Bireuen konten nilai-nilai keislaman sangat ditekankan penerapannya.

Secara kasat mata, konten ini tampaknya diberikan oleh sekolah kepada para orang tua secara searah dengan pertimbangan ketimpangan pengalaman pendidikan yang diperoleh antara guru dan orang tua. Namun dalam proses penerapannya di lapangan konten dikembangkan secara dialogis atau dua arah dimana para orang tua juga berkesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam rangka mengembangkan konten pola asuh yang terbaik dan cocok diterapkan dalam konteks masyarakat Bireuen.

Ketiga, **proses** sosialisasi melalui program *parenting*. Proses sosialisasi dilakukan dengan melibatkan skema eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi tentunya sudah dilakukan lama sekali oleh nenek moyang bangsa Aceh yang menghasilkan berbagai nilai dan norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma ini kemudian diperkuat kembali eksistensinya melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang sudah disesuaikan dan dimodifikasi dengan perkembangan teori dan metodologi pendidikan. Sekolah dalam hal ini berperan sebagai agen pemerintah dan agen masyarakat yang berfungsi sebagai wadah sosialisasi nilai dan norma yang bersentuhan langsung dengan para siswa.

Program *parenting* menghidupkan dialektika eksternalisasi-obyektivasi-internalisasi. Kelompok sasaran pertama tentunya adalah para orang tua. Dialektika antara institusi pendidikan dan institusi keluarga menyatukan kesepahaman tentang bagaimana pola asuh yang hendak diterapkan dan bagaimana mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap berjalannya program *parenting* ini. Institusi pendidikan menyediakan ruang informasi dan berbagi pengetahuan tentang perkembangan teoritis dan metodologis pola asuh anak kepada institusi keluarga. Sebaliknya institusi keluarga berbagi pengalaman-pengalaman mereka di rumah dalam mengasuh anak. Hal ini menghasilkan proses sosial yang berbentuk kerjasama.

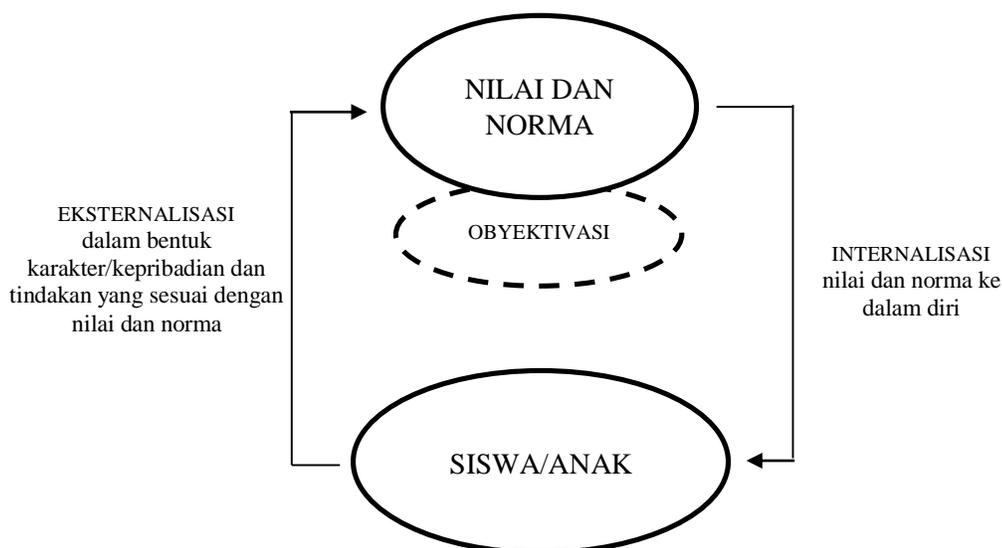
Bagan 4. Dialektika Sosialisasi Sekolah dan Keluarga



Pada tahap selanjutnya para guru dan para orang tua melakukan proses eksternalisasi nilai dan norma berdasarkan metode pendidikan karakter yang sudah disepakati atau sudah bersama-sama diobyektivasi. Nilai-nilai pendidikan karakter yang disosialisasikan kepada siswa/anak juga melewati proses obyektivasi oleh masing-masing siswa/anak. Proses obyektivasi ini menghasilkan pengetahuan dan pemahaman siswa/anak tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Siswa/anak sudah mengetahui karakter-karakter apa saja yang diharapkan secara sosial dan karakter-karakter apa saja yang tidak diharapkan secara sosial. Sampai pada tahap ini, para siswa/anak sudah berada pada level “mengetahui”, tetapi belum tentu “mau menjalani”.

Agar para siswa/anak mau/patuh untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang baik pada dirinya, maka masing-masing dari mereka harus melakukan proses internalisasi atau penghayatan yang selanjutnya menjadikan nilai dan norma masyarakat menjadi bagian dari dirinya atau mendarah-daging sehingga para siswa/anak tersebut timbul perasaan bersalah bila tidak menjalankan nilai dan norma yang sudah dianutnya.

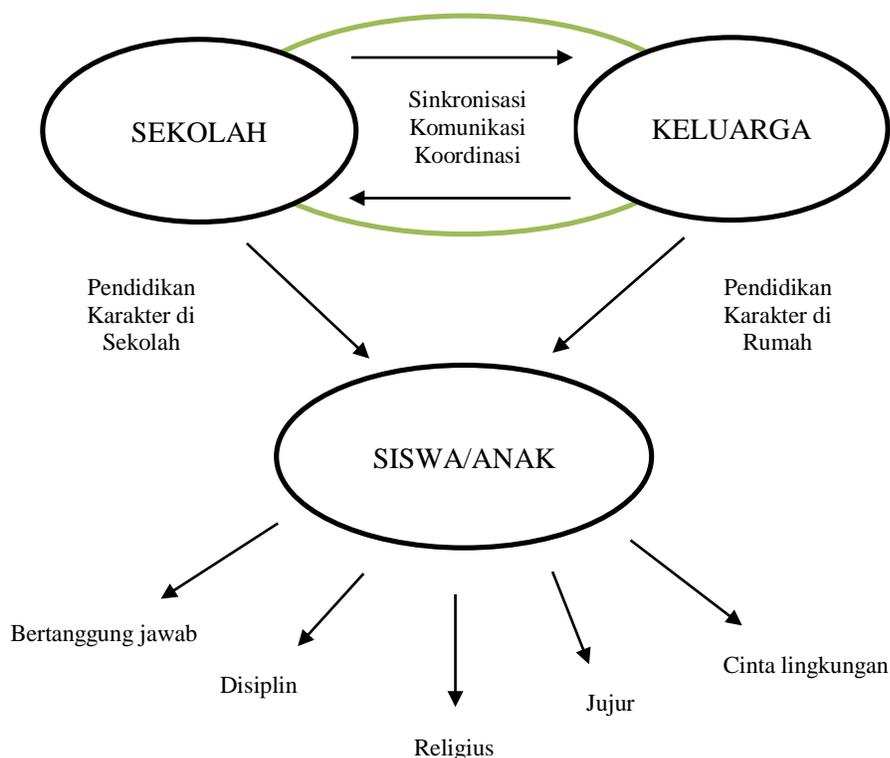
Bagan 5. Skema Sosialisasi Pendidikan Karakter Siswa SD Negeri 6 Bireuen



Internalisasi adalah sebuah proses yang melaluinya individu mengidentifikasi bagian budaya sebagai bagian dari dirinya sendiri, terutama dalam kaitannya dengan norma dan nilai. Proses internalisasi adalah tahapan krusial dalam memelihara sistem sosial karena hal itu mengarahkan anak untuk mengatur perilaku mereka sendiri sesuai dengan bentuk yang diterima oleh otoritas eksternal. Proses internalisasi ini dilakukan dalam jangka panjang pada setiap jenjang pendidikan.

Selain terkait dengan konteks, konten, dan proses, sosialisasi juga terkait dengan **hasil atau dampak**. Hasil pendidikan karakter melalui program *parenting* adalah perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku yang konform dengan harapan sosial. Beberapa nilai yang berhasil diinternalisasikan pada siswa antara lain nilai religius, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, dan nilai cinta lingkungan.

Bagan 6. Pola *Parenting* di SD Negeri 6 Bireuen



Adanya perubahan karakter pada diri para siswa/anak menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun melalui program *parenting* membuahkan hasil yang positif. Dengan kata lain, proses sosialisasi yang dijalankan oleh institusi pendidikan dan institusi keluarga dengan dibantu oleh masyarakat di lingkungan sekitar sekolah berhasil diwujudkan di SD Negeri 6 Bireuen. Hasil akhir dari program karakter ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang berakhlak mulia sehingga lahir karakter insan-insan yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemaslahatan umat dan tidak suka berbuat keonaran di tengah-tengah masyarakat.

Hasil sosialisasi bermuara pada cara seseorang berpikir dan berperilaku setelah menjalani proses sosialisasi. Dalam lingkungan keluarga dan sekolah sosialisasi melalui program *parenting* cenderung berfokus pada pengendalian impuls biologis dan emosional, seperti meminta izin

kepada orang tua atau guru ketika ingin melakukan sesuatu. Di samping itu, hasil sosialisasi melalui program *parenting* yang diterapkan di lingkungan sekolah antara lain mengetahui cara menunggu giliran (mengantri), mematuhi aturan, serta menghormati guru dan teman. Selain itu, siswa juga mempelajari kurikulum tersembunyi selama menjalani proses pendidikan di sekolah.

Sementara itu, stereotif gender juga memberikan pengaruh yang kuat selama berjalannya proses sosialisasi. Berdasarkan pengamatan harapan budaya untuk peran gender dan perilaku gender diberikan kepada peserta didik melalui pakaian seragam (siswa perempuan memakai rok, siswa laki-laki memakai celana), penampilan (siswa perempuan memakai jilbab, siswa laki-laki tidak boleh gondrong), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah juga mengajarkan anak-anak peserta didiknya untuk berpenampilan dan berkelakuan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat terhadap jenis kelamin yang disandangnya.

Sekolah merupakan sumber sosialisasi penting bagi siswa dari segala usia. Di kelas para siswa menerima pedoman yang berkaitan dengan perilaku, wewenang, jadwal, tugas, dan tenggat waktu. Pengajaran konten ini membutuhkan interaksi sosial antara pendidik dan siswa. Biasanya, aturan dan ekspektasi ditulis dan diucapkan, dan perilaku siswa dihargai atau dikenai sanksi. Saat hal ini terjadi, siswa mempelajari norma-norma perilaku yang sesuai untuk sekolah.

Selama sosialisasi, seseorang belajar menjadi anggota suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Proses ini tidak hanya membiasakan individu dengan masyarakat tetapi juga mempertahankan eksistensi masyarakat tersebut. Secara makro, sosialisasi memastikan anggota masyarakat memiliki proses yang melaluinya norma dan kebiasaan masyarakat ditransmisikan. Sosialisasi mengajarkan individu apa yang diharapkan dari mereka dalam kelompok atau situasi tertentu sehingga sosialisasi dapat disebut sebagai salah satu bentuk kontrol sosial.

KESIMPULAN

Pola yang dibentuk dalam program *parenting* dinamakan pola kemitraan antar pelaku pendidikan yang terdiri dari sekolah dan keluarga, serta didukung oleh masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Program *parenting* dapat berjalan karena setiap institusi sosial dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara baik. Pola kemitraan yang dimaksudkan adalah terbangunnya hubungan kerjasama yang baik, bermitra, dan berteman antara orang tua yang melakukan pendidikan di rumah dengan pihak sekolah yang memberikan pendidikan lanjutan di sekolah. Kemitraan ini ditujukan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter dan budaya prestasi siswa. Hal ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan melalui proses pembiasaan dan keteladanan.

Program *parenting* merupakan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan skema eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi nilai dan norma dalam rangka pembentukan karakter siswa. Perubahan karakter pada anak dapat ditandai dengan perubahan sikap sehari-hari yang mulai menjadi suatu kebiasaan. Tanpa perlu pemaksaan anak-anak sudah mulai terbiasa bersalaman dengan guru dan orang tua, serta memberikan perhatian kepada teman yang membutuhkan. Nilai pendidikan karakter yang berhasil diterapkan melalui program *parenting* di SD Negeri 6 Bireuen diantaranya:

1. Nilai religius: anak-anak mulai terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar, sudah mulai tidak ketinggalan shalat selama di rumah, saling mengucapkan salam dengan sesama teman, berjabat tangan dengan guru jika berjumpa, dan mencium tangan orang tua ketika pergi dan pulang sekolah.
2. Nilai disiplin: siswa masuk kelas tepat waktu, menyelesaikan tugas rumah, serta berpakaian yang rapi dan sopan.
3. Nilai tanggung jawab: siswa selalu mengerjakan tugas yang diberikan meskipun masih dibantu oleh orang tua dan berani bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.
4. Nilai cinta lingkungan: siswa terlihat mulai menjaga kebersihan pekarangan sekolah, diawali dengan kebersihan kelas sendiri dengan diadakannya aturan piket kelas setiap hari.
5. Nilai kejujuran: siswa sudah berani mengakui kesalahan terhadap teman dan guru serta sudah bersedia meminta maaf jika berbuat salah.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. SD Negeri 6 Bireuen perlu menambah kuantitas dan rutinitas kegiatan pertemuan orang tua dan hari konsultasi anak supaya hasil dari program *parenting* menjadi lebih optimal lagi.
2. SD Negeri 6 Bireuen perlu memperluas konsep *parenting* yang tidak hanya terfokus pada materi pola asuh anak. Para orang tua juga perlu dibekali dengan materi-materi lain yang berhubungan dengan perawatan kesehatan (terutama di masa pandemi Covid-19), asupan makanan yang bergizi, dan perlindungan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L. & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.
- Bidasari, S. (2019). Parenting: Metode Pembentukan Karakter Islam pada Anak Usia Dini di Kota Palangka Raya (Studi Kasus 3 Keluarga Islam). *Jurnal Sosiologi*, 2(1), 13-24.

- Dharma, F.A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9.
- Ganevi, N. (2013). Pelaksanaan Program Parenting bagi Orangtua dalam Menumbuhkan Perilaku Keluarga Ramah Anak (Studi Deskriptif di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Kota Bandung). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(2), 1-11.
- Harold, R. (2016). Agama dan Pembentukan Realitas dalam Pandangan Peter Ludwig Berger. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1), 139-159.
- Hasbullah (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hatimah, I. (2016). Keterlibatan Keluarga dalam Kegiatan di Sekolah dalam Perspektif Kemitraan. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 290-297.
- Hayati, F. & Mamat, N. (2014). Pengasuhan dan Peran Orang Tua (Parenting) serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak di PAUD Banda Aceh, Indonesia. *Jurnal Buah Hati*, 1(1), 16-30.
- Helmawati (2016). *Pendidikan Keluarga*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Herabudin (2015). *Pengantar Sosiologi*. CV Pustaka Setia.
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Prenada Media Group.
- Jamilah (2019). Kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini (Sinergi Tiga Pilar Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat). *Simulacra*, 2(2), 181-194.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Narwanti, S. (2011). *Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Nilai dalam Mata Pelajaran*. Familia.
- Narwoko, J. D. & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. *ASE*, 7(2), 1-4.
- Ningsih, F. D., Nasirun, M., & Yulidesni. (2018). Pelaksanaan Program Parenting di Lembaga PAUD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 3(2), 44-49.
- Roesminingsih (2010). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Bintang.
- Sa'adah, U. (2018). Interaksi Tiga Pilar Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 13(1), 21-33.
- Samad, S. A. A. (2015). Pengaruh Agama dalam Tradisi Mendidik Anak di Aceh: Telaah terhadap Masa Sebelum dan Pasca Kelahiran. *Jurnal Gender Equality*, 1(1), 111-123.
- Setiadi, E. M. & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana.
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhada, I. (2016). *Ilmu Sosial Dasar*. PT Remaja Rosdakarya.

- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*, 6(1), 15-22.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wulandary, D. & Herlisa (2017). "Parent Involvement in Schooling Processes: A Case Study in an Aceh School". *Tesis*. Faculty of Education University of Tampere, Finlandia.
- Zubaidi (2011). *Desain Pendidikan Karakter*. Kencana Prenada Media.

PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE

Novika Rahnayanti, Muhammad Bin Abubakar ¹⁾, M. Akmal

¹ Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Malikussaleh, muhd.a.bakar@gmail.com

ABSTRACT

Participation rate of men in the use of contraception in Banda Sakti district Kota Lhokseumawe is still very low, at only 0,005%, it's under the national target of 5%. The purpose of this study was to determine the factors associated with men's participation in Family Planning Program in the working area of Banda Sakti District. This type of research was observational with a cross-sectional approach in 20 Juli 2020 - 8 August 2020, using a questionnaire on 66 respondents. This research was using simple random sampling technic. The result showed that there were 27,3% of respondents who participated in family planning (25,8% condoms and 1,5% vasectomy) and 72,7% of respondents not participated in family planning. Based on the result of this research, there was significant correlation between quality of service (p value = 0,003, OR = 11,200), knowledge (p value = 0,009, OR = 14,385) and social culture (p = 0,000, OR = 13,300) with male participation in family planning. There was no correlation between socio demographic (education, income and number children) and access to family planning services with male participation in family planning. It is recommended for managers of Family Planning Program in Banda Sakti district to provide more intensive counseling, increasing socialization of equality, so the participation of men in the Family Planning Program is no longer considered something which is taboo or embarrassing and improving cooperation across sector.

Keywords: Men Participation, Family Planning, MOP/Vasektomi, Condom

ABSTRAK

Partisipasi pria dalam Program Keluarga Berencana khususnya penggunaan kontrasepsi di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih sangat rendah di angka 0,005%, hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pria dalam mengikuti Keluarga Berencana (akseptor kondom dan MOP) di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini berupa observasional dengan metode pendekatan *cross-sectional* yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 2020 sampai 8 Agustus 2020, menggunakan kuesioner pada 66 responden, dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 27,3% responden yang ikutserta dalam Program Keluarga Berencana dimana 25,8% menggunakan kontrasepsi kondom dan 1,5% menggunakan kontrasepsi vasektomi/MOP, sedangkan responden yang tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 72,7%, serta adanya hubungan yang bermakna antara faktor kualitas pelayanan (p value = 0,003, OR = 11,200), pengetahuan (p value = 0,009, OR = 14,385) dan budaya (p = 0,000, OR = 13,300) dengan keikutsertaan pria dalam Program Keluarga Berencana. Tidak ada hubungan bermakna antara sosio demografi (pendidikan, pendapatan, dan jumlah anak) dan akses pelayanan dengan keikutsertaan pria dalam ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Disarankan bagi pengelola KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk memberikan penyuluhan yang lebih intensif, meningkatkan sosialisasi tentang kesetaraan, sehingga keikutsertaan laki-laki dalam Program KB tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan sehingga meningkatkan kerjasama lintas sektor.

Kata Kunci: Partisipasi Pria, Keluarga Berencana, MOP/vasektomi, Kondom

PENDAHULUAN

Sejak penandatanganan kesepakatan Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1994, Program Keluarga Berencana di Indonesia mengikuti arus paradigma baru. Hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender menjadi agenda utama yang wajib diperhatikan dalam pendekatan ini, tidak lagi bertumpu pada sekedar program pengendalian populasi dan penurunan fertilitas. Konsekuensinya adalah partisipasi pria dalam Program Keluarga Berencana perlu senantiasa ditingkatkan, sementara kaum wanita diberdayakan agar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas (<http://www.bkkbn.go.id>). Hal ini bermuara pada optimalisasi pemenuhan kesejahteraan dan kebahagiaan (Rizal & Yulini, 2016).

Konferensi Kairo sudah 26 tahun berlalu. Namun realitasnya masih ditemukan kendala seperti keengganan kaum pria untuk ikutserta dalam Program Keluarga Berencana. Menurut Sutinah (2017), pertimbangan sosial ekonomi mendominasi munculnya resistensi dari para laki-laki yang menolak berpartisipasi. Metode vasektomi dalam Program Keluarga Berencana dianggap mengeluarkan biaya tinggi. Sementara di dalam ruang sosial berkembang asumsi bahwa metode vasektomi dapat menurunkan kejantanan dan menyebabkan impotensi yang kontradiktif dengan harapan masyarakat karena terdapat pandangan bahwa kejantanan diukur dengan jumlah anak yang banyak. Selain itu, pola pikir lain yang terbentuk di benak pemangku kebijakan ialah bahwa mengandung dan melahirkan adalah kodrat wanita sehingga kaum wanita sajalah yang berkewajiban menggunakan alat kontrasepsi. Menjadikan wanita sebagai satu-satunya kelompok sasaran (*target group*) dapat diukur dari dominasi pengadaan alat kontrasepsi yang diperuntukkan untuk perempuan (Sumadi, 2007).

Partisipasi pria dalam Program Keluarga Berencana masih rendah secara nasional. Demikian pula halnya dalam lingkup Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Studi Finola (2016) menemukan bahwa keikutsertaan vasektomi/MOP masih tergolong rendah di Kecamatan Banda Sakti. Hal ini didorong oleh masih minimnya pengetahuan tentang metode tersebut. Berdasarkan data tahun 2018 dan 2019, pemakai kontrasepsi vasektomi sebanyak 0 akseptor. Padahal sudah tersedia fasilitas yang cukup memadai sehingga masyarakat seharusnya dapat dengan mudah mengakses pelayanan KB dengan metode vasektomi.

Rendahnya jumlah partisipasi pria ber-KB di Kecamatan Banda Sakti mendorong peneliti untuk melakukan kajian akademis dengan judul **Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis observasional dan metode *cross-sectional*. Populasi penelitian sebanyak 131 orang, terdiri dari para akseptor pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari jumlah populasi tersebut ditentukan sampel penelitian sebanyak 66 orang dengan menggunakan metode *random sampling* (Arikunto, 2002). Data kemudian dikumpulkan dari sampel tersebut melalui penyebaran angket/kuesioner setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas terlebih dahulu (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat (Supranto, 2000; Suharyadi & Purwanto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 km². Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,93%, jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 203.284 jiwa, tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu, dan Kecamatan Banda Sakti (BPS, 2019).

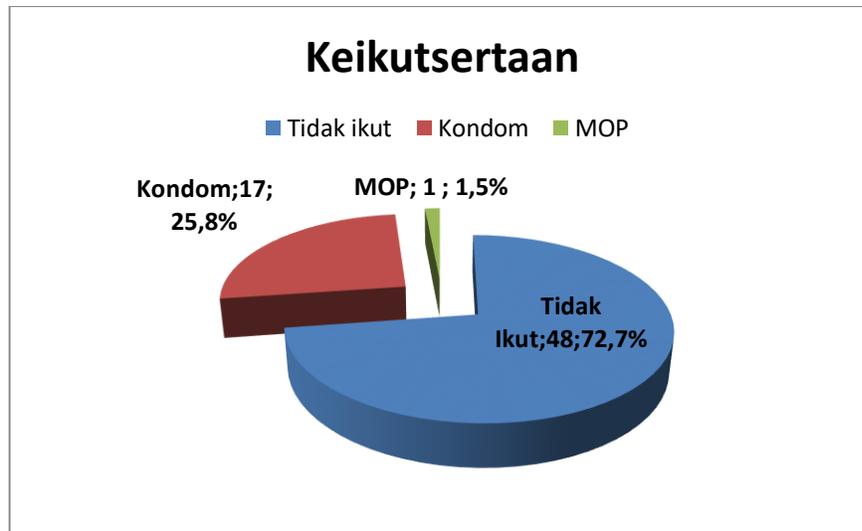
Kecamatan Banda Sakti mempunyai luas wilayah 11,24 km², terdiri dari 18 Gampong/Desa dan 2 Kemukiman. Kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti yaitu 945 jiwa/km². Terdapat 10 fasilitas kesehatan di Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Banda Sakti dan Puskesmas Mon Geudong, Rumah Sakit Tk IV/ Kesrem, Rumah Sakit Umum Sakinah, Rumah Sakit Melati, Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby, Rumah Sakit Kasih Ibu, Klinik Vinca Rosea, Klinik Lhokseumawe Husada, dan Klinik Olasvi.

2. Karakteristik Responden

Responden yang paling banyak berumur 31-40 tahun sebesar 48,5%, sedangkan responden yang paling sedikit dari kelompok umur 51-60 tahun yaitu sebesar 4,5%. Pendidikan responden yang paling banyak SLTA-Perguruan Tinggi sebesar 77,3%, diikuti lulus SD-SLTP sebesar 22,7%. Pekerjaan responden paling banyak yaitu pegawai swasta sebesar 39,4%, diikuti petani 18,2%, pedagang 16,7%, lain-lain 13,6%, dan PNS 12,1%. Jumlah anak responden paling banyak yaitu lebih kecil atau sama dengan 3 sebesar 62,1%, diikuti jumlah anak lebih besar dari 3 orang sebesar 37,9%.

a. Analisis Univariat

Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur



Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2020.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan hanya sebagian kecil responden menjadi akseptor KB. Dari 66 responden hanya 17 orang (25,8%) menggunakan kondom dan hanya 1 orang (1,5%) menggunakan MOP. Sementara 48 orang (72,7%) tidak menjadi akseptor KB.

b. Analisis Bivariat

1) Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Sosio Demografi

Faktor sosio demografi terdiri dari variabel pendidikan, variabel pendapatan, dan variabel jumlah anak. Gambaran tentang responden berdasarkan variabel faktor sosio demografi terlihat pada Tabel 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang (18,2%) yang berpendidikan SD sampai SLTP tidak menggunakan kontrasepsi, sedangkan yang berpendidikan SLTA sampai perguruan Tinggi sebanyak 36 orang (54,5%) tidak menggunakan kontrasepsi. Responden dengan pendidikan SD sampai SLTP yang menggunakan kondom 3 orang (4,5%) dan yang berpendidikan SLTA sampai Perguruan Tinggi yang menggunakan kondom sebanyak 14 orang (21,2%). Keikutsertaan responden MOP hanya 1 orang (1,5%) dengan tingkat pendidikan SLTA-Perguruan Tinggi.

Selanjutnya peneliti melakukan uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai $0,710 >$ nilai sig α (0,05)

merepresentasikan signifikansi probabilitas tingkat pendidikan suami dengan keikutsertaan menjadi akseptor KB.

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Faktor Sosio Demografi di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Keikutsertaan	Pendidikan				Sig (P)
	SD-SLTP		SLTA-PT		
	f	%	f	%	
Tidak ikut	12	18,2	36	54,5	0,71
Kondom	3	4,5	14	21,2	
MOP	0	0	1	1,5	
Total	15	22,8	51	77,3	
	Pendapatan				
	<= Rp.3.000.000		> Rp.3.000.000		
	f	%	f	%	
Tidak ikut	22	33,3	26	39,4	0,636
Kondom	7	10,6	10	15,2	
MOP	0	0	1	1,5	
Total	29	44	37	56,1	
	Jumlah Anak				
	> 3 orang		<= 3 orang		
	f	%	f	%	
Tidak ikut	20	30,3	28	42,4	0,181
Kondom	4	6,1	13	19,7	
MOP	1	1,5	0	0	
Total	25	37,9	41	62,2	

Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2020.

Selanjutnya hasil penelitian distribusi responden berdasarkan pendapatan diperoleh hasil bahwa pendapatan lebih besar dari Rp.3.000.00,- sebanyak 37 orang (56,1%) dan pendapatan lebih kecil dari Rp.3.000.000,- sebanyak 29 orang (43,9%). Uji statistik Chi-Square menggambarkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai 0,636 > nilai sig α (0,05) merepresentasikan signifikansi probabilitas tingkat pendapatan dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB. Pembuktian ini menegaskan tidak ada keterkaitan yang signifikan antara tingkat pendapatan suami dengan keikutsertaan menjadi akseptor KB.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden yang memiliki anak lebih kecil atau sama dengan 3 orang sebanyak 41 orang (62,1%) dan yang memiliki anak lebih dari 3 orang sebanyak 25 orang (37,9%). Uji statistik Chi-Square menggambarkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai $0,181 > \text{nilai sig } \alpha (0,05)$ merepresentasikan signifikansi probabilitas jumlah anak dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB. Pembuktian ini menegaskan tidak ada keterkaitan yang signifikan antara jumlah anak dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB.

2) Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Tabel 2 dapat diperoleh gambaran bahwa responden yang menilai kualitas pelayanan baik 30,3% tidak menggunakan KB, 22,7% menggunakan kondom, dan 1,5% menggunakan MOP. Sedangkan responden yang menilai kualitas pelayanan kurang baik 42,4% tidak menggunakan KB, 3,0% menggunakan kondom, dan 0% menggunakan MOP.

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Kualitas Pelayanan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Keikutsertaan	Kualitas Pelayanan				Total		Sig (p)
	Kurang Baik		Baik		F	%	
	f	%	f	%			
Tidak ikut	28	42,4	20	30,3	48	73	0,003
Kondom	2	3	15	22,7	17	26	
MOP	0	0	1	1,5	1	1,5	
Total	30	45,5	36	54,5	66	100	

Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2020.

Uji statistik Chi-Square menggambarkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai $0,003 < \text{nilai sig } \alpha (0,05)$ merepresentasikan signifikansi probabilitas kualitas pelayanan dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB. Pembuktian ini menegaskan terdapat keterkaitan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB.

3) Distribusi Responden Berdasarkan Faktor yang Berhubungan dengan Akses Pelayanan

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Faktor Akses Pelayanan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Keikutsertaan	Akses Pelayanan				Total		Sig (p)
	Sulit Mengakses		Mudah Mengakses		F	%	
	f	%	f	%			
Tidak ikut	19	28,8	29	43,9	48	73	0,374
Kondom	4	6,1	13	19,7	17	26	
MOP	0	0	1	1,5	1	1,5	
Total	23	34,8	43	65,2	66	100	

Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2020.

Hasil analisis hubungan antara akses pelayanan dengan partisipasi pria sebagai akseptor KB diperoleh sebanyak 29 orang (43,9%) pria dengan kemudahan mengakses pelayanan KB tidak menggunakan kontrasepsi dan 19 orang (28,8%) pria dengan kesulitan mengakses pelayanan KB tidak menggunakan kontrasepsi. Sedangkan 13 orang (19,7%) pria dengan kemudahan mengakses pelayanan KB menggunakan kondom, 4 orang (6,1%) pria dengan kesulitan mengakses pelayanan kesehatan menggunakan kondom, dan 1 orang (1,5%) pria dengan kemudahan mengakses pelayanan KB menggunakan MOP.

Uji statistik Chi-Square menggambarkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai $0,374 >$ nilai sig α (0,05) merepresentasikan signifikansi probabilitas akses pelayanan dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB. Pembuktian ini menegaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan yang signifikan antara akses pelayanan dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB.

4) Distribusi Responden Berdasarkan Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa responden yang memiliki pengetahuan tinggi 24,2% menggunakan kondom dan 1,5% menggunakan MOP, sedangkan 39,4% tidak menggunakan KB. Sementara responden yang memiliki pengetahuan rendah 1,5% menggunakan kondom, sedangkan sebanyak 33,3% tidak menggunakan kontrasepsi.

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Faktor Pengetahuan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Keikutsertaan	Pengetahuan				Total		Sig (p)
	Rendah		Tinggi		F	%	
	f	%	f	%			
Tidak ikut	22	33,3	26	39,4	48	73	0,009
Kondom	1	1,5	16	24,2	17	26	
MOP	0	0	1	1,5	1	1,5	
Total	23	34,8	43	65,2	66	100	

Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2020.

Uji statistik Chi-Square menggambarkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai $0,009 < \text{nilai sig } \alpha (0,05)$ merepresentasikan signifikansi probabilitas pengetahuan dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB. Pembuktian ini menegaskan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara pengetahuan tentang KB dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB.

5) Distribusi Responden Berdasarkan Faktor yang Berhubungan dengan Budaya

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Faktor Budaya di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Keikutsertaan	Budaya				Total		Sig (p)
	Tidak Mendukung		Mendukung		F	%	
	f	%	f	%			
Tidak ikut	38	57,6	10	15,2	48	73	0,000
Kondom	4	6,1	13	19,7	17	26	
MOP	0	0	1	1,5	1	1,5	
Total	42	63,6	24	36,4	66	100	

Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2020.

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa proporsi budaya yang tidak mendukung 38 orang (57,6%) lebih besar daripada dengan budaya yang mendukung 10 orang (15,2%) pada responden penelitian pria yang memilih untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi. Sementara proporsi budaya yang tidak mendukung 4 orang (6,1%) lebih kecil daripada budaya mendukung 13 orang (19,7%) pada responden penelitian pria yang memilih untuk menggunakan kondom, sedangkan 1 orang (1,5%) responden dengan kebudayaan mendukung menggunakan MOP.

Uji statistik Chi-Square menggambarkan bahwa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe nilai $0,000 < \text{nilai sig } \alpha (0,05)$ merepresentasikan signifikansi probabilitas budaya dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB. Pembuktian ini menegaskan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara budaya tentang KB dengan keikutsertaan suami menjadi akseptor KB.

3. Analisis

a. Hubungan Sosio Demografi dengan Keikutsertaan Pria Mengikuti KB

Hasil analisa bivariat pendidikan dengan nilai P value = 0,860, OR= 1,667. Hal ini menggambarkan tidak ada keterkaitan yang berarti antara tingkat pendidikan dengan keikutsertaan suami dalam Program Keluarga Berencana. Temuan ini memperkuat pernyataan BKKBN (2000) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh jika dikaitkan dengan masalah KB pria karena dalam KB pria tidak dituntut orang yang berpendidikan tinggi menggunakan kontrasepsi.

Hasil analisis hubungan keikutsertaan pria dengan jumlah pendapatan total keluarga per bulan diperoleh (P=0,636, OR = 1,330), menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penghasilan total keluarga dengan keputusan menggunakan kontrasepsi pria. Hasil penelitian ini menjadi antitesa studi Sihombing (2018) yang menyimpulkan terdapat hubungan antara penghasilan keluarga dengan keikutsertaan pria menggunakan kontrasepsi.

Sementara itu, terkait dengan jumlah anak diperoleh p value = 0,181, OR = 1,857 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anak hidup dengan keputusan pria ikutserta dalam Program Keluarga Berencana. Temuan ini memperkuat studi Darajatun & Hassan (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat keterkaitan yang signifikan antara jumlah anak dengan kepesertaan pria dalam Program Keluarga Berencana.

b. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Keikutsertaan Pria Mengikuti KB

Hasil analisis menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan kontrasepsi pria (p value = 0,003), nilai OR = 11,200

yang berarti bahwa pria yang mendapat kualitas pelayanan baik mempunyai peluang 11,200 kali lebih besar dibandingkan dengan pria yang menyatakan kualitas pelayanan kurang baik. Temuan penelitian ini memperkuat studi Munarsih & Widaningrum (2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh pada keikutsertaan suami menggunakan KB.

c. Hubungan Akses Pelayanan dengan Keikutsertaan Pria Mengikuti KB

Berdasarkan hasil penelitian ($p = 0,374$ RO = 2,293) menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara akses pelayanan dengan keputusan suami untuk ikutserta menggunakan kontrasepsi. Hasil penelitian ini memperkuat studi Utami (2010), Minarni (2009), dan Nurlina (2011) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh jarak tempat pelayanan yang bermakna terhadap keikutsertaan pria sebagai akseptor KB.

d. Hubungan Pengetahuan dengan Keikutsertaan Pria Mengikuti KB

Tindakan seseorang sangat ditentukan oleh pengetahuan yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2007). Utami (2010) dalam penelitiannya menyatakan pengetahuan tentang pengendalian kelahiran dan KB adalah aspek penting yang memiliki pengaruh pada tindakan penggunaan KB. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang alat-alat KB dengan keputusan suami untuk ikutserta dalam Program Keluarga Berencana (p value = 0,009, nilai OR= 14,385). Data ini dapat ditafsirkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan yang baik 14,385 kali lebih besar berpeluang untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana dibandingkan dengan responden yang pengetahuannya kurang. Temuan penelitian ini sejalan dengan Faralico & Sitorus (2018) yang menyatakan pengetahuan memberikan dampak positif terhadap pria untuk mengikuti KB.

e. Hubungan Budaya dengan Keikutsertaan Pria Mengikuti KB

Selain pengetahuan, budaya juga turut menentukan keputusan pria untuk ikutserta dalam Program Keluarga Berencana (p Value = 0.000, OR = 13,300). Hal ini sejalan dengan pandangan Aritonang (2010) yang menyatakan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia hidup tidak terlepas dari budaya bahkan dapat dipengaruhi oleh lingkungan budaya dimana ia hidup. Dari data yang diperoleh dapat ditafsirkan bahwa responden dengan budaya mendukung akan 13,300 kali lebih besar ikut serta menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan responden dengan budaya tidak mendukung. Temuan ini memperkuat studi Wijayanti (2004) yang menyimpulkan bahwa kondisi budaya masyarakat yang bersifat patrilineal mempengaruhi keputusan pria berpartisipasi dalam

Program Keluarga Berencana. Posisi perempuan yang subordinat pada banyak kebudayaan memungkinkan dominasi pria dalam menentukan keputusan untuk ber-KB sehingga kaum perempuan hanya menjadi pihak yang menerima keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Partisipasi pria sebagai akseptor KB (kondom dan vasektomi) di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebesar 27,3% dimana 25,8% menggunakan kontrasepsi kondom dan 1,5% menggunakan kontrasepsi vasektomi.
2. Ada hubungan kualitas pelayanan dengan keikutsertaan pria ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (p value = 0,003, OR = 11,200) yang berarti bahwa pria yang mendapat kualitas pelayanan baik mempunyai peluang 11,200 kali lebih besar dibandingkan dengan pria yang menyatakan kualitas pelayanan kurang baik.
3. Ada hubungan pengetahuan dengan keikutsertaan pria ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (p value=0,009, OR=14,385), pria yang berpengetahuan tinggi berpeluang 14,385 kali lebih besar mempunyai peluang untuk berpartisipasi menjadi akseptor KB dibanding pria yang memiliki pengetahuan rendah.
4. Ada hubungan budaya dengan keikutsertaan pria ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (p = 0,000, RO= 13,300), pria yang budaya mendukung kontrasepsi 13,300 kali lebih besar berpeluang untuk berpartisipasi menjadi akseptor KB dibanding pria yang budaya tidak mendukung.
5. Tidak ada hubungan Sosio demografi (pendidikan, pendapatan dan jumlah anak) dengan keikutsertaan pria ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
6. Tidak ada hubungan akses pelayanan dengan keikutsertaan pria ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Untuk PLKB Kecamatan Banda Sakti: hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pria sebagai akseptor KB pria dipengaruhi kualitas pelayanan, pengetahuan tentang KB dan budaya sehingga untuk meningkatkan partisipasi diperlukan metode yang tepat khususnya untuk penyampaian informasi program kondom dan vasektomi serta peningkatan promosi KB pria melalui media baik elektronik maupun cetak dengan variasi kemasan yang menarik sehingga pengetahuan PUS terhadap kontrasepsi meningkat.

2. Untuk pemerintah Kota Lhokseumawe dan BKKBN Aceh: perlu peningkatan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam merubah pandangan dan sikap negatif terhadap kontrasepsi pria, dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan kontrasepsi pria haram.
3. Untuk pengelola program KB Puskesmas dan Kecamatan: meningkatkan sosialisasi tentang kesetaraan dalam penggunaan kontrasepsi tidak harus selalu istri yang ber-KB, suami pun juga harus berpartisipasi sebagai akseptor KB pria.
4. Untuk para peneliti lain: hasil uji bivariat hanya menemukan tiga variabel yang mempunyai hubungan dengan partisipasi pria sebagai akseptor kondom dan vasektomi, maka perlu dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas, lebih besar dan variabel lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aritonang, J. (2010) Hubungan Budaya Patriarki terhadap Keputusan WUS Menjadi Akseptor Keluarga Berencana di Lingkungan VI Simpang Selayang Medan Tuntungan Tahun 2010. *KTI*. Program D-IV Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (2019). “Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi”. www.bps.go.id, diakses 5 Mei 2020.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2000). *Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berwawasan Gender*. BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2019). *Pencapaian Program KKB Kab/Kota*. BKKBN Kota Lhokseumawe.
- Darozatun, N. & Hassan, A. (2015). Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Pria dalam Keluarga Berencana di Kelurahan Cilenggang Serpong Tangerang Selatan. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Faralico, H. & Sitorus, M. E. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Pria Mengikuti KB di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 4(1), 51-61.
- Finola, C. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Suami dalam Memilih alat Kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2015. *Tesis*. Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat USU Medan.
- Minarni (2009). Determinan Kepesertaan Pria dalam KB di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009. *Tesis*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

- Munarsih L. & Widaningrum A. (2014). Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pria Vasektomi di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Nurlina, R. (2011). Analisis Partisipasi Pria sebagai Akseptor KB (Kondom dan Vasektomi) di Wilayah Kerja Puskesmas Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2011. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Rizal, M. & Yulini, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria di Kecamatan Kampar Kiri Hilir). *JOM FISIP*, 3(2), 1-11.
- Sihombing, R. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria) di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Tahun 2018. *Tesis*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Alfabeta.
- Suharyadi & Purwanto (2013). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1*. Salemba Empat.
- Sumadi (2007). *Profil Paguyuban KB Pria Prio Utomo Ngudi Raharjo Dukuh Brajan Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Paguyuban KB Prio Utomo “Ngudi Raharjo”. Senden.
- Supranto, J. (2000). *Statistik Jilid I*. Erlangga.
- Sutinah (2017). Partisipasi Laki-Laki dalam Program Keluarga Berencana di Era Masyarakat Postmodern. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 30(3), 289-299.
- Utami, D. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Pria sebagai Akseptor KB (Kondom dan Vasektomi) di Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Tahun 2010. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Wijayanti, T. (2004). Studi Kualitatif Alasan Akseptor Laki-Laki tidak Memilih MOP sebagai Kontrasepsi Pilihan di Desa Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *KTI*. Program Studi D IV Kebidanan Stikes Ngudi Waluyo Ungaran.

PERWUJUDAN INDUSTRI PARIWISATA 4.0 MELALUI IMPLEMENTASI DIGITAL TOURISM DI KOTA LHOKSEUMAWE

Sufi¹⁾, Julian Sabri

¹ Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Malikussaleh, sufi@unimal.ac.id

ABSTRACT

The application of information technology in the era of the Industrial Revolution 4.0 has provided great convenience and impact on various sectors of life in a country, including the ease of promoting tourism. One of the topic that is developing in the world of modern tourism is digital tourism. The use of digital technology is one of the methods developed by the Ministry of Tourism in promoting tourism in Indonesia. This study produces an outcome regarding the implementation of local government policies in the tourism sector in Lhokseumawe City and the strategies used in promoting tourism towards the tourism era 4.0. Data collection techniques in this study by making observations (observations), interviews (interviews), and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. It is hoped that the Lhokseumawe City government will cooperate with all elements of tourism actors, both private and public, so that every policy can run well and the benefits of tourism can be felt by all people.

Keywords: *Implementation, Digital Tourism, Tourism*

ABSTRAK

Penerapan teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah memberikan kemudahan dan dampak yang sangat besar bagi berbagai sektor kehidupan dalam sebuah negara, termasuk kemudahan dalam mempromosikan pariwisata. Salah satu topik yang berkembang dalam dunia pariwisata modern adalah *digital tourism*. Pemanfaatan teknologi digital ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan luaran tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pariwisata di Kota Lhokseumawe dan strategi yang digunakan dalam mempromosikan pariwisata menuju era pariwisata 4.0. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Diharapkan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe agar bekerjasama dengan semua elemen pelaku pariwisata baik itu pihak swasta maupun masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik dan manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Digital Tourism, Pariwisata*

PENDAHULUAN

Dalam era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi. Digitalisasi menerpa seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pemerintahan. Para pemangku kebijakan senantiasa dituntut untuk beradaptasi. Sebuah kebijakan perlu direalisasikan secara terencana agar tercapai tujuan yang diharapkan (Usman & Nurdin, 2002). Namun dalam dunia baru ini, kebijakan tidak bisa dirumuskan secara kaku, begitu pula dalam implementasinya. Pemerintah membutuhkan metode yang tidak bersifat konvensional (biasa-biasa saja) agar mampu mengakomodasi perkembangan zaman yang serba digital tersebut. Implementasi kebijakan dibutuhkan dalam berbagai sektor pemerintahan (Nugroho, 2014). Salah satu sektor strategis yaitu pariwisata (*tourism*) karena menyumbang devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Kebijakan dan implementasi kebijakan pada sektor pariwisata memerlukan perhatian serius (Prihati, 2017). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan kebijakan *digital tourism*.

Pada saat ini pemerintah mulai mengimplementasikan teknologi informasi sebagai landasan utama dalam promosi pariwisata. Kebijakan *digital tourism* yang diinisiasi oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, tampaknya mendapatkan sambutan positif dari berbagai daerah di Indonesia. Perlu dicatat bahwa kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional tidak lepas dari peranserta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), dimulai dari tingkat daerah. Sektor pariwisata memang seharusnya dikembangkan dalam skala nasional oleh pemerintah daerah (Hadinoto, 1996). Namun sayangnya Kota Lhokseumawe yang merupakan salah satu daerah destinasi wisata di Aceh belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Padahal Kota Lhokseumawe memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Beberapa destinasi wisata yang terdapat di seputaran Kota Lhokseumawe diantaranya Pulau Seumadu, Goa Jepang, Taman Ngieng Jioh, Sungai Kreung Cunda, Pantai Ujong Blang, Pantai Meuraksa, Taman Mangat Ceria (Water Boom), Waduk Jeulikat, Taman Riyadhah, Masjid Islamic Centre, Waduk Pusong, Bukit Paloh Batee, Pantai Rancung, Dermaga Pertamina Lhokseumawe, Pelabuhan Kreung Geukueh, Makam Putroe Neng, dan Museum Lhokseumawe.

Namun potensi pariwisata tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hingga tahun 2020, belum tampak upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menerapkan konsep *digital tourism*. Padahal media digital memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan promosi pariwisata. Bila dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Aceh Tengah, promosi pariwisata berbasis digital di Kota Lhokseumawe sedikit tertinggal. Hal ini tidak sesuai harapan

karena citra Lhokseumawe sebagai sebuah kota seharusnya lebih maju dalam pemanfaatan teknologi informasi dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Tengah yang dominan di sektor perkebunan atau daerah Sabang yang minim penduduk (BPS, 2017). Akan tetapi, bertolakbelakang dengan Kota Lhokseumawe, kedua daerah tersebut sudah sangat gencar dalam mempromosikan pariwisata secara digital sejak beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari WTO (*World Tourism Organization*) pada tahun 2016 berkat pemerintah lokal dan masyarakat bahu-membahu dalam mendukung pariwisatanya dengan *vote* melalui situs <http://bit.ly/voteaceh>

Tabel 1. Daerah yang Berhasil Mendapat Penghargaan

No	Tempat Pariwisata
1	Aceh Menjadi <i>The World's Best Halal Cultural Destination</i>
2	Sabang Menjadi <i>The World's Best Marine Tourism Destination</i>
3	Danau Laut Tawar Menjadi <i>The World's Best Adventure Destination</i>

Sumber : Kemenpar RI, 2016.

Masalah tidak optimalnya implementasi *digital tourim* di Kota Lhokseumawe ini tentunya tidak lepas dari masih minimnya promosi pariwisata secara digital di Kota Lhokseumawe sehingga tidak satupun masuk dalam daftar penghargaan tersebut. Realitas ini dicerminkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Media Digital yang digunakan oleh Dinas Pariwisata

No	Media Digital	Digunakan/Tidak (✓/✗)	Persentasi Keefektifan
1.	Website	✓	49%
2.	YouTube	✗	43%
3.	Facebook	✓	41%
4.	Whatsapp	✗	40%
5.	Instagram	✓	38%
6.	Line	✗	33%
7.	BBM	✗	28%
8.	Twitter	✗	27%
9.	Google+	✗	25%
10.	FB Messenger	✗	24%
11.	LinkedIn	✗	16%
12.	Skype	✗	15%
13.	WeChat	✗	14%

Sumber : Disporapar Kota Lhokseumawe dan WeAreSocial.Net, 2017.

Permasalahan implementasi media digital yang ada di Kota Lhokseumawe juga dapat kita amati dari website Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe yaitu <http://Disporapar.com/>. Penulis memperoleh temuan bahwa informasi tentang objek wisata sudah lama vakum sejak 15 Agustus 2017 dan baru kembali memperbaharui informasi objek wisata pada 21 Februari 2019. Tentu saja hal itu membuat para calon wisatawan tidak mendapatkan informasi *update* melalui media digital. Akun sosial media yang dimiliki Disporapar Kota Lhokseumawe pun tergolong tidak aktif dimana terakhir sekali meng-*update* informasi wisata pada Oktober 2018. Sungguh disayangkan, penggunaan teknologi digital sangat minim diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, padahal perkembangan di era Revolusi Pariwisata 4.0 menuntut setiap aktor yang berperan dalam pengembangan pariwisata untuk mumpuni dalam penggunaan teknologi serta mampu memanfaatkan media digital dalam memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di setiap daerahnya.

Industri Pariwisata, *Digital Tourism*, dan Pariwisata 4.0

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kebutuhan ini terkait erat dengan perjalanan, rekreasi, dan waktu luang (Nurhidayati & Fandeli, 2012) sehingga membentuk suatu industri pariwisata. Menurut Pitana (2009), sistem pariwisata terdiri dari tujuh komponen besar yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan, dan keterpaduan, diantaranya 1) sektor pemasaran; 2) sektor perhubungan; 3) sektor akomodasi; 4) sektor daya tarik/ atraksi wisata; 5) sektor paket perjalanan; 6) sektor pendukung/rupa-rupa; dan 7) sektor pengkoordinasi atau regulator.

Adapun *digital tourism* adalah strategi pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan media digital secara masif. Studi Isnaini & Fauziyyah (2017) menunjukkan bahwa *digital marketing* mampu meningkatkan *brand* atau citra pariwisata. Strategi ini kemudian diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan tujuan mencapai target utama nasional yaitu 20 juta wisatawan mancanegara (wisman). *Digital tourism* bisa dilihat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyesuaikan kondisi pasar yang sudah berubah. Sebab saat ini wisatawan melakukan perjalanan mulai dari mencari dan melihat-lihat informasi (*look*), kemudian memesan paket wisata yang diminati (*book*) hingga membayar secara *online*. Dengan kata lain, wisman era kekinian melakukan *search and share* menggunakan media digital.

Pemanfaatan *digital tourism* tidak terlepas dari paradigma baru dalam industri pariwisata yakni konsep Pariwisata 4.0 dengan target utama wisatawan milenial. Ciri utama strategi ini adalah terbangunnya ekosistem digital sehingga mampu mendongkrak produktivitas industri pariwisata secara drastis. Optimalisasinya dapat dilakukan dengan pemanfaatan jasa *endorser* (Wicaksono & Yunitasari, 2018) atau penggunaan media sosial oleh *digital native* (Supratman, 2018). Hal ini tampaknya berhasil diwujudkan di beberapa situs cagar budaya di Indonesia (Ri'aeni, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan analisa kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran umum variabel penelitian (Sugiyono, 2009; Umar, 2014), khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kota Lhokseumawe. Data yang diperoleh dari fenomena yang diteliti diuraikan sedemikian rupa agar mudah dipahami (Hasan, 2001). Informan ditentukan secara purposif diantaranya:

1. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
2. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
3. Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
4. Staf Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
5. Masyarakat Kota Lhokseumawe

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (sumber kepustakaan dan laporan resmi dari instansi terkait). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan, interview, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan model analisis kualitatif secara interaktif melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, data display, dan *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi dan Implementasi Promosi Pariwisata secara *Digital Tourism*

Dalam rangka menerapkan sistem promosi pariwisata yang berbasis digitalisasi atau yang biasa disebut dengan *digital tourism* di Kota Lhokseumawe tentunya membutuhkan sebuah regulasi. Hal ini nantinya dirumuskan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap elemen masyarakat karena sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Setiap elemen masyarakat harus berusaha untuk mempromosikan

potensi pariwisata sesuai dengan kapasitasnya masing-masing (Mulyanto, 2007). Dalam hal ini Pemerintah Kota Lhokseumawe mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Aturan ini sebagai payung hukum yang memperkuat penerapan *digital tourism* di Kota Lhokseumawe. Menurut Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe:

“Sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mempromosikan pariwisata di Kota Lhokseumawe... melalui berbagai cara termasuk secara digitalisasi... maka pemerintah Kota Lhokseumawe mengacu kepada kebijakan yang menurut pemerintah bisa mengoptimalkan promosi pariwisata dan masyarakat juga bisa ikut mempromosikan potensi pariwisata dengan aturan yang ada, dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Lhokseumawe sudah mulai berbenah dan mulai mempromosikan pariwisata secara digitalisasi walaupun belum secara menyeluruh mengingat bahwa pada saat ini belum ada Qanun daerah yang mengatur tentang penerapan *digital tourism* di Kota Lhokseumawe”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa aturan yang digunakan saat ini masih mengacu kepada Qanun Aceh yang dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus (spesifik) mengatur tentang penerapan *digital tourism*. Jika belum bisa dioptimalkan penerapannya dalam mempromosikan pariwisata, maka dibutuhkan berbagai kebijakan yang bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe mengatakan:

“Belum terealisasinya penerapan *digital tourism* secara optimal adalah salah satu masalah yang harus kita selesaikan secara bersama mengingat bahwa ini adalah tugas kita bersama, termasuk masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam pelaku pariwisata. Namun Disporapar terus melakukan upaya dalam meng-*upgrade* perkembangan yang terjadi khususnya dalam era menuju pariwisata 4.0 mengingat bahwa beberapa daerah juga sudah mulai secara perlahan mempersiapkan diri menerapkan *digital tourism*”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Udoji dalam Agustino (2012) menyebutkan pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Pelibatan masyarakat dalam promosi pariwisata merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan. Hal ini diamini oleh Kabid Pariwisata Disporapar Kota Lhokseumawe sebagaimana kutipan pernyataan berikut ini:

“Masalah penerapan *digital tourism* ini memang diberikan wewenang secara khusus dan tanggung jawab ini ada pada Disporapar Kota Lhokseumawe. Namun secara keseluruhan tanggung jawab ini bukan terletak pada Pemerintah Kota dan Disporapar saja, masyarakat juga punya tanggung jawab misalnya yang sangat sederhana yaitu penggunaan media sosial dengan konten pariwisata. Apalagi anak muda punya cara yang sangat persuasif dalam membuat konten foto menarik yang akan diunggah di sosial media sehingga ini akan menjadi salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan dalam penerapan promosi secara digitalisasi. Namun bukan berarti di dunia nyata kita lupakan, masyarakat juga harus terbuka dan bersikap ramah kepada para wisatawan sehingga meninggalkan kesan yang

baik dan akhirnya ada promosi dari mulut... artinya tanggung jawab ini harus ada perpaduan antara Pemerintah Kota, Disporapar, dan masyarakat. Kalau hanya pemerintah Kota dan Disporapar saja yang bertanggung jawab terhadap promosi pariwisata apalagi secara digitalisasi tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat”. (Diana Rosa, ST, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat adalah suatu kebijakan yang dilakukan Disporapar dalam meningkatkan sadar wisata masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut mendukung segala kegiatan pariwisata baik dalam rangka promosi pariwisata maupun berbagai agenda pariwisata yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe. Hal ini dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih baik lagi dari sektor pariwisata.

Menurut Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe:

“... Penerapan *digital tourism* di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan dua cara, baik secara langsung dilakukan oleh Dinas setiap ada agenda pariwisata seperti Aceh Fest Rapa’i Internaional langsung dipublikasikan dengan media yang ada dan setiap potensi pariwisata juga dipromosikan melalui berbagai media seperti website resmi Disporapar dan instagram yang pada dasarnya sudah berbasis digitalisasi... dan cara yang kedua yaitu secara sosialisasi melalui berbagai kegiatan pariwisata seperti Aksi Sapta Pesona di Pantai Ujong Blang yang langsung dihadiri dari pemateri dari Kemenpar. Disporapar juga sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pariwisata bagi generasi milenial yang banyak menggunakan digital sebagai akses komunikasi sehari-hari, juga semua pelaku pariwisata seperti komunitas *guide* dan pecinta fotografi yang pada dasarnya mereka banyak melakukan interaksi di dunia digital sehingga diharapkan makin banyak pihak yang akan mendukung dan siap atas penerapan *digital tourism* menuju era pariwisata 4.0”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Berdasarkan pendapat yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa Disporapar Kota Lhokseumawe tidak hanya melakukan kegiatan sosialisasi, melainkan juga kegiatan pelatihan.

Kasi Promosi Kepariwisata Disporapar Kota Lhokseumawe mengatakan:

“... Dalam rangka penerapan *digital tourism* dan promosi pariwisata secara digitalisasi memang kita terapkan secara langsung oleh Dinas berupa publikasi dan promosi melalui media yang ada seperti website dan instagram. Namun kita juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat berupa Aksi Sapta Pesona dan Pelatihan Pariwisata langsung dilakukan oleh Disporapar dengan target masyarakat agar masyarakat juga siap dan menjadi *support system* dalam penerapan *digital tourism* di Kota Lhokseumawe... upaya ini sangat diperlukan mengingat bahwa kita sedang menuju era pariwisata 4.0”. (Zul Afrizal, MA, Disporapar Kota Lhokseumawe, 22/06/2019)

Dijelaskan oleh Uli selaku masyarakat Kota Lhokseumawe yang mendapat pelatihan pariwisata dari Disporapar Kota Lhokseumawe:

“...Penerapan *digital tourism* memang sudah ada sosialisasi dari Disporapar, tapi dalam proses sosialisasi itu masih ada kekurangan yaitu pelatihan tidak ada keberlanjutan. Pelatihan hanya dilakukan selama dua hari dan sampai saat ini belum ada kabar tentang keberlanjutan pelatihan ini. Menurut saya seharusnya ada keberlanjutan pelatihan agar ilmu yang sudah didapatkan dapat dievaluasi bersama, tetapi saya sangat mengapresiasi usaha dari Disporapar untuk melakukan pelatihan ini karena berdampak positif terhadap cara promosi kami selama ini yang manual menjadi digitalisasi dan saya juga berharap akan ada pelatihan pariwisata berbasis digitalisasi untuk selanjutnya agar seluruh lapisan masyarakat menerima dan siap untuk cara menerapkan cara promosi yang terus berkembang”. (Uli, Kota Lhokseumawe, 22/06/2019)

Berdasarkan hasil deskripsi di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dikarenakan masyarakat juga perlu memperoleh edukasi tentang promosi pariwisata berbasis digitalisasi agar siap untuk menghadapi perkembangan zaman dan mendukung perkembangan sektor pariwisata daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe:

“...Kota Lhokseumawe punya potensi besar dari sektor pariwisata, karena sektor pariwisata bersifat fleksibel dan mudah mengikuti perkembangan zaman... selama positif kita akan terus dukung, apalagi jika masyarakat antusias mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan... tentunya ini akan mewujudkan semua elemen yang siap... apalagi jika pelatihan ini membawa kehidupan pariwisata yang benar-benar diterapkan secara digital seperti ada masyarakat yang sudah sadar akan manfaat pariwisata lalu membuat *homestay* dan mempromosikannya melalui aplikasi Airy dan sebagainya... tentu ini akan menarik dikarenakan di Aceh masih jarang dan di Lhokseumawe belum ada, dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat yang diuntungkan karena proses digitalisasi”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa sosialisasi memang sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Kesadaran masyarakat akan manfaat pariwisata secara digitalisasi akan memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian dan pariwisata Kota Lhokseumawe.

b. *Aceh International Rafa'i Festival* (ACIRAF)

Aceh International Rafa'i Festival (ACIRAF) merupakan event bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan Disbudpar Aceh dan Disporapar Kota Lhokseumawe sebagai bagian dari Program *Wonderfull Indonesia* dengan target mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. *Aceh International Rafa'i Festival* (ACIRAF) ini memiliki berbagai rangkaian kegiatan mulai dari: *Rafa'i International Concert*, *Rafa'i Street Art*, *Meet and Great*, *Jeuleukat Field Trip*, dan *Aceh Culture Expo*. Dengan adanya event berskala internasional tentu akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata di Kota

Lhokseumawe. Event ini juga akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata yang ada di Kota Lhokseumawe. Menurut Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe:

“.... *Aceh International Rafa'i Festival* (ACIRAF) sangat menguntungkan bagi Kota Lhokseumawe karena mendatangkan banyak wisatawan baik dari nasional maupun internasional sebagai upaya dalam menuju era pariwisata 4.0... kegiatan ini diikuti oleh peserta mancanegara seperti Turki, India, Malaysia, dan Thailand... tentu ini akan menjadi salah satu event yang akan disorot media, terutama media dari luar dan pariwisata kita sangat terbantu karena secara tidak langsung dipromosikan secara digitalisasi oleh media baik dalam maupun luar negeri... dan tentunya akan banyak masyarakat luar yang mengetahui Kota Lhokseumawe dan ingin berkunjung ke Kota Lhokseumawe... semoga segala fasilitas pariwisata juga dapat didukung peningkatannya oleh berbagai pihak dengan event seperti ini”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

2. Hambatan Implementasi Promosi *Digital Tourism* di Kota Lhokseumawe

a. Komunikasi

Segala macam proses kebijakan tidak terlepas dari aspek komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi dalam kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe:

“... Dalam hal pelaksanaan pariwisata kita tidak terlepas dari proses komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadi salah paham dalam prosesnya. Komunikasi dalam instansi kami bersifat *top down* agar memudahkan proses penyampaian informasi sehingga informasi mengenai Peraturan yang ada di Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dapat tersampaikan dengan baik”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Hal ini senada disampaikan oleh Kabid Pariwisata Disporapar Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa:

“Dalam rangka terlaksananya pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan kami di lingkungan Disporapar Kota Lhokseumawe sangat mengutamakan komunikasi yang baik agar informasi dapat ditangkap dan dilaksanakan di lingkungan Disporapar. Selain itu juga dalam proses komunikasi saya sebagai Kabid Pariwisata juga memberikan arahan kepada teman-teman di bawah struktur termasuk penerapan *digital tourism* dan promosi secara digitalisasi agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan instruksi dari Kepala Dinas secara berkelanjutan”. (Diana Rosa, ST, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Namun keterangan yang disampaikan di atas dibantah oleh salah seorang pegiat pariwisata di Kota Lhokseumawe melalui pernyataan berikut:

“Dalam hal komunikasi antara Disporapar Kota Lhokseumawe dan masyarakat pegiat pariwisata belum sepenuhnya bisa saya katakan berjalan dengan baik, apalagi tentang penerapan *Digital Tourism* saya baru mengetahuinya, walaupun promosi pariwisata secara

digital memang sudah ada saat ini, Dinas memang pernah mengadakan kegiatan Pariwisata dan sosialisasi di Pantai Ujong Blang ini namun belum ada komunikasi lanjutan”. (Vivi Angraini, Kota Lhokseumawe, 25/06/2019)

Dengan demikian dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa penerapan *digital tourism* dan promosi pariwisata secara digitalisasi belum optimal. Dalam hal ini tentunya diperlukan komunikasi yang baik sehingga tujuan dari sebuah kebijakan dapat diaktualisasikan oleh semua elemen masyarakat sehingga tidak hanya terjalin secara internal tetapi juga eksternal pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan ada banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya ialah sumber daya. Betapa pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam sebuah kebijakan, tanpa adanya faktor sumber daya dipastikan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak efektif. Menurut informan penelitian yang menjabat Kepala KPw Bank Indonesia Lhokseumawe, masih banyak permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe, sebagaimana diutarakan:

“Akses pendukung yang kurang, minimnya sumber daya manusia pengelola pariwisata yang profesional, banyak tempat yang dikelola sendiri oleh masyarakat merupakan beberapa permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe”. (Yukon Afrinaldo, Kota Lhokseumawe, 14/06/2019).

Keberhasilan sebuah kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe menyampaikan:

“... Menanggapi hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia kami perlu memperhatikan kualitas yang kami miliki. Dalam Disporapar Kota Lhokseumawe ini sebenarnya masih perlu pembenahan dan pembekalan. Oleh sebab itu, dari kemampuan pegawai kami untuk memaksimalkan mutu, kami mengadakan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai kami termasuk kedepannya mungkin akan ada pembinaan dan pembekalan kemampuan dalam penerapan *digital tourism* sehingga diharapkan pegawai di lingkungan Disporapar mengerti betul tupoksi dan memaksimalkan peran dan fungsinya dengan baik”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

c. Anggaran

Salah satu faktor pendukung kesuksesan sebuah kebijakan yaitu ketersediaan anggaran. Kebijakan *digital tourism* tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang diharapkan tanpa didukung oleh anggaran yang memadai. Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe menanggapi:

“... kami sadar betul bahwa anggaran memiliki fungsi yang sangat penting berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, apalagi berkaitan dengan promosi pariwisata kami tentunya selalu difasilitasi dengan anggaran yang telah diplotkan. Namun jumlahnya tersebut bersifat fluktuatif sesuai dengan kebutuhan, apalagi untuk saat ini tidak ada plot anggaran khusus dalam penerapan *digital tourism* di Kota Lhokseumawe”. (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Berdasarkan hasil wawancara singkat di atas dapat dipaparkan bahwa Disporapar Kota Lhokseumawe setiap tahunnya menerima kucuran dana dari pemerintah setempat. Jumlah anggaran yang diterima Disporapar berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung kebutuhan Disporapar itu sendiri. Selanjutnya hasil wawancara Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“... Dana yang diterima oleh Disporapar Kota Lhokseumawe dialokasikan ke berbagai tempat, diantaranya Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga dan Bidang Pariwisata”. (Nina Zahara, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Dengan adanya anggaran dalam pelaksanaann sebuah kebijakan diharapkan mampu memberikan pengaruh besar dalam kesuksesan pencapaian tujuan suatu kebijakan. Namun hal ini tergantung pula pada cara pemanfaatannya.

d. Fasilitas

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, unsur fasilitas memiliki peranan yang sangat krusial. Dukungan fasilitas diharapkan membuat sebuah kebijakan terlaksana dengan baik. Hal ini sebagaimana disuarakan oleh Kabid Pariwisata Disporapar Kota Lhokseumawe sebagaimana petikan wawancara berikut:

“... Pelaksanaan Peraturan Pemerintah di kantor Disporapar ini sendiri didukung oleh fasilitas yang telah tersedia sebelumnya. Termasuk untuk promosi secara digitalisasi meski masih minim karena masih terbatas pada akses internet dan perangkat komputer saja... untuk benar-benar menerapkan *digital tourism* kita membutuhkan kelengkapan alat yang lebih memadai dan sesuai standar agar kebijakan dapat optimal.” (Diana Rosa, ST, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Dari hasil pemahaman diatas dapat kita pahami bahwa fasilitas mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap kelancaran suatu pelaksanaan kebijakan dengan adanya fasilitas yang berkaitan dan memenuhi standar tentunya pelaksanaan kebijakan akan lebih maksimal dan optimal dan tujuan kebijakan tersebut dapat disalurkan secara terarah dan penerapan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

e. Informasi dan Kewenangan

Informasi menjadi suatu faktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal demikian juga berlaku pada perihal wewenang. Kewenangan berperan penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disporapar Kota Lhokseumawe mengutarakan:

“... Informasi mengenai peraturan Qanun Aceh khususnya tentang Kepariwisata ini yaitu Nomor 8 Tahun 2013, kami sampaikan secara sistematis melalui berbagai upaya saat sosialisasi dan informasi ini juga kami salurkan melalui teknik penyampaian secara linier pada tingkatan bagian dan jenjang yang ada di struktur organisasi di Disporapar Kota Lhokseumawe. Informasi yang kami salurkan disampaikan oleh atasan pada bagian masing-masing dan diteruskan ke bagian perangkat yang ada di bagian tersebut, dengan harapan pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan lancar sesuai dengan ketentuan kebijakan.” (Ismail, S.Sos, Disporapar Kota Lhokseumawe, 22/06/2019)

Pelaksanaan kebijakan diawali dengan penyampaian informasi secara sistematis untuk memberikan pedoman kepada pegawai mengenai aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sebuah kebijakan. Namun salah seorang pegiat pariwisata Kota Lhokseumawe mengatakan:

“... Informasi yang kami dapat dari dinas terkait masih minim dikarenakan Disporapar Kota Lhokseumawe sendiri belum memberikan informasi pariwisata secara *update* dan media yang digunakan juga minim seperti hanya website dan instagram... itu pun instagram duta wisatanya yang kami lihat, sedangkan media sosial dinas, kami lihat sangat pasif... dengan kemajuan ilmu teknologi saat ini sistem pemberian informasi secara digitalisasi sangat diperlukan... hal tersebut terutama dalam proses penginformasian mengenai segala kegiatan kepariwisataan.” (Ulli, Kota Lhokseumawe, 20/06/2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa suatu informasi dengan kemajuan zaman saat ini sangat dibutuhkan sebab banyak orang mencari informasi termasuk tentang pariwisata dari media digital ini. Namun informasi pun harus selalu *update* agar calon konsumen selalu menerima informasi terkini tentang pariwisata di Kota Lhokseumawe. Keberhasilan penyampaian informasi juga berhubungan dengan suatu bentuk kewenangan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe:

“... Dengan adanya bentuk kewenangan dari masing-masing pemangku jabatan di setiap bagian kami dapat dengan mudah melihat bagaimana bentuk implementasinya... apakah sesuai atau tidak dengan adanya kewenangan ini... kami dapat mengontrol informasi yang disalurkan dan melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut serta melihat apakah umpan balik mengenai hal-hal tertentu kurang dipahami, seperti mengenai informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013.” (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Dari hasil kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informasi memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Informasi yang disalurkan Disporapar Kota Lhokseumawe dilaksanakan secara linier agar dapat melihat sejauh mana informasi tersebut dapat diserap dan dipahami oleh pelaksana kebijakan. Kelancaran informasi ini juga sangat berkaitan dengan kewenangan yang ada dalam sebuah instansi. Kewenangan berperan penting dalam proses penyampaian informasi dan berguna untuk menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan di Disporapar Kota Lhokseumawe sesuai dengan informasi dan isi sebuah kebijakan sehingga dapat dipastikan terlaksana berdasarkan aturan-aturan yang tertulis dalam kebijakan tersebut.

f. Disposisi

Disposisi memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan sebuah kebijakan. Peran disposisi berupa sikap dan tindak lanjut dari kebijakan serta turunan yang diteruskan kembali terhadap seluruh pegawai di suatu instansi. Hal ini menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe menanggapi peran disposisi sebagaimana petikan wawancara berikut:

“... Selaku pimpinan di Disporapar Kota Lhokseumawe saya memiliki kewajiban khusus dalam memberikan disposisi terhadap berbagai hal yang masuk ke dalam Disporapar, termasuk terhadap sebuah kebijakan mengenai kepariwisataan yang harus diterapkan kepada pegawai yang ada di Disporapar bagian pariwisata yang merupakan tindak lanjut dari sebuah kebijakan. Peran disposisi memang sangat penting dan krusial karena disposisi yang saya berikan apabila berlawanan dengan teknis yang terdapat dalam kebijakan tersebut maka ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian yang sesungguhnya dengan implementasi di lapangan.” (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

Dari kutipan di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa disposisi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dengan adanya disposisi, sebuah kebijakan dilaksanakan berdasarkan spesialisasi setiap bagian yang berwenang yang mempunyai kapasitas sesuai dengan kebijakan. Disposisi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan di Disporapar Kota Lhokseumawe disesuaikan dengan bidang yang terkait dan teknis pelaksanaan kebijakannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Peranan itu biasa diterjemahkan dalam pola pembagian tugas dan pola yang terkendali. Sehubungan dengan hal ini, Kepala Disporapar Kota Lhokseumawe mengatakan:

“... Struktur birokrasi di kantor Disporapar Kota Lhokseumawe ini disusun secara sistematis yang bertujuan agar sebuah kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan melihat kinerja dari setiap unsur birokrasi kita dapat melihat sejauh mana sebuah tugas sudah dilaksanakan.” (Zulkifli, M.Pd, Disporapar Kota Lhokseumawe, 21/06/2019)

3. Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan lingkungan sadar wisata dalam penerapan *digital tourism* oleh Disporapar Kota Lhokseumawe dan masyarakat memang sampai saat ini belum dapat berjalan optimal seperti seharusnya. Kota Lhokseumawe yang memiliki banyak potensi dan daya tarik pariwisata, baik dilihat dari panorama maupun wisata kulinernya, tentunya harus dimaksimalkan dengan penerapan *digital tourism*. Kebijakan ini diyakini mendukung promosi pariwisata yang lebih optimal karena akses yang lebih mudah dan sangat efektif dalam menjangkau masyarakat dengan cakupan yang lebih luas.

Kebijakan promosi pariwisata di daerah sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 poin (f) tentang daerah yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata di daerahnya. Termasuk promosi secara digitalisasi dalam rangka penerapan *digital tourism* pun sudah seharusnya secara perlahan dipersiapkan agar promosi pariwisata di daerah dapat berjalan dengan baik. Menerapkan lingkungan sadar wisata dan mampu menerapkan promosi secara digitalisasi pada semua elemen pelaku pariwisata sudah menjadi kebutuhan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang semakin serba digital. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata adalah salah satu upaya agar setiap kegiatan pariwisata tidak lepas dari regulasi yang telah ditetapkan, termasuk perihal promosi pariwisata di daerah. Untuk penerapan *digital tourism* dan promosi pariwisata secara digitalisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sudah mulai menerapkan hal tersebut secara perlahan meski belum optimal karena keterbatasan yang ada. Pemerintah juga sudah mengajak semua elemen pelaku pariwisata berdasarkan kebijakan yang ada. Namun pemerintah masih memerlukan program yang bersifat kreatif dan inovatif dalam rangka mendongkrak popularitas kepariwisataan di Kota Lhokseumawe.

Sosialisasi kepada masyarakat adalah kebijakan dari Disporapar Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat dari pariwisata dan melihat bahwa sektor pariwisata sangat berpeluang membantu perekonomian masyarakat. Sosialisasi memang sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan karena dalam melaksanakan kebijakan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Kesadaran stakeholder diharapkan melahirkan dukungan dari semua pihak demi kesejahteraan yang akan diperoleh masyarakat apabila proses kebijakan ini berjalan dengan baik.

Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh sistem komunikasi yang dibangun (Dunn, 2003). Pelaksana kebijakan harus mengetahui betul apa yang dilakukannya. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Namun seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terhenti dalam pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaan sebuah kebijakan tanpa adanya proses komunikasi yang baik dan efektif dirasa hampir mustahil mendapatkan tujuan dari sebuah kebijakan seperti halnya yang terjadi pada saat ini. Penerapan *digital tourism* dan promosi pariwisata belum berjalan dengan optimal di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang baik sehingga tujuan dari sebuah kebijakan dapat tercapai.

Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan melalui proses komunikasi yang bersifat *top down* akan memberikan hasil yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun dalam proses komunikasi semacam ini juga harus diperhatikan bagaimana struktur birokrasi dalam sebuah instansi. Struktur birokrasi yang terlalu lebar tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap penyampaian informasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Maka dari itu instansi Disporapar Kota Lhokseumawe harus lebih optimal dalam proses pelaksanaan komunikasi, terutama yang berisi informasi mengenai teknis pelaksanaan promosi secara digitalisasi dengan semua elemen yang ada, baik pemerintah itu sendiri, pihak swasta, dan tentunya masyarakat.

Pelaksanaan setiap kebijakan publik tidak pernah terlepas dari peran sumber daya. Ketersediaan sumberdaya membuat pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat efektif. Dalam hal pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan instansi Disporapar Kota Lhokseumawe juga menggunakan beberapa faktor sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, di antaranya :

- a. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya tidak terlepas dari pembekalan, pelatihan, dan pengembangan yang berhubungan dengan mekanisme sebuah kebijakan. Kekurangan-kekurangan yang kerap dijumpai pada sumber daya manusia yang ada diharapkan mampu diminimalisir dengan berbagai bentuk pelatihan yang diberikan sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

- b. Anggaran. Anggaran sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sebuah kebijakan sehingga dapat menjamin pencapaian terhadap sasaran dan tujuan sebuah kebijakan. Dengan adanya anggaran dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan maka pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan mampu terealisasi dengan baik serta sasaran dan tujuan kebijakan dapat tercapai.
- c. Fasilitas. Ketersediaan fasilitas terutama terhadap sarana dan prasarana pelaksanaan suatu kebijakan perlu ditimbang dengan baik karena hal ini berhubungan dengan optimalisasi sebuah kebijakan. Fasilitas dalam melaksanakan penerapan *digital tourism* dan promosi secara digitalisasi di Disporapar Kota Lhokseumawe masih berupa akses internet, perangkat komputer, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan.

Kebijakan merupakan suatu bentuk konsep atau pedoman dalam berbagai keputusan sangat dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dari kebijakan. Proses implementasi sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah faktor disposisi. Dalam pelaksanaan kebijakan, fungsi disposisi ini merupakan sikap dan tindak lanjut yang sangat bergantung kepada pemimpin dalam instansi Disporapar Kota Lhokseumawe. Sementara tiap bagian mempunyai wewenang dalam memberikan disposisi dalam hal menyesuaikan pihak mana yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan disposisi sebagai tidak lanjut Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Kerjasama yang baik antara pemberi disposisi dengan pihak yang menerima disposisi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya disposisi ini, diharapkan kebijakan dapat terlaksana dengan baik melalui bagian yang berkompeten yang diberikan disposisi sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.

Struktur birokrasi merupakan hal yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Oleh karena itu struktur birokrasi secara keseluruhan memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi pada dasarnya disusun secara sistematis dengan tujuan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat terlaksana dan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan Peraturan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, instansi Disporapar Kota Lhokseumawe dalam hal ini harus lebih memperhatikan peran dari struktur birokrasi yang terdapat dalam instansinya. Dalam menjalankan tugasnya pegawai harus disertai dengan standar operasional prosedur yang berfungsi sebagai pedoman yang mengikat setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan dari kebijakan demi tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan promosi pariwisata secara digitalisasi menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan dalam upaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan di suatu objek wisata. Dengan optimalisasi promosi pariwisata secara *digital tourism*, semua potensi yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat diketahui masyarakat luas dan dapat menggenjot pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut.

Dalam mengembangkan destinasi wisata, Pemerintah harus mampu menggandeng pihak-pihak terkait seperti stakeholder, masyarakat, kelompok sadar wisata, bahkan para komunitas pegiat media sosial. Perkembangan media sosial yang begitu pesat dalam menyebarkan berbagai informasi harus bisa ditangkap sebagai peluang dalam mempromosikan wisata di Kota Lhokseumawe. Bergesernya model interaksi dari ranah "*offline* ke *online*" merupakan sebuah keharusan untuk menggencarkan promosi menggunakan *digital tourism*. Pemanfaatan teknologi masa kini dilakukan juga dengan mendorong partisipasi masyarakat setempat untuk ikut menjadi bagian dari tim promosi. Menggandeng pegiat media digital dan menjadikan mereka mitra kerja tentunya akan memudahkan usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan publikasi dan pemasaran wisata di Kota Lhokseumawe.

Optimalisasi penerapan *digital tourism* dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama anak muda Kota Lhokseumawe untuk membantu dalam mempromosikan pariwisata di Kota Lhokseumawe dan memberikan pelatihan softskill terkait wawasan dan keterampilan pihak internal Disporapar dalam mengelola promosi pariwisata berbasis digital di Kota Lhokseumawe. Pemerintah daerah dan pelaku bisnis pariwisata kiranya perlu konsisten memanfaatkan media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi kepada seluruh calon wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya sehingga terbangun sistem informasi wisata Kota Lhokseumawe yang terintegrasi. Merancang dan mengembangkan sistem informasi wisata yang lengkap, *update*, dan interaktif akan membantu pengembangan sektor pariwisata secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hadinoto, K. (1996). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. UI-Press.

- Hasan, M. I. (2001). *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara.
- Isnaini, N. L. & Fauziyyah, S. (2017). Peran Digital Marketing terhadap Brand Equity Produk Pariwisata. *Snaper-Ebis*, 406–410.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nurhidayati, S. E. & Fandeli, C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1).
- Pitana, I. G. & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi.
- Prihati (2017). Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Potensi Wisata di Provinsi Riau. *Disertasi*. Universitas Pasundan.
- Puspawati, D. P. H. & Ristanto (2018). Strategi Promosi Digital untuk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 1(2), 1-20.
- Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
- Ri'aeni, I. (2015). Penggunaan New Media dalam Promosi Pariwisata Daerah Situs Cagar Budaya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 187-197.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supratman, L. P. (2018). Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 47-60.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Wicaksono, M. S. & Yunitasari, D. (2018). Efektivitas Endorser dalam Promosi Pariwisata Indonesia. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 1-8.

KONSUMERISME DAN GAYA HIDUP PEREMPUAN DI RUANG SOSIAL: ANALISIS BUDAYA PEMBEDAAN DIRI DI LINGKUNGAN FISIP UNIMAL

Rahmi Rachel, Rakhmadsyah Putra Rangkyu¹⁾

¹⁾ Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, oecoex@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the objectives of being different and consumption behavior among students. This study uses the theory of habitus and environment according to Pierre Bourdieu. The method used is qualitative research with a descriptive approach in order to describe and obtain information on what female students are doing to be different and consumption behavior in their social space. The results of this study found that there are several factors that influence female students to be different. First, they want to be the center of attention for others. Second, being different is done in order to attract the attention of men in the environment. Third, someone takes action to be different because they want to be a trendsetter, feel different and attractive makes a woman feel happy, and becomes a woman's pride. Fourth, be more confident. All of that encourages consumptive behavior where consuming an item is no longer a fulfillment of a need but only because you want to appear different from others or are afraid to look the same or similar to others.

Keywords: *Fashion, Different Appearances, Consumptive Behavior, Habitus*

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada tujuan tampil beda dan perilaku konsumsi di kalangan mahasiswa dengan menggunakan teori habitus dan lingkungan menurut Pierre Bourdieu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar dapat menggambarkan dan memperoleh informasi tentang apa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk tampil beda melalui perilaku konsumsi di ruang sosialnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk tampil beda. Pertama, adanya keinginan menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Kedua, tampil beda dilakukan dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis yang ada di lingkungan tersebut. Ketiga, seseorang melakukan tindakan tampil beda karena ingin menjadi pencipta tren, merasa berbeda dan menarik membuat rasa senang, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang perempuan. Keempat, menjadi lebih percaya diri. Semua itu mendorong perilaku konsumtif dimana mengonsumsi suatu barang bukan lagi sebagai pemenuhan kebutuhan melainkan hanya karena ingin tampil berbeda dari orang lain atau takut terlihat sama atau mirip dengan yang lain.

Kata Kunci: Mode, Tampil Beda, Perilaku Konsumtif, Habitus

PENDAHULUAN

“*Cogito, ergo sum*”, aku berpikir maka aku ada. Sekarang pernyataan tersebut semakin kehilangan maknanya, dikalahkan oleh slogan “*I shop therefore I am*”—aku berbelanja, maka aku ada. Semangat berkonsumsi masyarakat modern mencerminkan realitas tersebut, sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat konsumen (Soedjatmiko, 2008). Budaya konsumen sudah membingkai alam berpikir masyarakat (Ulfa, 2008) yang ditunjukkan melalui gaya hidup, selera, dan cita rasa. Hal ini dilakukan dalam konteks memperjuangkan posisi sosial (Lury, 1998).

Fenomena ini tampak mencolok pada cara seseorang berpakaian. Pada hakikatnya, pakaian adalah kebutuhan primer dan sarana menegakkan norma. Namun seiring perkembangan zaman pakaian sudah diposisikan sebagai gaya hidup yang memiliki makna sosial, yakni sebagai ekspresi identitas si pemakai dan ekspresi kelas sosial. Hal itu dilakukan dalam rangka meraih posisi sosial yang ditunjukkan melalui gaya hidup boros dan pembelian barang dan jasa sebagai sumber kesenangan dan kemewahan (Veblen dalam Bakti, et al., 2020). Orang-orang membeli barang atau memakai jasa bukan untuk kebutuhan tetapi untuk memuaskan keinginan, sedangkan keinginan tersebut tidak akan pernah terpuaskan. Seiring waktu pakaian menjadi komoditas yang paling menguntungkan, di sini lahirlah perusahaan-perusahaan produsen yang menawarkan produk pakaian dengan berbagai merk dan desain seperti Channel, Levi’s, Dior, Zara, dan lain-lain.

Budaya konsumerisme ini juga melekat pada perempuan. Seorang perempuan cenderung digambarkan lebih konsumtif daripada pria karena kebutuhannya yang berbeda. Penampilan menjadi salah satu bagian penting dalam dunia perempuan. Rasa ingin tampil cantik memaksa terjadinya kontestasi konsumsi *fashion* dalam bingkai gaya hidup atau *lifestyle* (Pratiwi & Bharata, 2012). Diri seorang perempuan kemudian diasosiasikan dengan merk produk tertentu. Perempuan memang saling berkompetisi dengan sesamanya, bahkan dengan teman sendiri. Bisa dikatakan sebenarnya, perempuan mana yang tidak senang atau bahagia jika dikatakan lebih *hit*, *trendsetter*, paling cantik, paling bagus, dan paling lainnya. Senang sudah pasti dan rasa bangga akan menjadi kelanjutan dari akibat pujian tersebut.

Keinginan berbeda dan mempertahankan perbedaan bertautan dengan tanda-objek yang dikonsumsi, memberi makna tentang status sosial (Ritzer, 2010). Perempuan sebagai penghuni ruang sosial, sangatlah memperhatikan penampilannya. Penampilan juga dianggap sebagai modal utama dalam menghadapi dunianya. Bagi perempuan menjaga penampilan sama dengan menjaga *image*-nya. Perhatian perempuan atas penampilan dirinya dan orang lain di ruang sosial yang dilingkupi budaya konsumerisme sangatlah penting. Perempuan cenderung menghindari penampilan atau sesuatu yang ia kenakan sama ataupun nyaris sama dengan orang lain.

Penampilannya haruslah yang paling menarik, dan penampilan menarik tidaklah statis, maka tampil beda setiap hari menjadi hal penting. Budaya tampil beda, hasrat untuk tampil dengan penampilan tunggal, bahwa orang lain tidak bisa atau tidak boleh berpenampilan sama, hal seperti itu dikejar untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, bahwa yang menarik dan *fashionable* adalah dirinya, dan siapa yang tampil sama atau nyaris sama, akan menjadi pesaing.

Dari budaya pembedaan diri inilah perempuan terus bersaing, menunjukkan bahwa dialah yang paling menarik, dapat kita lihat contoh pada trend jilbab. Jilbab di Aceh khususnya menjadi pakaian primer bagi perempuan muslim saat hendak pergi keluar rumah. Maka penggunaan jilbab juga berlaku budaya pembedaan diri, perempuan yang selalu ingin tampil beda akan selalu memperhatikan pakaiannya. Ia menjaga cara berbusana. *Fashion* menjadi modal utama menghadapi ruang sosialnya.

Faktanya di Universitas Malikussaleh, khususnya di lingkungan FISIP, pembedaan ini juga terjadi. Contoh kecil yang dapat kita lihat misalnya pada penggunaan jilbab. Dengan berkembangnya zaman, model-model jilbab ikut berkembang, mulai dari jilbab segi empat, pashmina, jilbab instan, hingga trend hijab syar'i. Dari berbagai jenis dan model jilbab dan *fashion* inilah seseorang mulai membangun identitas, tampilan, perilaku, dan gaya.

Observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa tak ada satu pun perempuan yang ingin terlihat sama dengan yang lain, bahkan teman mereka sendiri, dari mulai yang terlihat *update* dengan gayanya hingga yang bergaya biasa-biasa saja. Mereka merasa risih melihat orang lain memakai suatu barang yang sama atau terlihat mirip dengan milik mereka. Mereka merasa harus langsung mengganti pakaian mereka atau pergi menjauh hingga tak ada yang mengatakan sama atau terlihat sama dengan yang lain. Bahkan dengan adanya fenomena "*genk*" (biasanya para anggota senang terlihat sama) sekalipun perempuan akan merasa risih dengan teman seanggota jika menggunakan barang yang mirip tanpa persetujuan sebelumnya (janjian).

Mereka mempersonalisasi barang-barang, tanpa melakukan pengecekan terhadap barang, misalnya di mana barang tersebut diproduksi, berapa banyak barang tersebut dalam sekali produksi. Biasanya mereka hanya melihat tampilan luar bahwa hanya ada satu barang di toko tersebut, atau mereka biasanya hanya memperhatikan barang tersebut dari bahan apa. Mereka tidak mencari pengetahuan lebih lanjut tentang barang yang akan dibeli apakah akan ada di toko atau tempat lain. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tampil berbeda dari yang lain, bahwa dialah yang memiliki tampilan seperti itu, berpikir dialah aktor tunggal dari penampilannya. Maka dengan ini peneliti tertarik meneliti fenomena tersebut dengan judul "Konsumerisme dan Gaya Hidup

Perempuan di Ruang Sosial: Analisis Budaya Pembedaan Diri (Diferensiasi Personal) di Lingkungan FISIP Unimal”.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Astuti (2013) dimana diperoleh temuan bahwa subjek penelitian yang merupakan ibu rumah tangga, melakukan pembelian barang tanpa adanya perencanaan, tidak mempertimbangkan manfaat maupun kegunaan, melainkan demi menjaga penampilan diri dan gengsi, serta simbol status. Hal ini tampaknya mendukung studi yang dilakukan oleh Hotpascaman S (2010) yang menghasilkan temuan adanya korelasi yang signifikan antara perilaku konsumtif dengan konformitas supaya diterima dalam anggota kelompoknya. Sementara penelitian oleh Pratiwi (2015) menyimpulkan bahwa konsumsi motor Kawasaki yang dilakukan oleh sebuah komunitas terkait dengan nilai-guna dan nilai-tanda. Namun ketiga studi sebelumnya tidak melihat konsumsi yang dilakukan oleh subjek penelitiannya dari perspektif pembedaan diri (diferensiasi personal).

Distingsi (Pembedaan)

Menurut Bourdieu habitus dan lingkungan memiliki relasi yang bercorak timbal balik. Di satu sisi habitus dikondisikan oleh lingkungan, di sisi lain lingkungan diberi makna oleh habitus (Ritzer & Goodman, 2003). Teori Bourdieu tentang habitus dan arena sangat berkaitan dengan penelitian tentang konsumerisme dan gaya hidup perempuan di ruang sosial, khususnya analisis budaya diferensiasi personal di lingkungan FISIP Unimal dimana tindakan seseorang ditentukan oleh habitus dan lingkungan. Adapun yang dimaksud habitus di sini ialah kerangka tindakan seseorang (mahasiswi). Sementara kaitannya dengan konsumerisme atau lebih khususnya pada penggunaan pakaian, seseorang menjadikan desain, warna, dan harga sebagai substansi pakaian karena hal itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang eksklusif. Orang lain kemudian memiliki kerangka berpikir seperti itu karena terpengaruh sehingga membuat orang lain berpenampilan berbeda. Ada kerangka berpikir yang melihat cara berpakaian itu sebagai sesuatu yang mewah dan seharusnya dilakukan. Cara-cara membedakan diri itu kemudian menyebar, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang sama dan berulang di lingkungan itu dalam hal membedakan diri dari yang lain dan menjadi kebiasaan di lingkungan FISIP Unimal.

Bourdieu selanjutnya menyatakan bahwa tujuan pembedaan diri sebagai demonstrasi kelas sosial dalam masyarakat, dikenal dengan konsep distingsi. Distingsi menelurkan selera yang variatif, objek kultural diapresiasi secara berbeda. Hal ini dipraktikkan dan diajarkan sehingga selera yang sama mampu menyatukan kelompok tertentu. Individu kemudian menempatkan dirinya pada kelompok dengan selera yang sama. Penonjolan ini dilakukan demi kehormatan dan eksistensi

diri di dalam ruang sosial (Ritzer & Goodman, 2003). Selera menyatukan kelompok sekaligus memisahkannya dengan kelompok lain yang memiliki selera berbeda. Jadi penggolongan diri di dalam suatu kelompok dilakukan baik oleh dirinya terhadap orang lain, ataupun sebaliknya, orang lain juga ikutserta menggolongkan dirinya berada di kelompok mana (Bourdieu dalam Jenkins, 2004).

Konsumerisme, Gaya Hidup, dan Citra Diri

Konsumerisme adalah sebuah paham atau ideologi. Dalam bingkai konsumerisme seseorang berkonsumsi secara berlebihan atau tidak sepantasnya. Hal ini dilakukan secara sadar dan berkelanjutan karena sudah menjadi cara hidup (Bakti, et al., 2019). Manusia mencandui produk. Apabila seseorang konsumtif dan menjadikannya sebagai gaya hidup maka orang tersebut menganut konsumerisme. Pola pikir ini mendorong seseorang mengonsumsi produk bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan (Wahyudin & Purwaningwulan, 2017).

Konsumsi, di dalam masyarakat kapitalisme global tidak sekedar sarana pemenuhan nilai kegunaan dalam pengertian sempit, akan tetapi merupakan cara membangun nilai-nilai simbolik. Konsumsi kini membentuk gaya hidup konsumtif yang ditopang oleh proses penciptaan diferensiasi secara kontinue melalui mekanisme tanda, citra, dan makna-makna simbolik (Piliang, 2011). Penelitian ini berkaitan dengan konsumerisme. Untuk terus eksis di ruang sosialnya, seseorang harus menjadi berbeda dari yang lain. Untuk terus tampil berbeda seseorang dalam ruang sosialnya harus terus menerus berkonsumsi, menjadikan seseorang pecandu dari suatu barang yang harus ia beli secara terus-menerus karena tak ingin terlihat sama terutama dalam penggunaan pakaian di ruang sosialnya.

Konsumerisme ditopang oleh gaya hidup yang dapat menjelaskan makna tindakan konsumtif seseorang (Chaney, 1996). Gaya hidup secara luas terkait dengan aktivitas, minat, dan opini yang bergerak secara dinamis, meskipun tidak cepat berubah dalam kurun waktu tertentu (Sari, 2015). Kamu bergaya, maka kamu ada. Dari gaya hidup sendiri yang sering diartikan sebagai cara orang menghabiskan waktu untuk aktivitasnya, hubungannya dalam penelitian penulis, mahasiswi di FISIP Unimal memilih model gaya hidup dalam ruang sosialnya adalah pencarian identitas dan sensibilitas untuk mencapai pengakuan bahwa dia (mahasiswi) mempunyai gaya yang berbeda, merasa unik dari yang lain, penampilan merupakan hal utama di lingkungannya. Gaya hidupnya di ruang sosial menunjukkan kelasnya.

Sementara itu, citra diri (*self image*) merupakan gambaran seseorang tentang dirinya yang sering terkait dengan citra fisik, khususnya penampilan. Citra diri menurut Chaplin (dalam

Ramadhani & Putrianti, 2014), yaitu kesan yang diidealkan. Citra diri sendiri sangat berkaitan dengan penelitian penulis, dimana seorang mahasiswi akan membuat citranya sendiri dalam menghadapi ruang sosialnya. Dengan dia membuat dirinya berbeda dengan orang lain, maka orang lain akan memiliki pandangan terhadapnya bahwa dia (mahasiswi) berbeda, unik, tidak memiliki gaya yang sama. Tampil beda akan memperoleh pengakuan, pujian, dan menempatkan ia di kelas yang berbeda dari orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kampus Universitas Malikussaleh yaitu tepatnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan menjadikan mahasiswi sebagai subjek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada dinamika dan proses serta bermaksud untuk memahami apa yang dialami subjek penelitian (Moleong, 2014) yaitu budaya diferensiasi personal mahasiswi yang tak ingin terlihat sama dengan mahasiswi lainnya. Peneliti memilih informan secara sengaja, yaitu para mahasiswi Program Studi Sosiologi sebanyak 6 (enam) orang, dengan ketentuan adanya figur dominan yang menginginkan kontinuitas, identitas, dan pengetahuan mengenai konsumerisme dan gaya hidup. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini antara lain data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

TUJUAN PEREMPUAN TAMPIL BEDA

Mengukir nama berarti membuat tanda, mencapai pengakuan atas perbedaan seseorang dengan orang lainnya. Memperkenalkan perbedaan berarti menciptakan waktu. Di dalam pergulatan hidup dan pergulatan mencapai kesuksesan, letak pentingnya tanda-tanda distingtif yang tujuan akhirnya adalah mengidentifikasi apa yang menjadi properti paling superfisial dan kasat mata dari sebuah karya. Tanda-tanda distingtif ini menghasilkan eksistensi di dalam sebuah dunia di mana satu-satunya cara untuk eksis adalah menjadi berbeda, ‘mengukir nama’ secara pribadi maupun kelompok (Bourdieu, 2010). Dari hasil penelitian yang menjadi tujuan mahasiswi tampil beda di lingkungan FISIP adalah : (1) ingin menjadi pusat perhatian; (2) menarik perhatian lawan jenis; (3) lebih percaya diri; (4) tidak suka menggunakan barang yang sama. Berikut akan dijelaskan lebih rinci.

1. Keinginan Menjadi Pusat Perhatian

Jika berbicara tentang penampilan, gaya, dan keinginan tampil beda tentu tak lepas dari pembicaraan tentang *fashion*. Hal ini berarti berbicara tentang apa yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Seseorang membuat penampilannya berbeda dari orang lain karena ingin menunjukkan sesuatu pada orang lain.

Penampilan yang menarik dengan memakai produk-produk *fashion* akan membuat mereka menjadi orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya, dan dapat dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tampil berbeda dengan menggunakan barang yang unik dari produk-produk *fashion* serta gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman membuat mereka seolah menjadi selebriti yang diidam-idamkan oleh para penggemarnya. Berikut hasil wawancara dengan RA (21), salah satu mahasiswi Program Studi Sosiologi yang menyatakan bahwa:

“... gak ada tujuan sih, cuma senang beda aja. Ya mungkin jadi pusat perhatian, karena kita beda dan punya gaya sendiri dibanding orang dan gak ikut-ikutan sama gaya atau penampilan orang.” (RA, Bukit Indah, 05/03/2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari tampil beda dari orang lain adalah ingin menjadi pusat perhatian dan ingin punya gaya sendiri tanpa mengikuti gaya orang lain. Dengan tampil beda dapat menunjukkan bahwa seseorang dapat menciptakan gaya atau penampilan yang sebelumnya tidak ada pada orang lain. Tampil berbeda dan lebih cantik dari orang lain sudah menjadi keinginan setiap perempuan. Agar terus tampil berbeda dari yang lain seseorang akan mulai mempersonalisasi barang-barang tertentu yang diidentikkan dengan diri mereka. Menganggap sebuah barang tunggal dan hanya dimiliki oleh dirinya seorang sehingga jika memakainya tidak akan ada orang lainnya yang akan menggunakannya, merasa dirinya berbeda dan kemudian mendapat perhatian dari orang lain karena tampil berbeda di lingkungannya. Hal serupa disampaikan C (21), salah satu mahasiswi Program Studi Sosiologi yang menyatakan bahwa:

“... tujuan... biar tampil beda aja sih. Gak ada tujuan lain, ya maunya jadi pusat perhatian, dipuji dan kalo dibilang cantik, bagus kan kitanya juga senang” (C, Bukit Indah, 22/03/2018).

Pakaian memiliki pesan artifaktual yang ditampakkan melalui penampilan tubuh. Cara seseorang berbusana selalu dinilai oleh orang lain (Trisnawati, 2011). Maka kebergayaan menjadi penting karena orang yang tidak bergaya akan menerima beragam sanksi dari lingkungan pergaulannya (Hendariningrum & Susilo, 2008). Tampil berbeda merupakan sebuah kebutuhan

sekaligus sebagai ekspresi diri dan komunikasi dari pemakainya. Pakaian yang mengikuti mode mencerminkan kepribadian dan citra diri. Hal itulah yang dirasakan oleh S (21), salah satu mahasiswi Program Studi Sosiologi yang menyatakan bahwa:

“... orang-orang kan bakalan tanyain ke kita kak, eh beli dimana, bagus ya, kita kan jadi mencolok terus diperhatiin sama orang kita jadi pusat perhatian kak” (S, Bukit Indah, 05/03/2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tujuan seseorang tampil berbeda dengan yang lain karena ingin tampil mencolok di ruang sosialnya dan menjadi pusat perhatian. Perempuan akan sangat senang menjadi pusat perhatian orang lain, senang ditanyai dan dijadikan referensi bagi orang lain. Tetapi tetap berkeinginan bahwa penampilannya tunggal dan tak ingin sama atau mirip dengan orang lain bahkan dengan teman sendiri. Selanjutnya wawancara dengan AF (22), salah satu mahasiswi Program Studi Sosiologi diperoleh keterangan:

“... Sebenarnya gak ada niat yang signifikan, kek mana ya mungkin pas itu kita, kita sendiri yang berbeda dari orang lain, jadi senang gitu. Senang kan kalo orang-orang tanyain sama kita tentang yang gak ada sama orang lain. Gak ada niat tertentu” (AF, Bukit Indah, 22/03/2018).

Dari hasil wawancara di atas informan mengaku bahwa berpenampilan menarik atau berbeda di ruang sosialnya adalah untuk menunjukkan sesuatu, menunjukkan pada orang lain apa yang kita punya dan akan menjadi tontonan bagi orang lain. Mahasiswa lebih tertarik dalam mode daripada orang yang lebih dewasa. Namun masalahnya kebanyakan mahasiswa tidak memiliki penghasilan yang cukup menopang gaya hidupnya. Oleh karena itu mereka melakukan berbagai pola adaptasi agar dapat mengakomodasi selera mode berpakaian mereka.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan seseorang melakukan pembedaan diri adalah mendapat kesenangan tersendiri, ingin menjadi pusat perhatian, ingin menunjukkan pada yang lain bahwa gaya atau penampilannya cantik. Manusia adalah makhluk hidup yang tak bisa hidup sendiri, maka dari itu selalu menginginkan perhatian orang lain, rela melakukan apapun agar mendapat pujian dan perhatian orang lain. Apa yang dilakukan seseorang atas usaha ingin diperhatikan oleh orang lain. Menjadi pusat perhatian memang sesuatu yang menyenangkan bagi seorang perempuan. Para mahasiswa menggunakan pakaian bukan lagi pada kebutuhan biologis namun sudah beralih pada keinginan untuk memuaskan hasrat diri yang ingin dipuji dan menjadi pusat perhatian di lingkungannya atau memamerkan apa yang ia punya. Zaman sekarang seseorang selalu ingin menunjukkan sesuatu pada orang lain, ingin menjadi tontonan bagi orang lain yang dianggap cantik. Jika sudah tampil berbeda dari orang lain dan

mencolok di lingkungannya, maka perhatian akan tertuju pada diri si pemakai tampilan tersebut. Maka tampil berbeda haruslah kontinue agar perhatian itu terus ada dan melekat.

Tampil beda sepertinya telah menjadi kebiasaan, motivasi, atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk terus berpenampilan tunggal di ruang sosialnya adalah karena ingin menjadi pencipta tren di lingkungannya, menjadi kenyamanan dan kesenangan tersendiri bagi penggunanya. Perempuan cenderung menghindari penampilan yang sama dengan orang lain karena ingin menjadi yang paling menarik, unik, dan diperhatikan oleh lingkungannya. Informan S mengungkapkan:

“... gak suka kali sama kawan sendiri, tapi suka ikut-ikut... maksudnya gini kak, kalo dia gak bilang, lihat kita ikut, benci saya. Tapi kalo misalnya dia bilang, kita beli ini yok, maksudnya bareng-bareng belinya yok, kalo ada yang sama keknya baju itu udah gak mau pakek lagi, rasanya baju itu keknya kasih ke orang aja, apalagi yang pake itu misalnya orang-orang jauh sana orang kampung sana itu keknya gak mau lagi pakek baju itu keknya.” (S, Bukit Indah, 05/03/2018).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak suka memakai barang yang sama dengan orang lain bahkan dengan teman sendiri. Seseorang akan merasa risih jika memiliki barang yang sama dengan yang lain tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Dan jika ada yang memakai barang yang sama dengannya rasanya ia tidak ingin lagi memakai pakaian itu, terlebih lagi jika yang memakai barang tersebut merupakan orang yang dianggap kampung dan memiliki selera rendah, sehingga lebih baik memberikan barang tersebut kepada orang lain. Hasil wawancara dengan RA (21) diperoleh keterangan memperkuat pandangan tersebut:

“enggak suka, gak tau aja... kayak pasaran, sama gitu. Misalkan kita pake tas yang sama noleh ke kanan dia sama juga noleh kiri dia juga, kayak ngerasa enggak nyaman aja. ...gak suka, gak pede, apalagi kalo yang kebetulan, yang make baju itu keliatan kampung... padahal bisa dibilang mode sekarang tapi pas ngeliat dia yang pake... orang yang kampung... jadi keliatan gak suka lagi baju itu....” (RA, Bukit Indah, 05/03/2018).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan tidak suka memiliki atau memakai barang yang sama dengan orang lain karena merasa “pasaran”. Merasa tidak nyaman bila memakai barang yang sama dengan orang lain. Seorang perempuan jika memakai sesuatu barang akan lebih sensitif untuk melihat keadaan sekitar, takut dan tidak nyaman jika ada yang memakai barang yang sama, sehingga membuat para perempuan lebih berhati-hati dalam menggunakan suatu barang, karena mereka ingin tampil berbeda dari yang lain, tidak ingin gayanya atau barang miliknya sama dengan yang lain, karena takut dianggap “pasaran”. Terlebih jika mereka kebetulan memakai barang yang sama dengan orang yang tidak mereka sukai, mereka menjadi lebih sensitif lagi. Hal ini sebagaimana pandangan Bourdieu yang memaparkan bahwa konsumsi dilakukan

untuk tujuan pembedaan sosial. Ia berpendapat bahwa gaya hidup adalah suatu area penting bagi pertarungan pelbagai kelompok dan kelas sosial. Konsumsi budaya itu cenderung mengisi suatu fungsi sosial berupa melegitimasi perbedaan-perbedaan sosial (Storey, 2017).

2. Menarik Perhatian Lawan Jenis

Kemenarikan fisik dan penampilan diri di lingkungan dapat menjadi faktor penentu untuk seseorang dicintai oleh orang lain, dimana seorang laki laki akan lebih tertarik pada perempuan yang dianggap berpenampilan menarik, berbeda, dan unik. Tampil beda sudah tentu harus dijalankan oleh setiap perempuan, jika ingin terus diperhatikan dan mendapatkan pujian serta rasa ketertarikan pada lawan jenis. Berpenampilan menarik dan berbeda adalah termotivasi dari keinginan mendapat perhatian dari lawan jenis. Informan I (20) menyatakan:

“Apalagi tujuannya sih? ... pokoknya kalo kita udah nyaman, udah rapi... tujuannya pasti menarik orang lain... ya kayak cowok. Sebenarnya setiap perempuan pasti ingin jadi pusat perhatian” (I, Bukit Indah, 22/03/2018).

Hal serupa disampaikan oleh R (19), salah satu mahasiswi Program Studi Sosiologi yang menyatakan:

“... Sebenarnya gak ada tujuan apa-apa kak, dilihat cowok mungkin... rasa suka sama seseorang pasti ada, jadi kita termotivasi untuk harus tampil rapi... harus ini... harus itu...” (R, Bukit Indah, 22/03/2018).

Penampilan fisik mempengaruhi berbagai jenis reaksi termasuk rasa suka dan respon orang. Hal ini sangat terkait dengan apa yang mereka kenakan (Azhar, 2014). Pada umumnya kaum perempuan mempunyai kepedulian yang lebih besar terhadap penampilan fisik dibandingkan kaum laki-laki. Penampilan sangatlah penting sebagai basis kepercayaan diri dan rasa bangga. Tujuan seorang perempuan tampil beda di ruang sosialnya adalah menarik perhatian lawan jenis. Apalagi bila penampilan tersebut dapat memikat lawan jenis dan orang yang disukai yang dapat memotivasi untuk terus tampil rapi dan cantik. Ketika seseorang melakukan sesuatu karena terdorong rasa perlu akan sesuatu maka seseorang tersebut akan melakukan apapun untuk mendapatkannya.

3. Lebih Percaya Diri

Penampilan meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri sangatlah diperlukan agar kita mampu menilai diri kita secara positif. Berikut wawancara dengan RA (21), salah seorang informan penelitian:

“... ngerasa pede, kalo orang mau niru style aku... tapi aku gak suka kalau untuk niru-niru style orang itu... kalo aku beli baju sih lebih cenderung memilih yang nyaman walaupun

kadang-kadang baju tersebut modelnya udah lama ataupun udah gak *fashion* lagi. Tapi kalo kira-kira itu masih nyaman untuk dipake ya istilahnya nyaman untuk dikenakan gak peduli itu baju tempo dulu kek dibilangnya. Biar tampil beda.” (RA, Bukit Indah, 05/03/2018)

Mode memang selalu berubah-ubah dan terus diperbaharui dari waktu ke waktu dengan bertitik tolak pada mode sebelumnya dan akan berulang pada kurun waktu tertentu. Tetapi gaya klasik akan tetap ada dan akan tetap disukai oleh sebagian orang yang memang ingin tampil berbeda dari orang lain dan ingin eksis di ruang sosialnya.

Sudah lumrah bagi setiap perempuan yang ingin hanya dirinya lah yang paling bagus, paling cantik, dan paling lainnya. Merasa senang akan hal itu pun menjadi kebiasaan bagi para perempuan, sehingga diwujudkan dengan memakai barang yang berbeda dari orang lain. Tak ayal jika para perempuan selalu berlomba-lomba untuk terus tampil berbeda. Informan AF mengungkapkan:

“senang, karena itu *limited edition* dong. kadang-kadang kita kalau bedanya positif pede ajakan, selama kita jalan yang bener ya pede aja. Kalo yang pas-pas kita selera kita lagi gimana-gimana mencolok atau gimana-gimana warnanya atau gimana jadikan orang liatnya berbeda.” (AF, Bukit Indah, 22/03/2018).

Bagi para pencari citra diri, untuk terus dapat membuat dirinya memperoleh pengakuan dan dianggap menarik, maka membedakan diri adalah hal yang harus terus dilakukan. Informan C (21) menambahkan:

“lebih percaya diri karenakan beda dari orang lain dan gak ada tujuan lain sih, cuma kan lebih menarik aja kalo dilihat beda dari orang lain” (C, Bukit Indah, 22/03/2018).

Percaya diri memang menjadi salah satu bagian penting dalam diri seorang perempuan. Percaya diri sangatlah diperlukan agar kita mampu menilai diri kita secara positif. Menggunakan barang yang berbeda dan tampil beda dari orang lain membuat kepercayaan diri perempuan meningkat dan merasa tampil berbeda akan lebih menarik dilihat oleh orang lain di sekitarnya. Penampilan sangatlah berpengaruh pada kepercayaan diri seorang perempuan. Hal itu akan memberi perasaan aman dalam menghadapi lingkungannya.

4. Tidak Suka Menggunakan Barang yang Sama

Dengan banyaknya industri dan perusahaan yang memproduksi barang (pakaian) dalam jumlah yang besar, barang-barang yang sama diproduksi oleh produsen lalu disebar. Pada dasarnya perempuan tidak ingin tampil atau terlihat sama dengan orang lain, jika terlihat sama ia akan merasa risih, terganggu, dan sebagainya. Hasil wawancara dengan informan I (20) diperoleh keterangan:

“... gak senang karena perempuan itu gak boleh disamakan... jangan ada sama lah sama orang. Kalo ada sama, kita jadi susah, gak enak dipandang.” (I, Bukit Indah, 22/03/2018)

Sedikit perbedaan dengan keterangan di atas, informan R (19) mengatakan:

“... kalo menurut saya sama atau bedanya itu gak masalah kak, yang penting itu kan hak orang lain untuk menggunakan *fashion* itu sendiri. Gak papa sama itu juga hak orang lain.” (R, Bukit Indah, 22/03/2018)

Hal serupa disampaikan oleh AF (22), salah satu mahasiswi Program Studi Sosiologi:

“kalo modelnya menurutku, aku suka walaupun sama aku pede aja, gak masalah kalo aku suka sama baju itu, karena simpel. Kalo gak simpel ya gak suka... juga itu rasanya lucu, abis itu yang memproduksi baju itukan bukan cuma satu, yang lain kan berhak memakainya. Kecuali diejek-ejek di-*bully* baru rasanya palak, marah. Gak suka diejek, itukan kita terserah kita mau pake baju apa, tapi kan kalo diejek jadi *bad mood*. Gak suka diejek pokoknya.” (AF, Bukit Indah, 22/03/2018)

Bourdieu menyatakan habitus terbentuk akibat logika praktik, yang berarti individu ditentukan oleh seperangkat kondisi materi tertentu. Walaupun habitus memberi kerangka untuk bertindak, namun ia tidak statis dan dapat dibentuk oleh strategi-strategi yang diadopsi oleh berbagai kelompok sosial (Lury, 1998). Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kebanyakan dari perempuan ingin tampil berbeda dan menarik, tapi tidak ingin tampil sama dengan yang lain. Namun ada sebagian perempuan yang tidak terlalu peduli memakai barang yang sama dengan yang lain, meskipun perempuan sangat sensitif jika dikritik pada penampilannya.

Mahasiswi yang menjadi informan penelitian mempersonalisasi barang-barang tertentu dan menganggap dirinya tunggal sehingga mahasiswi lain pun berpikir seperti itu, dan hal itu menyebar. Orang lain memiliki kerangka berpikir seperti itu karena terpengaruh oleh lingkungannya. Saat satu orang berpikir seperti itu dan yang lain mengikuti maka dari itu terbentuklah habitus yang mana orang mulai berpikir bahwa inilah yang harus dilakukan, tampil berbeda atau penampilan tunggal di lingkungan itu sebuah keharusan, alhasil menjadi struktur yang menstruktur yang lainnya.

PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWI FISIP UNIMAL

Perilaku konsumtif diiringi irasionalitas dan kompulsif, dengan tujuan kesenangan diri. Hal ini sebenarnya sebagai bentuk demonstrasi kekayaan dan status (Veblen dalam Suminar & Melyuntari, 2015; Bakti, et al., 2020). Perilaku konsumtif adalah mengonsumsi barang atau jasa di luar kebutuhan rasional (Lubis dalam Fitriyani, et al., 2013).

1. Membeli Barang

Berbelanja memang sebuah aktivitas yang menyenangkan bagi kebanyakan perempuan. Berbelanja berkembang menjadi sebuah cerminan gaya hidup tidak terlepas dari adanya keterlibatan *fashion* sebagai pemuas keinginan. Keterlibatan *fashion* itu sendiri membuat para konsumen memiliki rasa ketergantungan terhadap dunia *fashion*, mendorong perilaku konsumtif dengan pembelian tanpa perencanaan yang matang.

a. Berdasarkan *Trend*

Trend terkait apa yang sedang digandrungi atau sedang “menjamur” di tengah masyarakat. Informan S (21) dan C (21) menyatakan:

“... kalo misalkan mau beli barang lihat *trend* dulu, kalo kebanyakan di instagram itu. Lihat *trend*-nya rame atau akan rame... kalo kita lihat di jalan pun, orang itu semua pake baju itu. Itu saya gak akan beli lagi, kecuali memang udah suka kali.” (S, Bukit Indah, 05/03/2018)

“gini sih, lihat keadaan *trend*-nya dulu... pengen punya barang itu yang unik ya, yang orang lain gak pake tapi kita punya...” (C, Bukit Indah, 22/03/2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saat membeli sesuatu keunikan pada barang sangat diperhatikan, karena pada dasarnya perempuan menyukai sesuatu yang unik-unik dan berbeda dari orang lain sehingga hanya ada pada dirinya. Belanja atau membeli barang lebih merupakan “interaksi simbolis dimana individu membeli dan mengonsumsi kesan”. Yang dibeli adalah kesan dan pengalaman yang selama ini dipertontonkan di ruang sosial (Featherstone dalam Rafa'al, 2017). Perkiraan dalam membeli suatu barang adalah melihat keadaan sekitar apakah barang tersebut akan meledak atau banyak digunakan oleh orang lain atau tidak. Jika sudah banyak yang menggunakan barang tersebut berarti barang tersebut tidak dibeli, karena para mahasiswi takut akan menggunakan barang yang sama dengan yang lain.

b. Berdasarkan Daya Beli

Banyak orang yang mengatakan barang bagus itu didasarkan atas mutu dan kualitasnya. Mutu barang berhubungan dengan harga dan produsennya. Wawancara dengan RA (21) dan AF (22) diperoleh informasi:

“... yang aku lihat kualitasnya, kedua nyaman gak dipake... terus pertimbangan paling besar harga, ngeliat dulu di sekitar... pantau dulu *fashion* apa sekarang... misalnya tas... gimana model sekarang... kalo kira-kira tas tersebut terlalu pasaran... terlalu rame yang pake di kampus itu aku pasti gak beli.” (RA, Bukit Indah, 05/03/2018)

“harganya murah, gak cepet habis modelnya, kayak kita pake baju polos kan, panjang polos gak akan luntur-luntur modelnya. Yang bisa dipake bertahun-tahun, yang misalkan kita pake tahun ketujuh pun atau tahun keberapapun gak buat kita gak gimana-gimana dan tetap *in gitu*.” (AF, Bukit Indah, 22/03/2018)

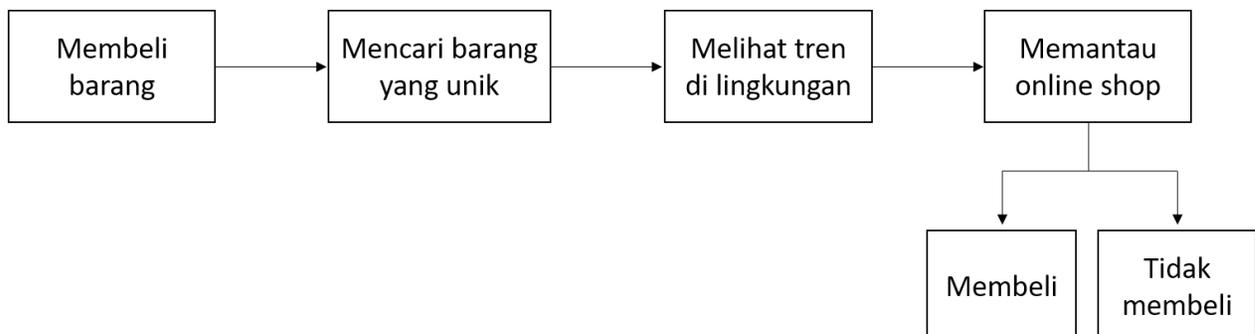
Pada umumnya konsumen mahasiswi mempunyai keinginan membeli barang yang tinggi, mempunyai ciri khas dalam berpakaian dan berdandan. Tetapi mereka juga harus menyesuaikan diri dengan harga produk yang dikonsumsi.

2. Pola Membeli Barang

Trend mempengaruhi *fashion* anak muda. Ada begitu banyak hal yang ditawarkan pada masa sekarang. Barang-barang diproduksi dalam skala besar membuat barang tersebut tidak tunggal dan tentunya akan ramai di pasaran. Dengan berkembangnya internet yang memudahkan para penggunanya, *olshop (online shop)* pun hadir, sehingga membantu para pemburu *fashion* memuaskan hasrat mereka. Memantau *online shop* merupakan salah satu cara saat ingin membeli barang, karena umumnya *fashion ter-update* akan sangat mudah menyebar di *online shop*, sehingga kita akan mengetahui benda-benda mana yang sudah banyak dipakai oleh orang lain. Dengan cara seperti itulah seseorang menentukan apa yang akan ia beli agar tidak membeli barang yang sama dengan orang lain.

Pola membeli barang dapat digambarkan dimana seorang membeli barang bukan berdasarkan pada kebutuhan melainkan pada rasa suka dan rasa ingin berbeda dengan orang lain. Alhasil konsumsi jenis ini telah membentuk kehidupan sosial manusia, membudaya, mendominasi, meresapi, serta memenuhi hasrat tak terbatas dengan kemampuan yang terbatas (Rafa'al, 2017). Konsumsi kemudian mengarah kepada keinginan menunjukkan sesuatu kepada orang lain bahwa hanya dia seorang yang memiliki barang atau tampilan tunggal. Para mahasiswi berusaha menunjukkan bahwa dengan kemampuan terbatas tapi bisa berkreasi tak terbatas.

Bagan 1. Skema Pola Membeli Barang



KESIMPULAN

Busana seseorang mengindikasikan dari kelompok mana ia berasal. Diri, status, dan gender dinyatakan secara kuat melalui pakaian dan dandanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, para mahasiswi di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ingin tampil beda disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) Keinginan menjadi pusat perhatian. Setiap perempuan sangat senang diperhatikan oleh orang lain, oleh sebab itu tujuan melakukan tampil beda dari orang lain adalah ingin menjadi pusat perhatian; (2) Keinginan menarik perhatian lawan jenis; (3) Keinginan menjadi *trendsetter*, di mana perempuan ingin menjadi referensi bagi orang lain. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan orang lain tapi dialah yang diikuti oleh orang-orang yang di sekitarnya; (4) Merasa lebih percaya diri. Ketika mahasiswi menggunakan barang yang berbeda dari orang lain maka ia merasa kepercayaan dirinya muncul dan lebih siap menghadapi lingkungannya.

Kedua, konsumsi bukan lagi terkait dengan nilai-guna, melainkan konstruksi dan rekonstruksi identitas diri. Mahasiswi di Program Studi Sosiologi dalam hal mengkonsumsi barang bukanlah pada kebutuhan pokok saja, tetapi dalam hal berbelanja atau membeli barang didasarkan pada lingkungannya, yaitu agar tidak sama dengan orang lain. Mereka terfokus untuk terus memperhatikan lingkungannya, bukan membeli barang atas dasar fungsi.

Peneliti memahami bahwa percaya diri merupakan kunci utama agar kita selalu memiliki pandangan positif tentang siapa diri kita dan apa potensi yang ada dalam diri kita sehingga mampu membuat orang memperhatikan bahkan mencintai kita. Namun yang dinilai oleh orang lain bukan hanya sekedar penampilan fisik. Cara berpikir dan sikap jualah yang kemudian membuat orang-orang akan menganggap kita ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. D. (2013). Perilaku Konsumtif dalam Membeli Barang pada Ibu Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Psikoborneo*, 1(2), 79-83.
- Azhar (2013). Peranan Daya Tarik Fisik terhadap Perasaan Cinta pada Lelaki yang Memiliki Wanita dengan Tunanetra. *Psikoborneo*, 1(4), 237-240.
- Bakti, I. S., Nirzalin, & Alwi (2019). Konsumerisme Menurut Perspektif Jean Baudrillard. *Jurnal Sosiologi USK*, 13(2), 146-165.

- Bakti, I. S., Anismar, & Amin, K. (2020). Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK*, 14(1), 81-98.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Kreasi Wacana.
- Chaney, D. (1996). *Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jalasutra.
- Fitriyani, N., Widodo, P. B., & Fauziah, N. (2013). Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa di Genuk Indah Semarang. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 1-14.
- Hendariningrum, R., & Susilo, M. E. (2014). Fashion dan Gaya Hidup: Identitas dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1).
- Hotpascaman, S. (2010). Hubungan antara Perilaku Konsumtif dengan Konformitas pada Remaja. *Skripsi*. Program Sarjana Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Jenkins, R. (2004). *Membaca Pikiran Bourdieu*. Kreasi Wacana.
- Lury, C. (1998). *Budaya Konsumen*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Pertiwi, M. M. C. A., & Bharata, B. S. (2012). Budaya Populer dan Pesan Persuasif Majalah Perempuan.
- Piliang, Y. A. (2011). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Matahari.
- Pratiwi, G. I. (2015). Perilaku Konsumtif dan Bentuk Gaya Hidup (Studi Fenomenologi pada Anggota Komunitas Motor Bike of Kawasaki Riders Club (BKRC) Chapter Malang). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1(5).
- Rafa'al, M. (2017). Identitas Gaya Hidup dan Budaya Konsumen dalam Mengonsumsi Brand The Executive. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 1(1).
- Ramadhani, T. N., & Putrianti, F. G. (2014). Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Citra Diri pada Remaja Akhir. *SPIRITS*, 4(2), 22-32.
- Ritzer, G. (2010). *Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Sari, D. N. (2014). Perbedaan Gaya Hidup Mahasiswa Ditinjau dari Status Ekonomi dan Jenis Kelamin pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. *Psikoborneo*, 2(2).
- Soedjatmiko, H. (2008). *Saya Berbelanja Maka Saya Ada: Ketika Konsumsi dan Desain Menjadi Gaya Hidup Konsumeris*. Jalasutra.
- Storey, J. (2017). *Theories of Consumption*. Routledge.
- Sugiyono (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Suminar, E., & Meiyuntari, T. (2015). Konsep Diri, Konformitas dan Perilaku Konsumtif pada Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 4(2).
- Trisnawati, T. Y. (2016). Fashion sebagai Bentuk Ekspresi Diri dalam Komunikasi. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 36-47.
- Ulfa, N. S. (2017). Konsumsi sebagai Penanda Kesejahteraan dan Stratifikasi: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=23010&val=1295>, diakses 20/10/2017
- Wahyudin, U., & Purwaningwulan, M. M. (2017). Konsumerisme pada Iklan Majalah Perempuan. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 7(1).



Kampus Bukit Indah Jl. Sumatera No.8
Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
E-mail: jspm@unimal.ac.id
Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jspm>